



TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDAGANGAN SATWA LIAR
DI DKI JAKARTA**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

AJENG INTAN PURNAMASARI

NIM. 500803659

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2018

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM
UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul **Implementasi Kebijakan Perdagangan Satwa Liar di Provinsi DKI Jakarta** adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

BOGOR, Agustus 2018

Yang Menyatakan



AJENG INTAN PURNAMASARI

NIM 500803659

ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Perdagangan Satwa Liar di Provinsi DKI Jakarta

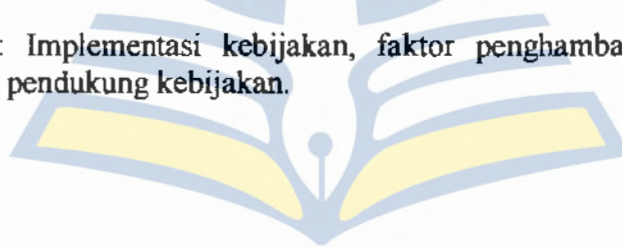
Ajeng Intan Purnamasari

ajengip92@gmail.com

Program Pascasarjana Universitas Terbuka

Jakarta merupakan kota di Indonesia yang menjadi pintu gerbang dan salah satu tempat paling banyak memperjualbelikan dan memelihara satwa liar. Implementasi kebijakan perdagangan satwa liar di DKI Jakarta masih bersifat sektoral dan belum menjamin penuh satwa liar di alam sudah terlindungi; sanksi untuk pelaku perdagangan satwa belum maksimal; dan kebijakan masih tumpang tindih. Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan yaitu UU No. 5 Tahun 1990 yang menjadi landasan bagi para pelaksana kebijakan sudah berusia lebih dari 25 tahun; lalu status hukum spesies hanya dikategorikan menjadi dua, yaitu dilindungi dan tidak dilindungi; serta hambatan lain yaitu banyak aparat kebijakan khususnya di DKI Jakarta yang belum mengenai jenis-jenis satwa liar. Faktor pendukungnya yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan para pelaksana kebijakan sudah bekerjasama atau melibatkan aparat kepolisian dan TNI dalam hal penegakkan hukum; pemerintah saat ini sudah didukung oleh teknologi yang lebih modern dan lebih bersifat partisipatif dimana masyarakat juga sudah dapat ikut serta dalam proses pengaduan atau pelaporan tindak kejahatan terhadap tumbuhan maupun satwa liar.

Kata Kunci : Implementasi kebijakan, faktor penghambat kebijakan, faktor pendukung kebijakan.



ABSTRACT

Implementation of Wildlife Trade Policy in Province DKI Jakarta

Ajeng Intan Purnamasari

ajengip92@gmail.com

Program Pascasarjana Universitas Terbuka

Jakarta is Indonesia's front gate and one of those hot spots for wild animals' trade, even to the extent of keeping them at home. The implementation of the ruling policy in the province about the trade is yet to be applied thoroughly; yet it still cannot fully guarantee the protection of wild animals in the wilderness. In addition, the penal punishment for the traders is not considered just, yet it is still worsened by the overlapping policies. One of the hindrances to the application of the policy is Law number 5 of 1990 which has been the statute for the said case. Moreover, the species law is divided into only two categories, which are protected and unprotected. There are also more hindrances to name, especially in the Special Region of Jakarta which is not familiar yet with different kinds of wildlife animals. However, the preservation of wild animals has had its own supporting factors, which is the Ministry of Environment and Forestry (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan or KLHK in Indonesia) with the stakeholders have built a joint work by involving the police and armed forces in the law enforcement. The government nowadays is also already equipped with the needed modern technology and more participative in which the local people could also participate in making reports on cases of violence against protected species, including plants and animals.

Key words : Policy implementation, policy inhibiting factors, policy support factors

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Perdagangan Satwa Liar di
DKI Jakarta

Penyusun TAPM : Ajeng Intan Purnamasari

NIM : 500803659

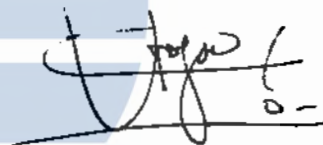
Program Studi : Magister Administrasi Publik

Hari / Tanggal :

Menyetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Darmanto, M.Ed.
NIP. 1959102719860311003

Dr. Tri Darmayanti, M.A.
NIP. 196004101989032001

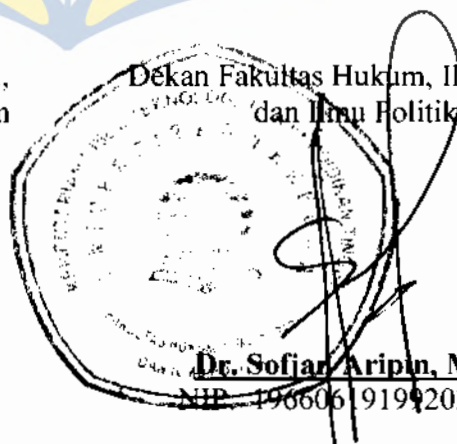
Mengetahui,

Ketua Pascasarjana Hukum, Sosial,
dan Politik dan Mengelola program
Magister Administrasi Publik

Dekan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik



Dr. Darmanto, M.Ed
NIP. 1959102719860311003



Dr. Sofjan Aripin, M.Si.
NIP. 196606191992031002

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Ajeng Intan Purnamasari
 NIM : 500803659
 Program Studi : Magister Administrasi Publik
 Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Perdagangan Satwa Liar di DKI
 Jakarta

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal :

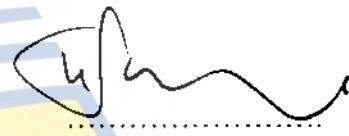
Waktu :

Dan telah dinyatakan **LULUS**

PANITIA PENGUJI TAPM

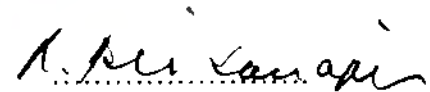
Ketua Komisi Penguji

Nama : Dr. Darmanto, M.Ed



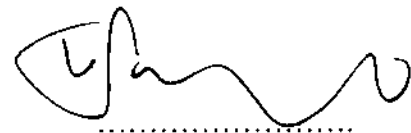
Penguji Ahli

Nama : Prof. Dr. Abdul Aziz Sanapiah, S.E., MPA.



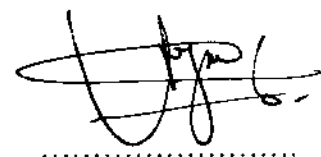
Pembimbing I

Nama : Dr. Darmanto, M.Ed.



Pembimbing II

Nama : Dr. Tri Darmayanti, M.A



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya lah penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) dengan judul “Implementasi Kebijakan Perdagangan Satwa Liar di Provinsi DKI Jakarta”. Penulisan TAPM ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Rasa syukur dan terima kasih bahwa beberapa kendala dan hambatan yang dijumpai dalam penulisan TAPM ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan-kekuarangan lainnya, maka dari itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak akan menjadi masukan yang sangat diharapkan.

Penulis mengucapkan rasa terima kasih dan hormat yang mendalam kepada bapak Dr. Darmanto, M.Ed selaku Pembimbing I, serta ibu Dr. Tri Damayanti, M.A selaku dosen pembimbing II saya yang telah memberi banyak masukan, dukungan, dan selalu sabar membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda Maman Suryaman, Ibunda Yeni Herlina, Kakanda Andri Yudha Wirasakti dan Adinda Rieska Rizki Ramadhani, serta kepada suami tercinta Mark Rademaker yang telah memberikan dukungan beserta doanya untuk penulis. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada teman satu bimbingan (ibu Lenna Juliarsih), dan teman-teman MAP Online Program yang telah membantu membagi informasi serta membantu dalam proses penulisan TAPM ini. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait seperti bu Ratna, bu Arina dari UPBJJ UT Bogor untuk kelancaran administrasi, pihak dari KLHK, BKSDA, Bea Cukai, LSM WCS, dan aktor dari perdagangan satwa liar yang menjadi informan dalam tesis saya ini .

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu pada kesempatan ini penulis mohon kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan penyusunan dimasa-masa mendatang. Semoga TAPM ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

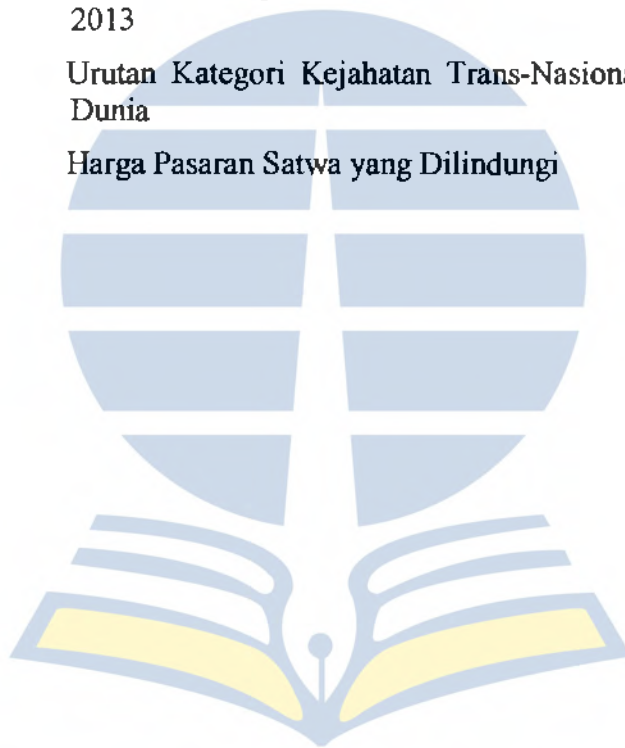
DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR LAYAK UJI	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	2
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6

BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	8
B. Kerangka Pemikiran	29
C. Operasionalisasi Konsep	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	33
B. Lokasi dan Waktu	34
C. Teknik Pengumpulan Data	34
D. Instrumen Penelitian	35
E. Penentuan Informan	36
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	37
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Provinsi DKI Jakarta	39
B. Hasil Penelitian	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	98

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 2.1.	Kajian Penelitian Terdahulu	26
Tabel 2.2.	Operasionalisasi Konsep “Implementasi Kebijakan Perdagangan Satwa Liar di Provinsi DKI Jakarta”	31
Tabel 4.1.	Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Administrasi 2009-2013	41
Tabel 4.2.	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun Menurut Kabupaten/Kota Administrasi 2009-2013	42
Tabel 4.3.	Urutan Kategori Kejahatan Trans-Nasional di Dunia	53
Tabel 4.4.	Harga Pasaran Satwa yang Dilindungi	63



DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
Gambar 2.1.	Proses Implementasi Kebijakan Publik	12
Gambar 2.2.	Faktor yang Berpengaruh Terhadap Implementasi Kebijakan Publik	18
Gambar 2.3	Kerangka Berfikir Penelitian “Implementasi Kebijakan Perdagangan Satwa Liar di Provinsi DKI Jakarta”	30
Gambar 4.1	Sketsa Peta Provinsi DKI Jakarta	40
Gambar 4.2	Puluhan Ribu Burung Dijual Ilegal di Jakarta	55
Gambar 4.3	Izin Presiden Untuk Satwa	64
Gambar 4.4	Tahapan 1 Pelaporan terhadap Tindak Kejahatan Perdagangan Satwa Liar yang Ada Pada Foto Akun Pribadi atau Grup <i>Facebook</i>	88
Gambar 4.5	Tahapan 2 Pelaporan terhadap Tindak Kejahatan Perdagangan Satwa Liar yang Ada Pada Foto Akun Pribadi atau Grup <i>Facebook</i>	89
Gambar 4.6	Tahapan 3 Pelaporan terhadap Tindak Kejahatan Perdagangan Satwa Liar yang Ada Pada Foto Akun Pribadi atau Grup <i>Facebook</i>	89
Gambar 4.7	Tahapan 4 Pelaporan terhadap Tindak Kejahatan Perdagangan Satwa Liar yang Ada Pada Foto Akun Pribadi atau Grup <i>Facebook</i>	90
Gambar 4.8	Tahapan 5 Pelaporan terhadap Tindak Kejahatan Perdagangan Satwa Liar yang Ada Pada Foto Akun Pribadi atau Grup <i>Facebook</i>	90
Gambar 4.9	Tahapan 6 Pelaporan terhadap Tindak Kejahatan Perdagangan Satwa Liar yang Ada Pada Foto Akun Pribadi atau Grup <i>Facebook</i>	91
Gambar 4.10	Tahapan 7 Pelaporan terhadap Tindak Kejahatan Perdagangan Satwa Liar yang Ada Pada Foto Akun Pribadi atau Grup <i>Facebook</i>	91

DAFTAR BAGAN

Bagan	Halaman
Bagan 4.1. Payung Kebijakan dan Hukum Terkait Perdagangan Ilegal Satwa Liar	43



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Pedoman Wawancara	103
Lampiran 2. Rekapitan Hasil Wawancara	109



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat kaya, dimana diperkirakan ada sebanyak 300.000 jenis satwa liar, yang diantaranya merupakan 515 jenis mamalia, dan sekitar 1539 jenis burung (Khoiri, 2017). Khoiri menyampaikan pada laman website ProFauna, tentang Fakta Satwa Liar, dimana saat ini terdapat 69 spesies satwa liar yang terancam punah di alam dengan kategori kritis (*critically endangered*), kategori terancam (*endangered*) 197 spesies dan kategori rentan (*vulnerable*) ada 539 jenis. Data yang disebutkan oleh IUCN tahun 2011 (dalam Khoiri, 2017), menunjukkan bahwa saat ini jenis reptil yang terancam punah ada sebanyak 32 jenis, jenis burung sebanyak 119, jenis ampibi berjumlah 32 jenis, serta 184 jenis mamalia (Khoiri, 2017).

Menurut ProFauna (2008), Indonesia merupakan salah satu pasar yang besar, menjanjikan dan bebas bagi para pelaku perdagangan satwa liar. Terdapat banyak sekali spesies yang jumlahnya mencapai ribuan yang diburu serta diperdagangkan ke dalam maupun luar negeri, spesies-spesies tersebut diperdagangkan dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati (hanya bagian-bagian tubuhnya saja seperti kulit, daging, ataupun gading). ProFauna menambahkan bahwa terdapat ancaman bagi kelangsungan hidup satwa-satwa tersebut jika perdagangan terus dilakukan dengan tanpa ada batasannya.

Terdapat beberapa faktor menurut Soehartono dan Mardiasuti (2002) yang dapat menyebabkan terjadinya perdagangan satwa liar, diantaranya yaitu

sikap pemerintah yang masih kurang tegas dalam pemberian sanksi atau hukuman kepada para pelaku, kurang pemantauan perdagangan ilegal, serta masih diperlukannya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah ataupun lembaga terkait pentingnya melestarikan satwa liar yang terancam punah. Sangat sedikit penegakkan hukum yang dilakukan atas kejahatan terhadap satwa liar di Indonesia (Soehartono dan Mardiasuti, 2002).

Berdasarkan laporan yang dipublikasikan oleh USAID (*United States Agency for International Development*) pada tahun 2015, dijelaskan oleh Samedi bahwa data statistik dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan pada tahun 2005-2009 terdapat rata-rata 100 kasus per tahun, yang kemudian pada tahun 2010 dan 2012 menurun menjadi 37 kasus, dan hanya terdapat 5 kasus pada tahun 2013. Dijelaskan juga dalam laporan USAID bahwa terbatasnya kemauan politis dan kolaborasi antar lembaga penegakan hukum dan pelaksanaan prosedur penegakan hukum yang tidak tepat, serta terdapat pula celah-celah hukum dan inkonsistensi yang menghalangi kesuksesan dari suatu proses tuntutan menjadi faktor kendala dalam upaya pemberantasan perdagangan satwa liar di Indonesia. Menurut Sasongko (2015), secara internasional, *Convention on International Trade in Endangered Species* (CITES) mewajibkan negara anggota untuk dapat memberikan sanksi hukum membuat regulasi yang mengatur perdagangan satwa liar baik ekspor maupun impor guna mencegah satwa liar tersebut dari bahaya kepunahan.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi CITES dengan pelaksana otoritas pengelola atau *management authority* CITES. Pelaksana otoritas pengelola CITES pada tingkat nasional adalah Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan

Konservasi Alam (PHKA), dan pada tingkat provinsi yaitu kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), masing-masing unit pengelola Taman Nasional bertanggung jawab untuk menegakkan hukum kejahatan terhadap satwa liar di wilayah mereka. Selaku pelaksana, pengelola CITES di Indonesia berusaha semaksimal mungkin telah melakukan kerjasama dengan pusat penelitian Biologi LIPI, dan LSM yang bergerak dalam bidang konservasi serta instansi terkait, diantaranya Pusat Karantina Hewan, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Pusat Karantina Ikan departemen Kelautan dan Perikanan, Kepolisian RI dan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan (Suyatri, 2015).

Semakin langkanya satwa liar di alam maka semakin penting pula menjaga kelestariannya. Cara yang mungkin dapat mengurangi kelangkaan satwa liar tersebut adalah dengan penguatan upaya pelaksanaan kebijakan perdagangan satwa liar di Indonesia. Banyaknya laporan penelitian yang menunjukkan bahwa upaya pelaksanaan kebijakan perdagangan satwa liar masih rendah, salah satu contohnya yaitu laporan dari Kementerian Lingkungan Hidup yang ditulis dalam *Serasi* (majalah online Kementerian Lingkungan Hidup). KLH menyebutkan bahwa penjualan satwa liar akhir-akhir ini semakin marak terjadi di kota-kota besar di Sumatera, Kalimantan, Irian Jaya, dan di kota lainnya. Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu daerah yang menjadi tempat paling banyak memperjual belikan dan memelihara satwa.

Aksi perdagangan satwa liar di beberapa lokasi di Jakarta seperti di pasar burung Pramuka, Jakarta Timur dan Barito di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan membuktikan bahwa kebijakan terkait perdagangan satwa liar dapat dikatakan belum berhasil diterapkan. Banyak satwa yang sudah langka dengan mudah

ditemui di pasar-pasar tersebut. Berdasarkan informasi dari surat kabar online, Kabar Jakarta, 16 Oktober 2015 (<http://kabarjakarta.com/scorpion-perdagangan-satwa-liar-di-jakarta-tidak-terkendali/>), terdapat laporan organisasi internasional TRAFFIC yang menyatakan bahwa LSM Pemantau Perdagangan Satwa, SCORPION, telah melakukan investigasi di pasar-pasar di satwa di Jakarta.

Hasil dari investigasi tersebut menunjukkan kondisi perdagangan satwa liar di Jakarta, dimana saat ini masih dapat dijumpai ribuan satwa seperti burung elang, jenis-jenis burung udang yang diperdagangkan secara terbuka di pasar-pasar satwa di Jakarta. Pihak investigator LSM SCORPION mengatakan, setelah mereka melihat perdagangan satwa ilegal maka mereka selalu mengirimkan foto-foto dan laporan kepada BKSDA Jakarta, namun sejauh ini belum ada tindakan yang diambil terhadap para penjual satwa. Tidak ada yang pernah melaporkan adanya keberadaan petugas BKSDA berseragam di pasar satwa, serta tidak ada bukti adanya kegiatan penyamaran. Pihak SCORPION menyampaikan berbagai laporan terkait temuannya ke BKSDA, tetapi sampai saat ini belum ada pedagang yang ditangkap atau digeledah.

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka alasan penulis melakukan penelitian ini yaitu karena penulis melihat bahwa memang saat ini sudah ada kebijakan dan undang-undang yang mengatur terkait perdagangan satwa liar di Indonesia, namun mengapa masih terdapat atau masih sering dijumpai adanya aktivitas perdagangan satwa liar secara ilegal khususnya di DKI Jakarta.

B. PERTANYAAN PENELITIAN

Berikut ini masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan perdagangan satwa liar di Provinsi DKI Jakarta?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan perdagangan satwa liar di Provinsi DKI Jakarta?
3. Apa saja faktor-faktor pendukung implementasi kebijakan perdagangan satwa liar di Provinsi DKI Jakarta?

C. TUJUAN PENELITIAN

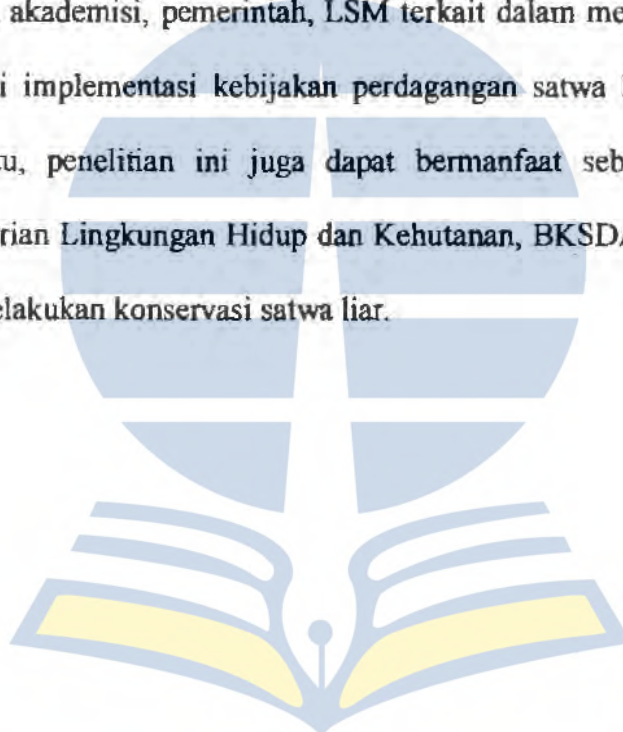
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis implementasi kebijakan perdagangan satwa liar di Provinsi DKI Jakarta
2. Untuk menganalisis apa saja faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam melaksanakan implementasi kebijakan perdagangan satwa liar di DKI Jakarta
3. Untuk menganalisis apa saja faktor-faktor yang dibutuhkan atau diperlukan dalam mencapai keberhasilan implementasi kebijakan perdagangan satwa liar di DKI Jakarta.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah literatur bagi kalangan akademisi, pemerintah, LSM terkait ilmu administrasi publik khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan perdagangan satwa liar di DKI Jakarta.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi dalam menjawab proses pembelajaran terutama dalam meningkatkan wawasan serta ilmu pengetahuan bagi peneliti dari kalangan akademisi, pemerintah, LSM terkait dalam mengkaji secara ilmiah mengenai implementasi kebijakan perdagangan satwa liar di DKI Jakarta. Selain itu, penelitian ini juga dapat bermanfaat sebagai *database* bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BKSDA, serta LSM terkait untuk melakukan konservasi satwa liar.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. KAJIAN TEORI

1. Kebijakan Publik

1.1. Definisi Kebijakan Publik

Menurut Suwitri (2016), kebijakan publik telah banyak diartikan oleh beberapa pakar yang diantaranya yaitu Carl J. Friedrich yang mendefinisikan kebijakan adalah suatu usulan tindakan dari seseorang, kelompok maupun pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Adapun Amara Rasasataya (dalam Suwitri, 2016) menjelaskan beberapa elemen penting dalam suatu kebijakan agar tercapainya tujuan yang diinginkan, elemen-elemen tersebut yaitu 1) identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai; 2) diperlukan taktik atau strategi yang tepat dari berbagai langkah ; serta 3) penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi. Suwitri menambahkan bahwa ada beberapa hal yang harus dimiliki dan terkandung dalam kebijakan, yaitu: tujuan yang ingin dicapai harus berpihak pada kepentingan masyarakat; tindakan-tindakan yang dilakukan harus disusun dengan mudah ke dalam bentuk program dan proyek; tindakan yang diusulkan dapat berasal dari perorangan, kelompok, dalam ataupun luar pemerintahan; serta penyediaan input yang berupa sumber daya baik manusia maupun bukan manusia. Kebijakan publik diartikan oleh Thomas R. Dye dan James E. Anderson (dalam Suwitri, 2016) adalah sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan.

Tampaklah bahwa kebijakan publik hanya dapat ditetapkan pemerintah, pihak-pihak lain atau yang lebih dikenal dengan sebutan aktor-aktor kebijakan publik hanya dapat mempengaruhi proses kebijakan publik dalam batas kewenangannya masing-masing. Thomas R. Dye (dalam Suwitri, 2016) menambahkan bahwa hal tersebut dapat disebabkan oleh 3 hal dari kewenangan yang dimiliki pemerintah, seperti: hanya pemerintah yang memiliki kekuatan dan kemampuan untuk melegitimasi atau mengesahkan kebijakan publik, untuk melaksanakan kebijakan publik, serta memberlakukan kebijakan publik kepada publik yang menjadi sasaran (Suwitri, 2014).

1.2. Tujuan Kebijakan Publik

Tujuan kebijakan publik menurut Nurani (2009) yaitu:

- 1) Dapat dibedakan menjadi beberapa sisi yaitu dari sisi sumber daya, kebijakan publik yang dimana masyarakat menerima distribusi sumber daya dari negara, dan yang menyerap sumber daya ke negara termasuk alokatif, realokatif, dan redistribusi.
- 2) Kebijakan bersifat membatasi (regulatif) misalnya kebijakan pengadaan barang dan jasa, kebijakan tarif, dll. Sedangkan kebijakan bersifat membebaskan (deregulatif) seperti kebijakan penghapusan tarif, kebijakan privatisasi, dll.
- 3) Kebijakan yang bersifat menggerakkan sumber daya nasional demi tercapainya suatu tujuan yang telah ditentukan, misalnya kebijakan desentralisasi (kebijakan dinamisasi).

4) Memperkuat negara dengan kebijakan yang memajukan peran negara, disamping itu juga untuk memperkuat pasar atau publik yang dimana kebijakannya bertujuan mendorong peran publik atau mekanisme pasar.

1.3. Proses Kebijakan Publik

Proses kebijakan publik dikemukakan oleh Jones dalam Suwitri (2016) memiliki sebelas (11) tahapan, yang dimulai dengan perumusan masalah dan diakhiri dengan termination. Berikut ini adalah beberapa tahapanya:

1. *Perception/ defination*: Pada tahap pertama ini, diperlukan pemahaman dan kepekaan terhadap apa yang sedang dibutuhkan masyarakat.
2. *Aggregation*: Tahap ini pembuat kebijakan mengumpulkan orang-orang dengan cara menulis di media massa, penelitian atau orasi agar memiliki pemikiran sama terhadap suatu masalah.
3. *Organization*: Membuat organisasi formal ataupun informal yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang berpikiran sama dan berhasil dikumpulkan.
4. *Representation*: Mempengaruhi pembuat kebijakan agar suatu masalah dapat diakses ke agenda setting.
5. *Agenda Setting*: Suatu masalah terpilih ke dalam agenda setting pembuat kebijakan.
6. *Formulation*: Tahapan ini merupakan tahap yang paling kritis, dimana para pembuat kebijakan melakukan negosiasi, bargaining, responsivitas dan kompromi dalam memilih alternatif- alternatif.

7. *Legitimation*: Pada tahap ini, alternatif-alternatif yang sudah terpilih, lalu disahkan.
8. *Budgeting*: Membuat list anggaran untuk implementasi kebijakan. Penyusunan skala prioritas juga dipengaruhi oleh ketersediaan dana.
9. *Implementation*: Siap melaksanakan kebijakan yang telah dilegitimasi apabila dana telah tersedia.
10. *Evaluation*: Melihat dan menilai hasil kebijakan yang telah diimplementasi. Tahap ini juga merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menemukan faktor-faktor apa saja yang dapat menghambat, mendorong serta kelemahan dari kebijakan tersebut. Evaluasi kebijakan membutuhkan bantuan proses monitoring.
11. *Adjusment/Termination*: Tahap ini merupakan tahap penentuan apakah kebijakan publik yang telah selesai tersebut harus direvisi atau diakhiri.

2. Teori Implementasi Kebijakan

Salah satu aspek yang sangat penting dalam seluruh proses kebijakan yaitu aspek implementasi (Nurani, 2009). Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Menurut Nurani, suatu kebijakan agar dapat terwujud atau terealisasikan, maka perlu implementasi kebijakan atau proses interaksi antara suatu tindakan dan tujuan, dengan menggunakan kebijakan aktor, organisasi, prosedur, dan teknik dipakai secara bersamaan. Rangkaian kegiatan atau aktifitas yang bermaksud menghantarkan kebijakan kepada masyarakat dengan harapan mendapatkan hasil yang diinginkan, biasanya mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari

kebijakan tersebut. Gaffar dalam Nurani (2009) memberikan contoh dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, mempersiapkan sarana prasarana, dana, serta tanggung jawab dari semua pihak yang melaksanakan kebijakan tersebut. Menurut Gaffar dalam Nurani (2009), prinsip implementasi kebijakan adalah agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sunggono (1994) menjelaskan mengenai implementasi kebijakan, yakni suatu kegiatan sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Sunggono (1994) menambahkan apabila program telah dibuat, tujuan-tujuan kebijakan publik telah dirancang, serta dana telah ditetapkan, barulah proses implementasi kebijakan publik dapat dimulai. Sunggono menggambarkan secara sistematis proses implementasi, yaitu sebagai berikut:



Gambar 2.1.
Proses Implementasi Kebijakan Publik

Pada Gambar 2.1, dapat dilihat bahwa Sunggono (1994) menjelaskan suatu kebijakan yang dilakukan merupakan proses awal dari implementasi. Suatu hasil dari proses implementasi terdiri dari hasil kebijakan yang segera, contohnya apabila dilihat dari jumlah dan isi barang maupun jasa dalam jangka waktu tertentu yang pemerintah hasilkan untuk mensejahterakan masyarakat. Hasil akhir kebijakan yakni dimana terdapat perubahan taraf kesejahteraan yang dialami oleh warga masyarakat.

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) terdapat enam variabel yang memberikan pengaruh terhadap implementasi kebijakan, yakni: *Pertama*, standar dan sasaran kebijakan yang harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan dan tidak menimbulkan konflik antara pelaksana kebijakan; *Kedua*, Sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia; *Ketiga*, hubungan dan kerjasama dengan instansi lain agar sasaran kebijakan atau program dapat tercapai sesuai harapan; *Keempat*, karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi mempengaruhi implementasi dari suatu kebijakan; *Kelima*, kondisi sosial politik dan ekonomi yang mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan implementasi kebijakan, sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan; dan *Keenam*, Disposisi implementor yang mencakup tiga hal yang penting yaitu: 1) Respon implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauan untuk melaksanakan kebijakan; 2) Kognisi, yaitu pemahamannya terhadap kebijakan; dan 3) Intensitas disposisi implementor.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier (1983), yang mengemukakan bahwa terdapat tiga kelompok variabel yang berpengaruh terhadap implementasi suatu kebijakan yaitu:

1. kelompok variabel dari karakteristik dari masalah (*tractability of the problem*), yaitu:

a) Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan;

- b) Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran;
 - c) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi; dan
 - d) Cakupan perubahan perilaku yang diinginkan.
2. Karakteristik kebijakan/ undang-undang (*ability of statute to structure implementation*), antara lain:
- a) Kejelasan isi kebijakan;
 - b) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis;
 - c) Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut;
 - d) Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana;
 - e) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana;
 - f) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan; dan
 - g) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.
3. Variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*), mencakup:
- a) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi;
 - b) Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan;
 - c) Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor; dan
 - d) Sikap dari kelompok pemilih.

Berdasarkan beberapa ahli yang sebelumnya telah mengemukakan terkait implementasi kebijakan, maka penulis dapat menyimpulkan diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu (1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan; (2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan (3) adanya

hasil kegiatan. Studi implementasi adalah terkait kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Implementasi kebijakan dalam prakteknya yakni suatu proses yang kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan.

3. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Sunggono (1994) menjelaskan beberapa faktor penghambat dari pelaksanaan implementasi kebijakan, yaitu antara lain:

a. Isi kebijakan

Kegagalan dari suatu implementasi kebijakan karena masih belum rinci atau belum jelasnya isi kebijakan; masih kurangnya ketetapan internal maupun eksternal kebijakan yang akan dilaksanakan; serta masih kurangnya sumber daya pembantu seperti waktu, dana dan tenaga manusia.

b. Informasi

Ketiadaan informasi karena adanya gangguan komunikasi yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan sangat berpengaruh buruk terhadap efektifitas pelaksanaan implementasi kebijakan.

c. Dukungan

Pelaksanaan implementasi kebijakan publik akan sangat tidak berjalan dengan lancar apabila kurang atau bahkan tidak adanya dukungan dari seluruh pelaksana kebijakan.

d. Pembagian Potensi

Gagalnya implementasi suatu kebijakan juga dapat terjadi apabila kurang jelasnya batasan-batasan pembagian wewenang, tugas maupun tanggung jawab dari para pelaksana kebijakan dalam suatu birokrasi.

Berikut ini ada beberapa upaya yang dapat mengatasi hambatan implementasi suatu kebijakan menurut (Sunggono, 1994), antara lain:

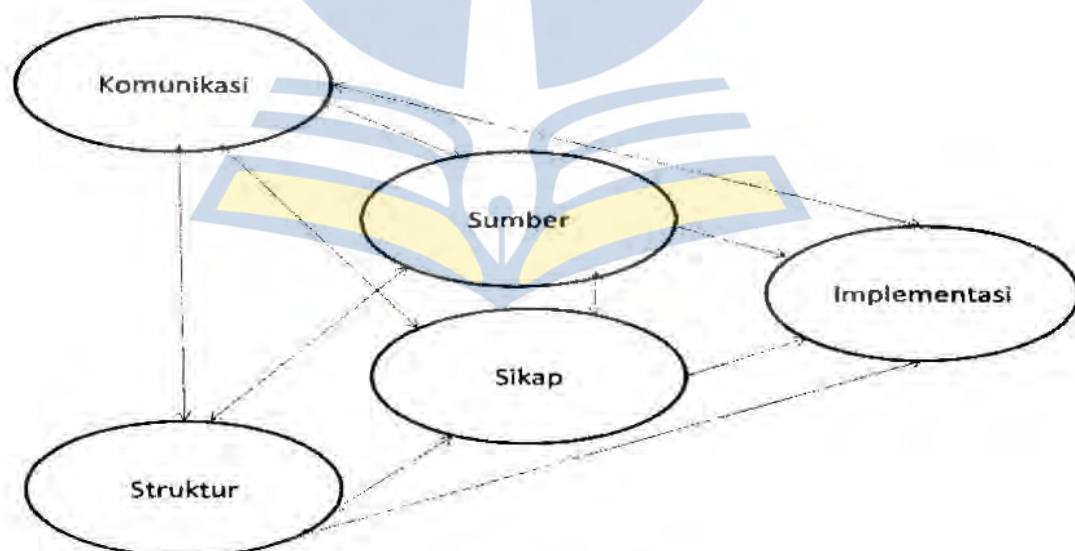
- a. Perlu adanya kecocokan antara kebijakan dengan hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.
- b. Semua petugas seperti hakim, jaksa, polisi perlu memiliki mental yang baik dalam melaksanakan tugas khususnya menerapkan suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan.
- c. Adanya fasilitas-fasilitas yang memadai yang dapat menunjang berlangsungnya atau kelancaran implementasi kebijakan.
- d. Adanya kesadaran, kepatuhan, dan perilaku dari seluruh warga masyarakat terhadap hukum seperti pada peraturan perundang-undangan.

Dalam proses implementasi kebijakan yang ideal menurut Quade (1984) akan timbul reaksi dan interaksi dari organisasi pengimplementasi, kelompok sasaran dan faktor lingkungan. Reaksi dan interaksi tersebut nantinya dapat berakibat terjadinya atau memunculkannya tekanan serta tindakan tawar menawar atau interaksi. Dengan adanya interaksi, maka akan memperoleh umpan balik yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan masukan atau saran untuk perumusan kebijakan selanjutnya. Quade lalu menambahkan bahwa ada sebanyak empat variabel yang perlu diperhatikan dan diteliti dalam analisis implementasi kebijakan publik, diantaranya:

- a. Kebijakan dengan pola yang diimpikan agar pelaksana kebijakan akan berusaha untuk mewujudkan.
- b. Kelompok target yang diharapkan dapat mengadopsi pola interaksi baru untuk memenuhi kebutuhannya.
- c. Organisasi pelaksana berupa unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan atau mengimplementasikan kebijakan.
- d. Faktor lingkungan yang dapat memberikan pengaruh pada implementasi kebijakan.

4. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Teori Implementasi Kebijakan Edward III dan George (1980) yang menjelaskan empat variabel penting dalam implementasi beroperasi secara simultan dan saling berinteraksi satu sama lain:



Gambar 2.2.
Faktor yang Berpengaruh Terhadap Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Edward III dan George (1980) dalam Teori Implementasi Kebijakan, faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan diantaranya

komunikasi, sumberdaya, watak atau sikap, dan struktur birokrasi, seperti pada Gambar 2.2, yaitu:

a. Komunikasi

Dalam proses komunikasi kebijakan, terdapat tiga hal yang penting yaitu transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Faktor transmisi yaitu dimana adanya keputusan yang dibuat dan dikeluarkan serta perintah pelaksanaan dari pembuat kebijakan. Selain itu, faktor konsistensi penting ketika perintah-perintah dalam pelaksanaan implementasi kebijakan berlangsung. Faktor kejelasan dalam mendukung implementasi juga sangat penting diperlukan, dimana informasi petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya diterima, melainkan komunikasi dan informasi tersebut harus jelas.

b. Sumber daya

Dalam mendukung pelaksanaan implementasi kebijakan, diperlukan sumber-sumber penting untuk melaksanakan tugas seperti staf yang memiliki kemampuan yang baik untuk bekerja, wewenang, dan fasilitas-fasilitas.

c. Sikap atau tingkah laku

Agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan efektif, maka penting bagi para pelaksana kebijakan memiliki sikap atau tingkah laku yang baik, yang dalam hal ini berarti adanya dukungan sehingga melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan para pembuat kebijakan.

d. Struktur birokrasi

Birokrasi adalah salah satu badan yang menjadi pelaksana kebijakan baik struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta (Winarno, 2002).

5. Teori Perdagangan Satwa

5.1. Pengertian Satwa Liar

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dapat diketahui bahwa:

“Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara. Disebutkan pula Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.”

5.2. Jenis-jenis Satwa Liar

Jenis-jenis satwa dapat digolongkan menjadi dua jenis menurut Pasal 20 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, yaitu sebagai berikut:

“Satwa terbagi dua jenis, yaitu satwa yang dilindungi dan satwa yang tidak dilindungi. Sedangkan jenis satwa yang dilindungi digolongkan dalam satwa dalam bahaya kepunahan dan satwa yang populasinya jarang.”

Menurut Tim Prima Pena (2007), satwa langka sama artinya dengan satwa yang dilindungi, dimana hewan atau binatang ini jumlahnya sudah sangat sedikit dan perlu adanya tindakan perlindungan dan pelestarian agar tidak punah sehingga keberadaannya tidak sulit lagi untuk dijumpai. Satwa liar endemik dapat diartikan sebagai satwa yang hanya dapat ditemukan di Indonesia. Jumlah satwa-satwa yang termasuk satwa endemik ada bermacam-macam. Sekitar 515 jenis mamalia atau sekitar 36% satwa endemik, 36 jenis primata atau sebesar 18%, 1533 jenis burung yang 44% yang diantaranya endemik, 600 jenis reptil atau sebesar 16%,

45% jenis ikan serta 15% jenis serangga merupakan satwa yang hanya dapat ditemukan di Indonesia atau endemik.

Nursahid (dalam Prayoga, 2015) mengungkapkan setiap 2 tahun sekali badan konservasi dunia atau IUCN (*International Union for Conservation of Nature and Natural Resources*) mengeluarkan daftar-daftar merah yaitu daftar spesies terancam punah yang dibukukan. Satwa-satwa yang dianggap punah menurut Nursahid (dalam Prayoga, 2015):

1. Apabila suatu satwa tidak ditemukan satu ekorpun hidup di dunia, atau tidak ada keraguan lagi bahwa individu terakhir telah mati, maka suatu jenis satwa dikatakan punah. Misalnya satwa yang telah punah yaitu harimau bali.
2. Jika satwa tersebut tidak ditemukan lagi di alam namun dapat ditemui di tempat pemeliharaan manusia atau pusat penangkaran, atau hidup di alam sebagai hasil pelepasan kembali di luar daerah sebaran aslinya, maka satwa tersebut dikatakan punah di alam. Misalnya adalah jalak bali yang sulit ditemukan di alam, namun masih ada beberapa puluh ekor di tempat penangkaran di Taman Nasional Bali Barat.
3. Secara ekologi apabila spesies tersebut punah yakni bila spesies tersebut memiliki jumlah yang sangat kecil sehingga efeknya pada spesies lain di dalam suatu komunitas dan dapat diabaikan, misalnya harimau sumatra.

Seperti yang telah diketahui dikarenakan perusakan habitat, perburuan, atau perdagangan satwa liar secara ilegal, dapat menyebabkan satwa tersebut

menjadi punah. Terdapat sebanyak tiga kategori atau kelompok besarnya peluang suatu jenis spesies berdasarkan ancaman kepunahan menurut IUCN (*International Union for Conservation of Natural Resources*), yaitu antara lain:

1. Kategori Kritis (*Critically endangered*), yaitu dimana sebuah takson dinyatakan sangat terancam akan kepunahan, memiliki peluang kepunahan lebih dari 50% dalam waktu kurun waktu 10 tahun.
2. Kategori Terancam (*Endangered*), yaitu sebuah takson dinyatakan sedang menghadapi resiko tinggi kepunahan di alam liar dalam waktu dekat, dan memiliki peluang untuk punah lebih dari 20% dalam kurun waktu 20 tahun.
3. Kategori Rentan (*vulnerable*), yaitu sebuah takson dianggap sedang menghadapi resiko tinggi kepunahan di alam liar, atau memiliki peluang untuk punah lebih dari 10% dalam kurun waktu 100 tahun.

5.3. Perdagangan Satwa Liar

Perdagangan satwa liar menurut Mardiasuti (2009) merupakan salah satu macam dari bentuk tindak kejahatan dan pelanggaran kehutanan yang sampai saat ini masih sering terjadi, seperti di pasar-pasar biasa, pasar hewan, di pameran, di pinggir jalan, bahkan di pasar maya (*cyber market*). Ia menjelaskan bahwa Jakarta sebagai salah kota yang disebut titik kuning yaitu kota yang rawan terhadap perdagangan satwa ilegal. Perdagangan satwa yang ada di pasar konvensional, di toko hewan peliharaan (*petshop*) maupun melalui pasar maya (*cyber market*) membuat pembeli seakan semakin dipermudah dalam mengakses dan bertransaksi satwa. Permintaan satwa (*demand*) di pasar ini umumnya tidak stabil, hal ini

dikarenakan para pembeli lebih dipengaruhi oleh kesenangan atau hobi dan popularitas (*trend*) dalam memelihara satwa liar.

Umumnya, para pembeli yang membeli satwa tersebut tidak segan-segan hingga memesan dan rela menunggu (*Pre order*) dikarenakan keunikan dan kelangkaan satwa tersebut. Permintaan pasar ini nampaknya begitu banyak dan semakin meningkat dimana mengakibatkan para pemasok semakin giat memenuhi pasokan dan permintaan pasar. Pemasok umumnya melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan sejumlah uang yang tidak sedikit ini, salah satu cara pemasok untuk mendapatkan satwa liar tersebut yaitu dengan mengambil atau memburu satwa di alam, terutama spesies-spesies yang belum dilakukan penangkaran. Hal ini jelas akan memberikan dampak terhadap perubahan jumlah populasi di alam yang semakin menipis. Waryono (2001) menyatakan bahwa terdapat tiga kelompok pelanggaran dalam perburuan, perdagangan, dan pemanfaatan satwa. Ketiga kelompok tersebut yaitu:

a. Kelompok pemanfaatan di daerah hulu:

Kelompok ini merupakan kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dekat atau di sekitar habitat satwa. Biasanya, kelompok ini merupakan masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi yang rendah, dan tingkat pengetahuan yang rendah terkait informasi konservasi satwa. Dengan keadaan yang seperti itu, masyarakat tidak jarang melakukan perburuan satwa dari alam bebas, bahkan menjadikannya sebagai mata pencaharian mereka.

b. Kelompok perantara:

Kelompok perantara bertugas untuk mengumpulkan, mencari, dan menjalankan satwa liar yang sudah diburu oleh kelompok pertama ke kota-kota, dan pasar-pasar hewan.

c. Kelompok pemanfaatan hilir:

Kelompok ketiga ini memiliki tugas untuk menjual atau memperdagangkan satwa liar, kelompok ini biasanya akan menjual satwa. Satwa tersebut sesuai dengan banyaknya permintaan yang berasal dari dalam maupun di luar negeri.

Dari sejumlah definisi-definisi yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dalam rencana penelitian ini maka penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier (1983) terkait faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, dimana dalam teori ini dapat dilihat bahwa terdapat tiga kelompok komponen yang nantinya akan menjawab dari tujuan penelitian ini.

6. Kajian Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu terkait dengan implementasi kebijakan perdagangan satwa liar, yaitu:

Elisa pada tahun 2014 membuat penelitian yang berjudul Efektivitas Peraturan Perdagangan Satwa Liar di Indonesia, dimana metodologi yang digunakan dalam penelitian tersebut yakni menggunakan pendekatan metodologis berpusat pada *desk review* dari sejumlah peraturan dan hukum yang ada, dan analisa materi yang relevan dengan kejahatan dan perdagangan satwa liar. Ia

menyimpulkan bahwa peraturan perundangan satwa liar akan lebih efektif bila unsur-unsur efektivitas hukum sudah terpenuhi, namun ia menambahkan bahwa saat ini unsur peraturan hukum, penegak hukum yang tidak menegakkan hukum tapi justru memperdagangkan satwa liar, sarana dan fasilitas yang kurang memadai, serta pemahaman masyarakat yang belum mengerti aturan hukum tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Rini (2008) dengan metode kualitatif ini menyimpulkan bahwa kebijakan yang ada dirasa masih kurang. Kebijakan tersebut yaitu kebijakan teknis operasional khusus yang diterbitkan untuk mengatur secara lebih khusus mengenai penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan satwa langka; banyak petugas yang kurang memahami substansi kebijakan dan undang-undang yang berlaku terkait perdagangan satwa; harus ada hukuman yang dapat menimbulkan efek jera yang berdampak langsung bagi pelaku perdagangan satwa; serta diperlukannya sikap aparaturnya kepolisian yang jelas dan tegas.

Penelitian yang dilakukan oleh Sudiharti (2004) dengan judul **Implementasi Kewenangan Pelayanan Perijinan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi di Dinas Pertanian dan Kehutanan Provinsi DKI Jakarta**, menyimpulkan bahwa implementasi kewenangan penyelenggaraan pelayanan perijinan tumbuhan dan satwa liar pada Dinas Pertanian dan Kehutanan provinsi DKI Jakarta belum berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini dikarenakan adanya masalah struktur organisasi; masalah SDM yang tidak memiliki kapasitas kerja yang bertanggung jawab; dan kewenangan seperti ketidakjelasan pembagian mekanisme kewenangan, ketidakadaan kriteria pembagian kewenangan serta ketidakadaan strategi implementasi kewenangan yang jelas. Metode yang

digunakan adalah penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, serta studi literatur.

Penelitian yang dilakukan oleh USAID (*United State of Agency International Development*) pada tahun 2015 dengan berjudul *Perdagangan Satwa Liar, Kejahatan Terhadap Satwa Liar dan Perlindungan Spesies di Indonesia: Konteks Kebijakan dan Hukum Changes For Justice Project*, menyimpulkan bahwa kesuksesan skala besar yang terjadi baru-baru ini seperti lebih dari 7.000 ekor kura-kura hidung babi dari pelabuhan Indonesia yang bertujuan ke Cina, sebagian besar adalah hasil perbaikan hubungan dan kerjasama antara bea cukai, kepolisian, dan penyidik PNS. Kesuksesan seperti ini adalah indikasi dampak yang cepat dalam perbaikan upaya pelaksanaan dan dengan kombinasi hukum yang ditargetkan, akan memungkinkan Indonesia untuk melakukan terobosan yang kuat dalam mengarungi kejahatan terhadap satwa liar dan perdagangan sawa liar di masa mendatang.

Adapun penelitian lain yang dikaji yakni penelitian yang dilakukan oleh Sinaga (2008), yang menggunakan metode analisis data hasil survei lapangan dan penelusuran pustaka dengan cara analisis dekriptif. Pengambilan data yakni dengan cara wawancara dan kuesioner. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini yaitu para pihak menganggap bahwa kinerja pemerintah Indonesia dalam melakukan upaya konservasi jenis hayati cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan lagi karena belum memadai untuk mengendalikan peredaran satwa liar di Indonesia agar tidak mengalami kepunahan. Pengaturan dan pengawasan

satwa liar dalam negeri perlu didukung melalui aturan-aturan khusus, termasuk pengaturan atas jenis-jenis asing.

Tabel 2.1. Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan bahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat dibuat suatu rincian kajian penelitian terdahulu, seperti yang tertera di bawah ini:

No	Judul Penelitian/Tahun	Penulis	Metode Penelitian	Kesimpulan
1.	Efektivitas Peraturan Perdagangan Satwa Liar di Indonesia/ 2014	Elisa Vionita Rajagukguk	Pendekatan metodologis berpusat pada <i>desk review</i> dari sejumlah peraturan dan hukum yang ada, dan analisa materi yang relevan dengan kejahatan dan perdagangan satwa liar.	Peraturan perundangan satwa liar akan efektif bila unsur-unsur efektivitas hukum sudah terpenuhi, namun saat ini unsur efektivitas hukum belum terpenuhi, dari unsur peraturan hukum, penegak hukum yang tidak menegakkan hukum tapi justru memperdagangkan satwa liar, sarana dan fasilitas yang kurang memadai, dan pemahaman masyarakat yang belum mengerti aturan hukum tersebut.
2.	Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Satwa Langka di Pasar Burung Pramuka/2008	Dhian Eka Chandra Rini, M., SH.	Pendekatan kualitatif, metode penelitian berupa analisis yuridis empiris-sosiologis dimana teknik yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu telaah dokumen, wawancara secara terbuka, dan observasi langsung ke obyek mendalam.	Kebijakan yang ada dirasa masih kurang. Kebijakan tersebut yaitu kebijakan teknis operasional khusus yang diterbitkan untuk mengatur secara lebih khusus mengenai penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan satwa langka; Saat ini masih banyak petugas kepolisian (seperti

				penyidik Polri) yang kurang memahami substansi kebijakan dan undang-undang yang berlaku terkait perdagangan satwa; Harus adanya hukuman yang dapat menimbulkan efek jera yang berdampak langsung bagi pelaku perdagangan satwa, serta diperlukannya sikap aparat kepolisian yang jelas dan tegas.
3.	Implementasi Kewenangan Pelayanan Perijinan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi di Dinas Pertanian dan Kehutanan Provinsi DKI Jakarta/2004	Yati Sudiharti	Metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, serta studi literatur.	Implementasi kewenangan penyelenggaraan pelayanan perijinan tumbuhan dan satwa liar pada Dinas Pertanian dan Kehutanan provinsi DKI Jakarta belum berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini karena adanya masalah struktur organisasi; masalah SDM yang tidak memiliki kapasitas kerja yang bertanggung jawab; dan kewenangan seperti ketidakjelasan mekanisme pembagian kewenangan, ketidakadaan kriteria pembagian kewenangan serta ketidakadaan strategi implementasi kewenangan yang jelas.
4.	Perdagangan Satwa Liar, Kejahatan Terhadap Satwa Liar dan Perlindungan Spesies di Indonesia: Konteks Kebijakan dan Hukum <i>Changes For Justice Project/ 2015</i>	USAID (<i>United State of Agency International Development</i>)	Pendekatan metodologis berpusat pada <i>desk review</i> dari sejumlah peraturan, hukum, dan yurisprudensi yang ada, dan analisa materi hukum yang	Kesuksesan skala besar yang terjadi baru-baru ini seperti lebih dari 7.000 kura-kura hidung babi dari pelabuhan Indonesia yang bertujuan ke Cina, sebagian besar adalah hasil perbaikan hubungan dan kerjasama antara bea

			relevan dengan kejahatan dan perdagangan satwa liar, dan lebih luas lagi pada perlindungan dan konservasi lingkungan	cukai, kepolisian dan penyidik PNS. Kesuksesan seperti ini adalah indikasi dampak yang cepat dalam perbaikan upaya pelaksanaan dan dengan kombinasi hukum yang ditargetkan, akan memungkinkan Indonesia untuk melakukan terobosan yang kuat dalam mengurangi kejahatan terhadap satwa liar dan perdagangan satwa liar di masa mendatang.
5.	Perdagangan Jenis Kura-Kura Darat dan Kura-Kura Air Tawar di Jakarta/2008	Hans Nico Agustinus Sinaga	Analisis data hasil survei lapangan dan penelusuran pustaka dilakukan dengan cara analisis deskriptif. Teknik pengambilan data dengan cara wawancara dan kuesioner.	Para pihak menganggap bahwa kinerja pemerintah Indonesia dalam melakukan upaya konservasi jenis hayati cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan karena belum memadai untuk mengendalikan peredaran satwa liar di Indonesia agar tidak mengalami kepunahan. Pengaturan dan pengawasan perdagangan satwa liar dalam negeri perlu didukung melalui aturan khusus, termasuk pengaturan atas jenis-jenis asing.

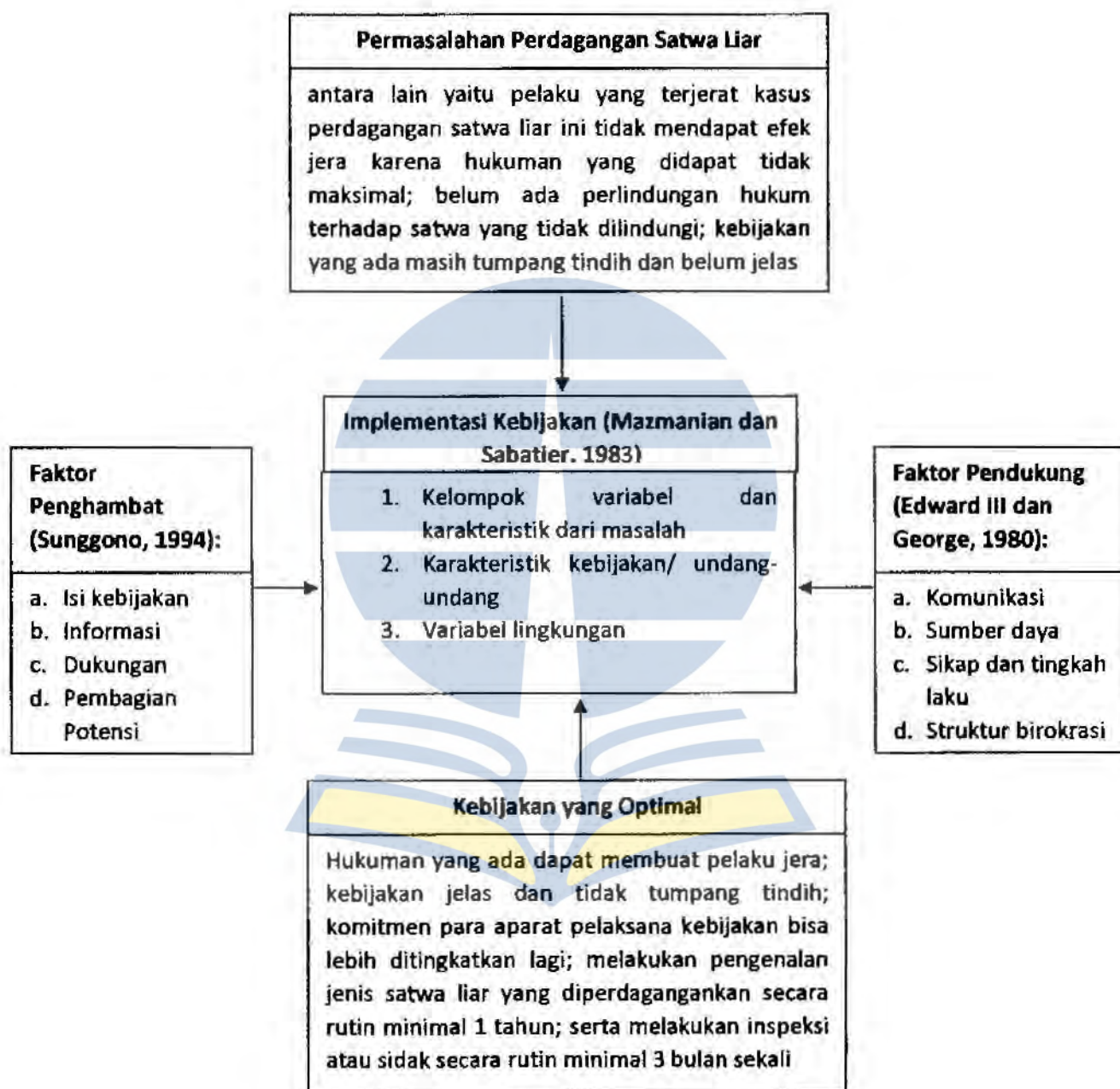
Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis akan melakukan penelitian kualitatif dimana teknik pengambilan data yang dilakukan yaitu dengan cara wawancara mendalam kepada informan-informan kunci yang memiliki pengalaman dan pengetahuan terkait perdagangan satwa liar khususnya di DKI Jakarta, serta penulis juga akan

menganalisis faktor-faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan perdagangan satwa liar yang belum dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

B. KERANGKA PEMIKIRAN

Terdapat peraturan terkait perdagangan satwa liar di Indonesia, yaitu Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta turunannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Implementasi kebijakan perdagangan satwa liar dapat dilihat bahwa saat ini sanksi yang berlaku terhadap para pelaku pun belum bisa dikatakan berat, belum pernah ada pelaku yang dihukum hingga maksimal selama 5 tahun kurungan penjara dan denda Rp 100 juta rupiah; Kebijakan yang ada saat ini masih tumpang tindih antara kementerian LHK dengan kementerian lain; petugas BKSDA dan dari instansi pelaksana kebijakan masih banyak yang mengetahui jenis satwa yang boleh diperdagangkan maupun yang dilindungi; dan memaksimalkan dalam pelaksanaan inspeksi atau patroli. Mazmanian dan Sabatier (1983) berpendapat bahwa analisis implementasi kebijakan diperlukan untuk melihat keefektifan dan relevansi kerangka kerja yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaannya, mengidentifikasi variabel atau komponen yang mempengaruhi pencapaian tujuan formal dalam keseluruhan proses implementasi. Variabel atau komponen yang mempengaruhi pencapaian tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi tersebut yaitu 1) mudah atau sulitnya dikendalikan masalah yang digarap; 2)

kemampuan kebijakan untuk mengsystematisasi proses implementasinya; dan 3) pengaruh lingkungan terhadap pelaksanaan kebijakan.



Gambar 2.3.

Kerangka Berfikir Penelitian “Implementasi Kebijakan Perdagangan Satwa Liar di Provinsi DKI Jakarta

C. OPERASIONALISASI KONSEP

Berikut ini adalah operasionalisasi konsep dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Tabel 2.2. Operasionalisasi konsep “Implementasi Kebijakan Perdagangan Satwa Liar di Provinsi DKI Jakarta”

<p>1. Implementasi Kebijakan adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan oleh pembentuk maupun pelaksana kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu. Terdapat komponen dan indikator dari implementasi kebijakan, diantaranya:</p>
<p>a. Karakteristik Masalah adalah ciri yang melekat pada setiap masalah yang ada Indikator dari Karakteristik Masalah antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan - Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran - Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi - Cakupan perubahan perilaku yang diinginkan
<p>b. Karakteristik Kebijakan adalah ciri yang melekat pada setiap kebijakan Indikator dari Karakteristik Kebijakan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Kejelasan isi kebijakan - Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis - Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan - Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar instansi atau institusi pelaksana - Kejelasan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana - Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan - Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.
<p>c. Lingkungan adalah kehidupan sosial, psikologi dan fisik di dalam maupun di luar perusahaan atau organisasi yang berpengaruh terhadap pekerja dalam melaksanakan tugas. Indikator dari Lingkungan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kondisional ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi - Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan - Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementator Sikap dari kelompok pemilih.
<p>2. Faktor Penghambat adalah hal-hal atau kondisi yang dapat menghambat atau menyebabkan suatu kegiatan seakan akan ditarik mundur. Terdapat komponen dan indikator dari Faktor Penghambat, antara lain:</p>
<p>a. Isi Kebijakan adalah suatu rangkaian proses yang menjadi pedoman atau dasar rencana dalam melaksanakan sesuatu untuk tujuan tertentu. Indikator dari Isi Kebijakan antara lain:</p>

<ul style="list-style-type: none"> - Rinci atau jelasnya suatu isi kebijakan - Masih kurangnya ketetapan internal maupun eksternal kebijakan yang dilaksanakan - Masih kurangnya sumberdaya pembantu seperti waktu, dana, dan tenaga manusia.
<p>b. Informasi adalah kumpulan pesan yang disampaikan baik ucapan atau ekspresi; lisan maupun tulisan Indikator dari Informasi adalah: Ada atau tidaknya gangguan komunikasi yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan</p>
<p>c. Dukungan adalah dorongan atau motivasi atau semangat kepada seseorang dalam situasi tertentu. Indikator dari Dukungan adalah: Ada atau tidak adanya dukungan dari seluruh pelaksana kebijakan</p>
<p>d. Pembagian Potensi adalah pembagian sebuah kemampuan dasar yang dimiliki seseorang untuk dikembangkan sehingga menjadi lebih baik lagi Indikator dari Pembagian Potensi adalah: Jelas atau tidaknya batasan-batasan pembagian kewenangan, tugas maupun tanggung jawab dari para pelaksana</p>
<p>3. Faktor Pendukung adalah hal-hal atau kondisi yang dapat mendorong atau mendukung atau menumbuhkan suatu kegiatan, usaha, atau produksi Terdapat komponen dan indikator dari Faktor Pendukung, antara lain:</p>
<p>a. Komunikasi adalah suatu proses seseorang atau kelompok atau organisasi menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Indikator dari Komunikasi dilihat dari: perintah pelaksanaan, konsistensi saat melaksanakan implementasi, serta kejelasan dalam mendukung implementasi.</p>
<p>b. Sumber Daya adalah nilai yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan Indikator dari Sumber Daya adalah: Staf yang memiliki kemampuan yang baik dalam bekerja, wewenang, dan fasilitas-fasilitas</p>
<p>c. Sikap adalah suatu pikiran, kecenderungan atau perasaan seseorang terhadap aspek tertentu pada lingkungan. Indikator dari Sikap adalah: Para pelaksana memiliki sikap atau tingkah laku yang baik atau tidak</p>
<p>d. Struktur Birokrasi adalah suatu organisasi yang memiliki rantai komando dimana lebih banyak orang yang berada di tingkat bawah daripada tingkat atas (bentuk piramida). Indikator dari Struktur Birokrasi adalah: Bagaimana struktur birokrasi pemerintahan tersebut, apakah sudah baik atau belum.</p>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Metode penelitian adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang alat-alat yang digunakan dalam suatu penelitian. Perlu adanya perhatian tentang jenis penelitian apa yang akan digunakan serta teknik-teknik pengumpulan data dan teknik analisis data agar dapat menunjang dalam penulisan tesis ini. Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka demikian penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana penelitian kualitatif ini berlandaskan dan bertumpu secara mendasar pada fenomenologi yang dijadikan sebagai dasar teoritis utama, dan etnometodologi sebagai dasar tambahan yang melatarbelakangi secara teoritis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yang dilakukan harus menghasilkan suatu teori yang dimana rancangan penelitian tersebut dibangun berdasarkan kumpulan asumsi dan konsep yang dikembangkan dari teori relevan yang ada. Sumber pokok jawaban penelitian terdapat data bukan pada teori. Teori-teori yang dikumpulkan ini hanya membantu untuk membandingkan atau membantu memperjelas karakteristik data.

Penelitian kualitatif ini merupakan prosedur penelitian dengan menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Adapun tesis ini berbentuk penelitian yang bersifat deskriptif yang berusaha memberikan gambaran suatu kondisi, sifat, karakteristik, dari suatu fenomena atau objek penelitian, dimana nantinya data yang diperoleh akan dijelaskan, dituturkan, dan ditafsirkan seperti situasi yang

dialami, suatu hubungan, kegiatan, pandangan, sikap yang nampak, atau suatu proses yang berlangsung, dan sebagainya. Melalui penelitian ini, penulis akan memberikan gambaran tentang implementasi pelaksanaan kebijakan perdagangan satwa liar di DKI Jakarta.

B. Lokasi dan Waktu

Penelitian ini dilakukan di beberapa tempat, yaitu : Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) DKI Jakarta; Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus terhadap konservasi seperti LSM *Wildlife Conservation Society* (WCS); serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penetapan lokasi tersebut ditetapkan secara sengaja (*purposive*). Waktu penelitian dilakukan dari bulan November 2017 sampai April 2018.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, maka penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sedangkan data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Sumber data primer** didapat dari studi lapangan, yaitu proses pengumpulan informasi, data, dan fakta secara langsung pada objek penelitian, dengan cara

wawancara secara mendalam (*in-depth interview*), yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dan lisan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti seperti 1) Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 2) Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) DKI Jakarta; 3) *Wildlife Manager* LSM *Wildlife Conservation Society* (WCS); 4) pihak dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia; serta 5) pelaku usaha perdagangan satwa liar di DKI Jakarta.

2. **Sumber Data Sekunder** didapat melalui Studi literatur/Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data sekunder dengan mempelajari buku-buku atau bahan-bahan tertulis yang ada hubungannya dengan topik yang akan diteliti, termasuk data-data tertulis lainnya yang berasal dari lembaga yang dijadikan objek penelitian termasuk mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan seperti buku yang didapat dari LSM *Wildlife Conservation Society* (WCS), yaitu berjudul *Potret Perdagangan Ilegal Satwa Liar di Indonesia*.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian. Penelitian dengan metode kualitatif, instrumennya adalah peneliti menggunakan pedoman wawancara, peranan peneliti lah yang menentukan keseluruhan apa yang dirancangnya. Penggunaan peneliti sebagai instrumen penelitian bertujuan untuk mendapatkan data empirik di lapangan, instrumen penelitian yang digunakan adalah wawancara terhadap objek penelitian yaitu 1)

Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 2) Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) DKI Jakarta; 3) *Wildlife Manager* LSM *Wildlife Conservation Society* (WCS); 4) pihak dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia; serta 5) pelaku usaha perdagangan satwa liar di DKI Jakarta (perdagangan satwa liar) melalui sejumlah pertanyaan yang terfokus dilakukan secara logis berhubungan dengan masalah penelitian, dan tiap-tiap pertanyaan merupakan jawaban-jawaban yang mempunyai makna dalam menguji hipotesis kerja.

E. Penentuan Informan

Dalam melaksanakan wawancara mendalam, penulis menentukan beberapa sumber atau informan yang dianggap paling representatif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan fokus penelitian. Penentuan informan dilakukan berdasarkan jabatan, pengalaman dan pemahan atas objek yang diteliti. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive* atau sengaja. *Purposive* yaitu orang yang memiliki pengetahuan cukup dan mampu menjelaskan keadaan yang sebenarnya tentang objek penelitian untuk mendapatkan data yang spesifik terkait apa saja faktor-faktor yang dapat menghambat kebijakan perdagangan satwa liar. Informan adalah orang yang berada pada lingkup penelitian, artinya orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Sehingga orang tersebut harus memiliki banyak informasi dan pengalaman tentang masalah penelitian dan secara sukarela menjadi sumber informasi meskipun tidak secara formal, mereka dapat

memberikan pandangannya dari dalam tentang nilai-nilai, sikap, bangunan, proses dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian setempat.

Dalam penelitian ini, kelompok informan kunci yaitu: 1) Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 2) Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) DKI Jakarta; 3) *Wildlife Manager* LSM *Wildlife Conservation Society* (WCS); 4) pihak dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia; serta 5) pelaku usaha perdagangan satwa liar di DKI Jakarta. Informan-informan kunci yang telah disebutkan sebelumnya diyakini oleh peneliti memiliki banyak informasi dan pengalaman terkait perdagangan satwa liar di DKI Jakarta.

F. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Creswell (2010) menyatakan enam langkah analisis data seperti wawancara mendalam yang dilakukan kepada informan) sebagai berikut:

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis, yaitu berisi kegiatan pembuatan transkripsi, wawancara, mengetik data lapangan, men-scanning materi, dan melakukan pemilihan data berdasarkan jenis data dan sumber data.
2. Membaca keseluruhan data, yaitu bertujuan untuk memperoleh kesan umum atas semua data yang ada dan pengrefleksian maknanya secara keseluruhan.
3. Menganalisis lebih detail dengan meng-coding data, pengodean dipandang sebagai proses mengolah materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya.
4. Menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis. Tujuan dari proses

coding ini adalah membuat sejumlah kecil tema atau kategori yang nantinya akan menjadi hasil utama dalam penelitian kualitatif.

5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif. Pada pendekatan ini digunakan pendekatan naratif dalam menyampaikan hasil analisis.
6. Menginterpretasikan atau memaknai data, dapat berupa interpretasi dari peneliti atau dapat berupa makna yang berasal dari perbandingan antara hasil penelitian dengan informasi yang berasal dari literatur, teori, atau dapat berupa pertanyaan-pertanyaan baru yang perlu dijawab selanjutnya.



BAB IV

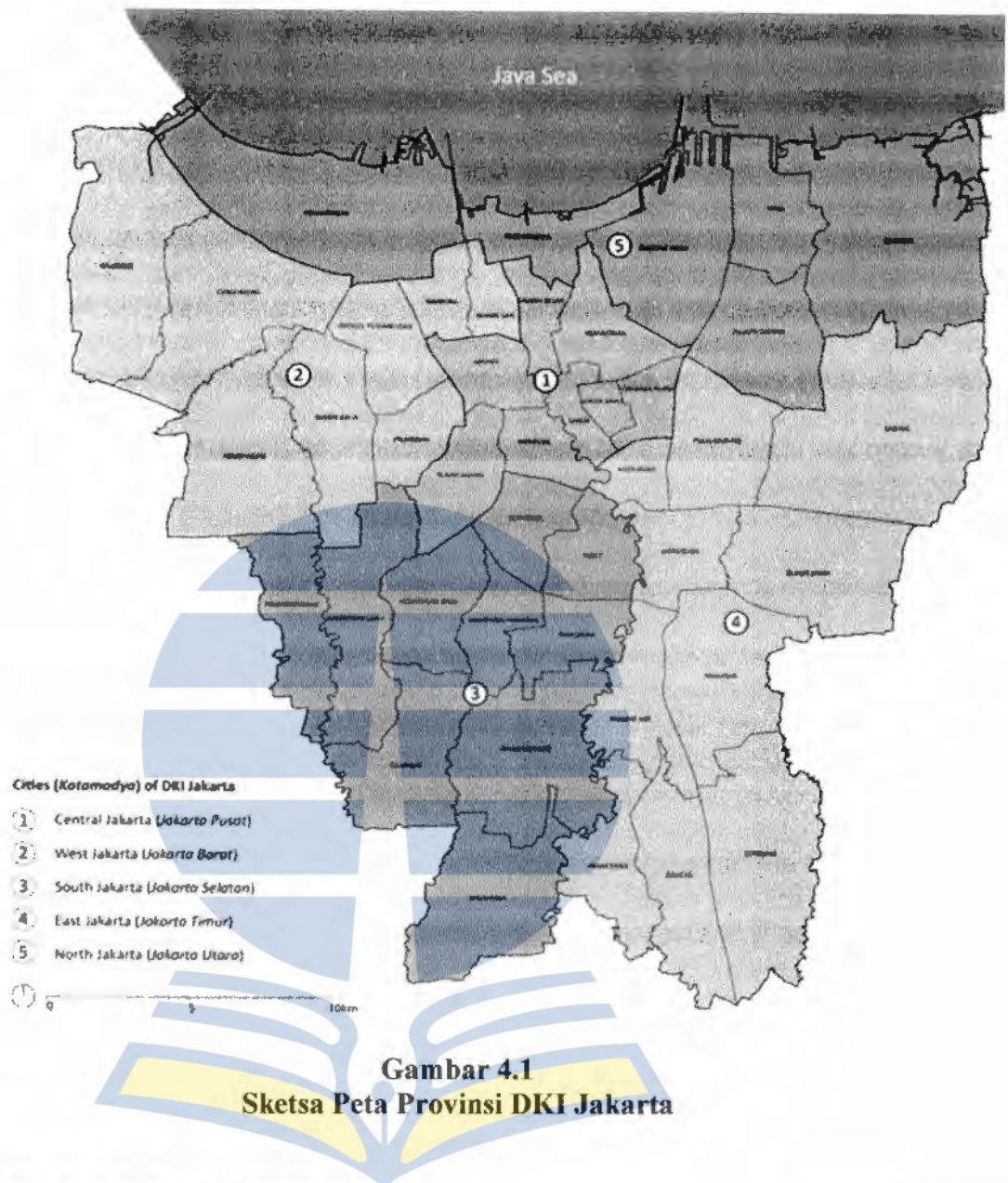
TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Provinsi DKI Jakarta

1. Keadaan Geografis dan Kependudukan

Jakarta adalah salah satu kota di Indonesia yang terletak antara 6°, 12' Lintang Selatan dan 106°, 48' Bujur Timur serta 7 meter di atas permukaan laut. Secara geografis, DKI Jakarta memiliki luas wilayah 662,23 km² dimana secara administrasi batas wilayah DKI Jakarta terletak di sebelah Utara Laut Jawa; Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten/Kota Bekasi; Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten/Kota Bogor dan Depok; serta di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten/Kota Tangerang (BPS, 2015).

Menurut BPS (2015), ada sebanyak lima kota dan satu kabupaten yang terdapat di Provinsi DKI Jakarta, yaitu Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara, dan Kabupaten Kepulauan Seribu. BPS (2015) mencatat bahwa daerah yang terluas di DKI Jakarta adalah Kota Jakarta Timur, sedangkan daerah yang tersempit secara administrasi yaitu Kabupaten Kepulauan Seribu. Jakarta Selatan sendiri memiliki luas 141,27 km²; Jakarta Timur dengan luas 188,03 km²; Jakarta Pusat sebesar 48,13 km²; Jakarta Barat sebesar 129,54; serta Jakarta Utara yang memiliki luas daerah administrasi sebesar 146,66 km², sedangkan untuk Kabupaten Kepulauan Seribu sendiri memiliki luas sebesar 8,70 km².



2. Penduduk Provinsi DKI Jakarta

Provinsi DKI Jakarta sendiri merupakan ibukota negara Republik Indonesia yang memiliki keistimewaan karena pada tingkat provinsi seluruh kebijakan mengenai pemerintahan maupun anggaran ditentukan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2017), jumlah penduduk di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2015 yaitu sebanyak 10.177.924 jiwa, dimana jumlah penduduk laki-laki ada sebanyak 5.115.357 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 5.062.567

jiwa. Rasio penduduk tersebut menunjukkan bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dari pada penduduk perempuan. Dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan Pemerintah DKI Jakarta didukung oleh Instansi Pemerintah dengan jumlah PNS sebanyak 16.961 orang pegawai, yang dimana terdapat sebanyak 12.363 pegawai laki-laki, serta 4.598 pegawai perempuan (BPS, 2015).

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²
1	2	3
1 Kepulauan Seribu	0,23	2 683,96
2 Jakarta Selatan	21,48	15 472,17
3 Jakarta Timur	27,94	15 124,15
4 Jakarta Pusat	8,98	18 993,11
5 Jakarta Barat	24,20	19 017,92
6 Jakarta Utara	17,17	11 913,83
DKI Jakarta	100,00	15 366,87

Tabel 4.1.
Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Administrasi 2009-2013
Sumber: BPS DKI Jakarta

Menurut BPS menjelaskan bahwa setiap tahun penduduk DKI Jakarta mengalami kepadatan penduduk. Umumnya penduduk di DKI Jakarta memadati wilayah Jakarta Barat yaitu seluas 19.017,92 km², Jakarta Pusat 18.993,11 km², dan Jakarta Selatan sebesar 15.472,17 km².

Data tahun 2017 dari BPS juga menunjukkan jumlah penduduk yang ada di DKI Jakarta ini setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Seperti pada tahun secara berturut-turut seperti tahun 2010 yaitu ada sekitar 9.640.406 jiwa, tahun 2014 yaitu 10.075.310 jiwa, dan tahun 2015 yaitu sebanyak 10.177.924 jiwa.

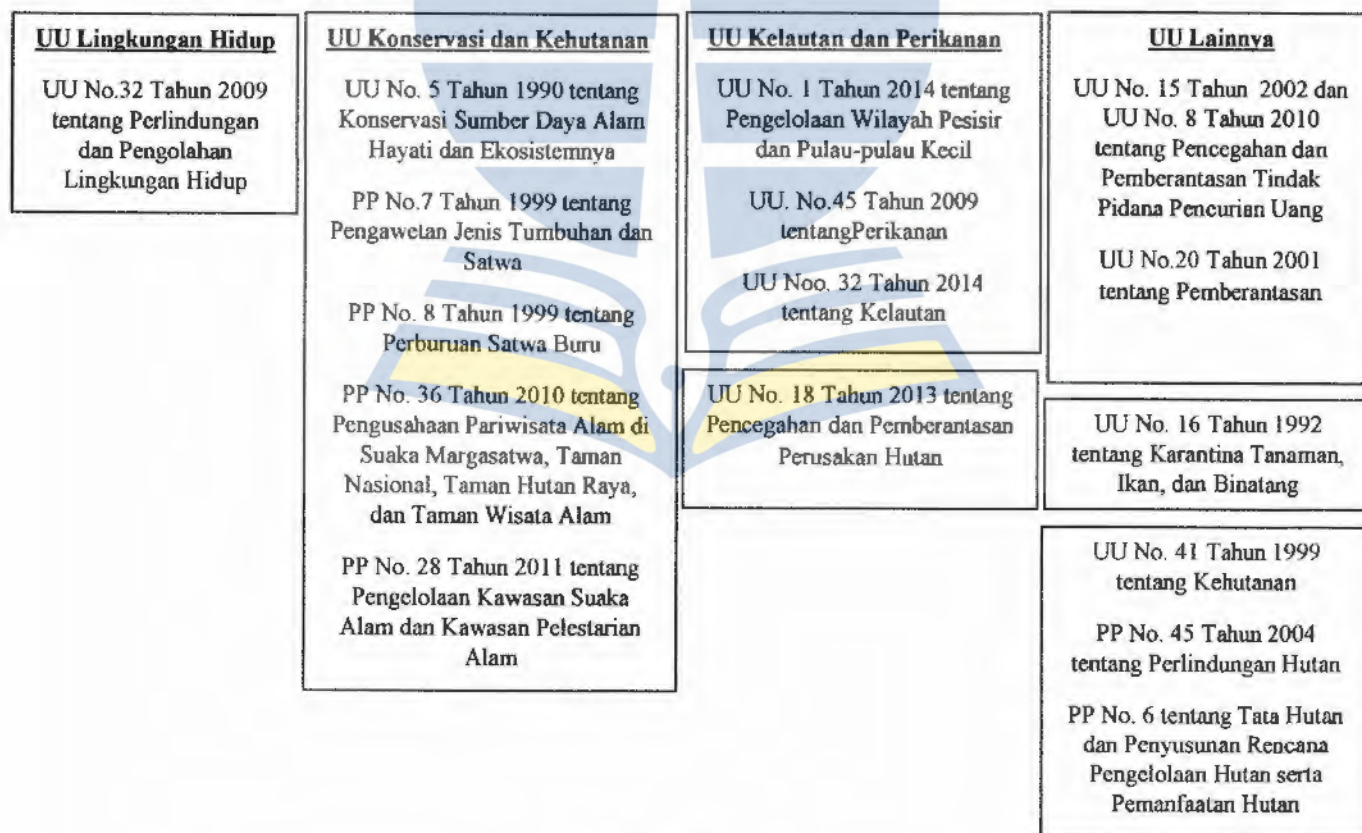
Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (ribu)			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	
	2010	2014	2015	2010-2015	2014-2015
1	2	3	4	5	6
1 Kepulauan Seribu	21 414	23 011	23 340	1,74	1,43
2 Jakarta Selatan	2 071 628	2 164 070	2 185 711	1,08	1,00
3 Jakarta Timur	2 705 818	2 817 994	2 843 816	1,00	0,92
4 Jakarta Pusat	895 371	910 381	914 182	0,42	0,42
5 Jakarta Barat	2 292 997	2 430 410	2 463 560	1,45	1,36
6 Jakarta Utara	1 653 178	1 729 444	1 747 315	1,11	1,03
DKI Jakarta	9 640 406	10 075 310	10 177 924	1,09	1,02

Tabel 4.2.
Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun Menurut Kabupaten/Kota Administrasi
2009-2013
Sumber: BPS DKI Jakarta

3. Kebijakan Perdagangan Satwa Liar

Di Indonesia sendiri menurut USAID (Maret, 2015) ada lahan yang dikelompokkan ke dalam dua kegunaan, yaitu Area Hutan dan Area Penggunaan Lain (APL). Area Hutan termasuk dalam yurisdiksi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Undang-undang konservasi dan kehutanan tersebut, memberikan dasar bagi pemerintah untuk menjalankan regulasi dan menerbitkan izin untuk pengelolaan area hutan dan perubahan fungsi hutan. Lahan yang lain seperti pertanian, perumahan, dan aktivitas bisnis lainnya diatur oleh Badan Pertanahan Nasional dengan Undang-undang Agraria/Tanah yang memberikan dasar untuk menerbitkan hak tanah dan perubahan hak tanah (USAID, Maret 2015).

Landasan payung hukum bagi tata kelola sumber daya alam pada awal negara berdiri yakni Pasal 33 Undang-Undang Dasar, ayat 3 dan 4 (Amandemen keempat di Undang-Undang 2002), yang mana satwa liar juga termasuk di dalamnya (*Wildlife Conservation Society-Indonesian Program* dan USAID dalam Perkumpulan SKALA, 2016). Dua ayat pada pasal tersebut mengatakan, “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” (Ayat 3). Serta, “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan dan kemajuan ekonomi nasional,” (Ayat 4).



Bagan 4.1.
Payung Kebijakan dan Hukum Terkait Perdagangan Ilegal Satwa Liar
Sumber: Perkumpulan SKALA (2016)

Gambar 4.4 merupakan rangkuman UU sektoral utama dan peraturan turunan yang memiliki keterkaitan dengan perihal kejahatan terhadap satwa liar di Indonesia, termasuk perdagangan ilegal satwa liar.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjelaskan tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, diterbitkan untuk menggantikan UU Nomor 23 Tahun 1997, mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup (USAID, Maret 2015). Undang-undang yang dianggap sebagai payung hukum bagi sebagian besar peraturan yang berhubungan dengan sumber daya alam/lingkungan hidup di Indonesia ini dibuat untuk mengantisipasi dan memperhitungkan masalah lingkungan hidup global; mendukung pengembangan berkesinambungan dan pemakaian sumber daya alam berkesinambungan; melindungi lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; serta memastikan perlindungan sumber daya hayati dan ekosistemnya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini menurut USAID (Maret 2015) bertujuan mengatur perencanaan, penggunaan, kontrol, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakkan hukum melalui mekanisme berbasis proses peradilan dan non-proses peradilan. UU ini berkontribusi untuk Penilaian Strategis Lingkungan Hidup dan pengelolaan lingkungan hidup dan rencana perlindungan di semua tingkat, dan pengenalan izin lingkungan hidup dan audit sebagai alat untuk mendukung Penilaian Dampak Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 ini mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dimana tujuan dari dibentuknya UU ini yaitu sebagai dasar untuk melaksanakan kebijakan terkait sumber daya alam

secara berkesinambungan untuk mendukung kesejahteraan dan kualitas hidup manusia. UU ini menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya alam secara berkesinambungan, pengaturan pelestarian dan konservasi flora dan fauna, ekosistem, dan wilayah lindung, serta menjelaskan bagaimana proses penyidikan, hukuman, dan sanksi bagi pelaku yang melakukan kejahatan terkait ini.

Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan payung hukum utama bagi Indonesia untuk kebijakan dan melaksanakan regulasi terkait lingkungan dan perdagangan satwa liar. Telah dijelaskan dalam Undang-undang No.5 Tahun 1990, bahwa “satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia”. Kemudian, Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang 5 Tahun 1990 menggolongkan jenis satwa yang selengkapnya pasal tersebut berbunyi “Tumbuhan dan satwa digolongkan dalam jenis: a) tumbuhan dan satwa yang dilindungi; b) tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi.

Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang 5 Tahun 1990 terkait dengan larangan perlakuan secara tidak wajar terhadap satwa yang dilindungi maksudnya yaitu “Setiap orang dilarang untuk:

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;

- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. Memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atay bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memorniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.”

Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 menjelaskan tentang peran serta rakyat dalam membantu pemerintah melakukan upaya konservasi. Ayat (1) berbunyi, “Peran serta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna”. Ayat (2) berbunyi, “Dalam mengembangkan peran serta rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah menumbuhkan dan meningkatkan sadar konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di kalangan rakyat melalui pendidikan dan penyuluhan.”

Sedangkan ancaman hukuman yang dijatuhkan bagi setiap orang yang melanggar dijelaskan dalam Pasal 40 Ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Namun, ada beberapa hal yang diperbolehkan dalam penangkapan satwa liar yang dilindungi, yaitu apabila penangkapan satwa liar tersebut bertujuan

untuk ilmu pengetahuan, penelitian, penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan, serta apabila satwa liar yang dilindungi tersebut mengancam atau membahayakan kehidupan manusia. Maksudnya mengancam atau membahayakan kehidupan manusia yaitu tidak hanya mengancam jiwa manusia, melainkan juga menimbulkan gangguan atau keresahan terhadap hidup manusia, atau kerugian materi seperti rusaknya lahan atau tanaman atau hasil pertanian.

Menurut USAID (2015), terdapat sejumlah peraturan pemerintah yang berasal dari UU Nomor 5 Tahun 1990, yaitu

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 terkait Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

PP No. 7/1999 ini memberikan definisi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan habitat mereka, dan memberikan aturan untuk upaya pelestarian, merujuk institusi konservasi, pengaturan pengiriman dan pengangkutan spesies yang dilindungi, dan kontrol, dan monitoring yang menyeluruh. Hal ini juga membutuhkan kontrol dan monitoring yang dilakukan oleh lembaga penegakan hukum yang berwenang dengan menggunakan aksi penegakan yang bersifat pencegahan dan pengendalian tindak kejahatan. Aksi pencegahan mencakup, tapi tidak terbatas pada, peningkatan kesadaran, pelatihan staf lembaga penegak hukum, dan menerbitkan pedoman identifikasi untuk spesies yang dilindungi. Aksi pengendalian atau supresi mencakup aksi penegakan hukum untuk membawa tersangka ke proses peradilan.

Satwa-satwa yang masuk dalam kategori dilindungi yaitu seperti yang dikatakan dalam Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, bahwa satwa yang dilindungi

adalah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Pemerintah ini, antara lain: orang tua, Harimau jawa, Harimau sumatera, Badak jawa, Penyu, dan sebagainya.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

PP No.8/1999 menjelaskan bahwa Peraturan Pemerintah No. 8/1999 memberikan aturan bagaimana melaksanakan undang-undang sehubungan dengan kegiatan komersil (penangkaran, perdagangan, peragaan komersial, dan budidaya tanaman obat) dan penggunaan untuk tujuan non-komersil (penelitian dan peragaan non-komersil). PP ini menyatakan sanksi kriminal, klasifikasi dan kuota. Selain mengandalkan hukuman dan sanksi yang disebutkan oleh UU No.5/1990, Peraturan Pemerintah No.8/1990 juga menyebutkan sanksi administratif. Dalam ayat 34 juga menyebutkan 11 spesies atau kelompok spesies yang hanya dapat digunakan dan dipertukarkan oleh Presiden Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru.

Menjelaskan bahwa: Peraturan Pemerintah No. 13/1994 mengatur perburuan satwa liar yang diburu dan tidak dilindungi. Peraturan ini memberikan definisi perburuan satwa liar, area perburuan, musim, peralatan, izin, dan hak dan kewajiban pemburu.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam

PP No.36/2010 ini menerangkan tentang aturan izin dan lisensi untuk pengusaha pariwisata, zona pariwisata, rencana untuk pariwisata alam, aktivitas

pariwisata yang diperbolehkan, dan tipe perusahaan pariwisata di bidang jasa dan infrastruktur.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

PP ini mengatur pelestarian dan penggunaan satwa liar dan ekosistem mereka secara optimal di area suaka alam dan pelestarian alam. Hal-hal yang masuk dalam peraturan ini diantaranya terkait pengelolaan kawasan dan kolaborasi, zona penyangga, pembiayaan, dan pengembangan komunitas atau partisipasi masyarakat untuk mendukung pelestarian.

Undang-Undang Kelautan dan Perikanan

Undang-Undang No. 1/2014: Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil

Adapun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 ini dirancang bertujuan untuk perlindungan, rehabilitasi, dan memperkaya sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan cara yang berkesinambungan, serta memberdayakan komunitas yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. USAID (2016) menyebut kemungkinan alasan wilayah pesisir dijadikan sebagai area pelestarian oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Maksud dari undang-undang ini yaitu menerangkan kriteria area konservasi di dalam zona, tipe pelanggaran pidana yang ada dan resolusi konflik, dan sanksi administratif termasuk hukuman minimal dan maksimal serta denda yang dapat diberikan berdasarkan undang-undang ini.

Undang-Undang No. 45/2009: Perikanan

Undang-undang terkait perikanan ini sebelumnya yaitu UU No.9/1985, dan direvisi menjadi UU No. 45/2009. UU ini dirancang untuk menetapkan hukuman dan denda, investigasi, peradilan, serta mengontrol perdagangan ikan, mengatur area konservasi perairan atau rawa, membantu KKP dalam mengatur kuota tangkapan dan menjadikan spesies ikan menjadi spesies yang dilindungi. Fokus undang-undang ini pada area laut dan air tawar termasuk sungai, danau dan rawa.

Undang-Undang No. 32/2014: Kelautan

Undang-undang ini dirancang untuk mengganti UU sebelumnya yaitu UU No.6/1996 mengenai Perairan Indonesia. Undang-undang ini mencakup pengelolaan tata ruang kelautan, pengembangan dan tata kelola dan perlindungan lingkungan laut. UU ini membutuhkan peraturan turunan mengenai perencanaan tata ruang kelautan, pengelompokan zona di pulau-pulau kecil, wilayah pesisir, dan laut (USAID, 2015).

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 50/M-Dag/Per/9/2013

Adapun Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 50/M-Dag/Per/9/2013 tentang Ketentuan Ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi Undang-Undang dan Termasuk dalam Daftar CITES, dimana dalam Peraturan Menteri ini (Pasal 1) yang dimaksud dengan:

1. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean Indonesia.

2. Tumbuhan Alam dan Satwa Liar yang tidak dilindungi Undang-Undang dan termasuk dalam daftar CITES
3. Tumbuhan Alam yang tidak dilindungi Undang-Undang dan termasuk dalam daftar CITES adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun di air yang tidak dilindungi Undang-Undang dan termasuk dalam daftar CITES.
4. Satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang dan termasuk dalam daftar CITES adalah semua jenis sumber daya alam hewan yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang tidak dilindungi Undang-Undang dan termasuk dalam daftar CITES.
5. Eksportir adalah perusahaan yang melakukan ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa Liar yang tidak dilindungi Undang-Undang dan termasuk dalam daftar CITES.
6. Surat Angkut Tumbuhan Alam dan Satwa Liar ke Luar Negeri yang selanjutnya disebut SATS-LN adalah surat angkut dari Kementerian Kehutanan untuk Tumbuhan Alam dan Satwa Liar yang tidak dilindungi Undang-Undang dan termasuk dalam daftar CITES.
7. Surat Persetujuan Ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa Liar yang selanjutnya disebut SPW-TASL, adalah surat persetujuan pelaksanaan ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa Liar yang tidak dilindungi Undang-Undang dan termasuk dalam daftar CITES.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.

10. Direktur adalah Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kementerian Perdagangan.

Pasal 2 dari Peraturan Menteri Perdagangan ini yaitu Jenis Tumbuhan Alam dan Satwa Liar yang dibatasi ekspornya meliputi Tumbuhan Alam dan Satwa Liar yang tidak dilindungi Undang-Undang dan termasuk dalam daftar CITES sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

B. HASIL PENELITIAN

1. Implementasi Kebijakan Perdagangan Satwa Liar

Berdasarkan tiga aspek atau kelompok variabel yang telah dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier (1983), maka penulis dalam penelitian ini hanya melihat beberapa indikator dari masing-masing kelompok variabel. Pada kelompok variabel dari karakteristik masalah, penulis melihat indikator yang sesuai dengan penelitian ini yaitu tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan serta sasaran dari kebijakan ini. Selanjutnya, indikator yang akan dilihat dari karakteristik kebijakan atau undang-undang (*ability of statute to structure implementation*), antara lain: kejelasan isi kebijakan; Besarnya alokasi sumber daya finansial dan fasilitas; Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana; kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana; tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan; serta seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi

dalam implementasi kebijakan. Lalu yang terakhir dari variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*), melihat bagaimana dukungan publik serta teknologi terhadap sebuah kebijakan. Setelah dikaji mengenai implementasi kebijakan secara umum, maka berikut ini akan dijelaskan mengenai komponen-komponen dari implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier (1983).

1.1. Karakteristik Masalah

1.1.1. Gambaran dan Tingkat Kesulitan Masalah Perdagangan Satwa Liar

Salah satu masalah besar yang ada di Indonesia yaitu kejahatan terhadap perdagangan satwa liar, dimana banyak sekali hewan-hewan yang telah diselundupkan untuk dijual ke dalam maupun luar negeri. Masalah perdagangan ilegal satwa liar ini masuk ke urutan kelima setelah narkoba (*drugs*), pemalsuan (*counterfeiting*), perdagangan orang (*human trafficking*), dan minyak (*oil*). Perdagangan satwa liar ini telah menjadi salah satu perdagangan gelap dengan perkembangan tercepat secara global. Mardiasuti (2011) menjelaskan bahwa Jakarta sebagai salah kota yang disebut titik kuning yaitu kota yang rawan terhadap perdagangan satwa ilegal.

NARKOBA (DRUGS)	AS\$ 320 MILIAR
PEMALSUAN (COUNTERFEITING)	AS\$ 250 MILIAR
PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING)	AS\$ 31,6 MILIAR
MINYAK (OIL)	AS\$ 10,8 MILIAR
SATWA LIAR (WILDLIFE)	AS\$ 7,8-10 MILIAR
KAYU (TIMBER)	AS\$ 7 MILIAR
PERIKANAN (FISH)	AS\$ 1,3-5 MILIAR

Tabel 4.3.

Urutan Kategori Kejahatan Trans-Nasional di Dunia
Sumber: Perkumpulan SKALA, 2016 (Hal 14)

Menurut Havocscope.com dalam Perkumpulan SKALA (2016), menyebutkan bahwa transaksi perdagangan satwa liar secara ilegal ini diprediksi sudah mencapai AS\$ 19 miliar. Sementara itu, kejahatan terhadap satwa liar menurut Uni Eropa menghasilkan AS\$ 2 hingga 20 miliar per tahun. Begitu besar permasalahan ini, mengundang banyak respon dan reaksi dari para tokoh konservasi dunia maupun lembaga-lembaga internasional untuk segera mengambil sikap dalam upaya mengatasi kejahatan ini.

Maraknya kejahatan yang terkait dengan satwa liar seperti penyelundupan dan perdagangan satwa liar secara ilegal nampaknya disebabkan oleh adanya permintaan yang besar dan keuntungan yang sangat menggiurkan. Catatan perdagangan satwa liar pun telah memiliki deret panjang kasus dan para mafia bekerja layaknya kejahatan yang terorganisir. Hingga saat ini belum diketahui sudah berapa banyak jumlah satwa liar yang telah berhasil diperdagangkan secara ilegal. Merujuk perhitungan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan (sekarang KLHK), Indonesia mengalami kerugian lebih dari Rp 9 triliun per tahun (Perkumpulan SKALA, 2016).

Dikutip pada laman berita TRAFFIC (www.traffic.org), jumlah burung yang dilindungi saja misalnya, dapat diperkirakan sudah dijual di pasar burung Pramuka, Jatinegara dan Barito sebanyak lebih dari 19.000 ekor burung dalam kurun waktu 3 tahun, hal ini ditulis dalam laporan *Maarket for Extinction: An inventory of Jakarta's bird markets* yang dikeluarkan pada 25 September 2015.



Gambar 4.2.
Puluhan Ribu Burung Dijual Secara Ilegal di Jakarta (2015)
Sumber Foto: Kanitha Krishnasamy/TRAFFIC

Matthew Burton, Direktur Kantor Lingkungan dari USAID, mengatakan bahwa perkembangan aktivitas perdagangan satwa liar saat ini sudah semakin meningkat, hal ini seiring dengan meningkatnya perdagangan baik di dalam maupun di internasional (Purnaningsih, 2018). “Forum perdagangan satwa liar di Indonesia 4 kali lipat lebih banyak dari tahun 2010, kurang lebih sudah ada transaksi yang jumlahnya mencapai 13 triliun atau setara dengan 1 miliar dolar per tahun. Hasil studi terbaru yakni ada sebanyak 150 ribu orangutan telah hilang dari tahun 1999 atau menurun setengah dari populasinya,” kata Matthew yang dikutip dari laman www.greeners.co (2018).

Adanya sanksi terhadap tindakan yang melanggar hukum seperti halnya melakukan aktivitas perdagangan ilegal satwa liar ini rupanya tidak memberikan

efek jera bagi para pelaku. Pasalnya, penegakkan hukum yang ada saat ini dapat dikatakan masih lemah sehingga masih banyak dan sering dijumpai pelaku yang memperdagangkan satwa liar tersebut di pasar-pasar maupun secara *online*. Ada banyak kasus yang dimana proses penegakkan hukumnya ternyata tidak berjalan sesuai dengan ketentuan.

Temuan-temuan di Pelabuhan Bakauheni misalnya, yang sering menjadi lokasi penyitaan satwa-satwa liar yang akan diekspor baik dalam kondisi hidup maupun satwa liar yang sudah mati. Begitupun halnya yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok, dimana saat diwawancarai oleh penulis, pihak dari Unit Analyzing Point, Bea Cukai menyatakan bahwa mereka pernah mendapati beberapa kasus penyelundupan satwa liar yang masih hidup maupun yang sudah mati yang akan diekspor ke luar negeri melalui via Pelabuhan Tanjung Priok. Satwa-satwa tersebut yakni diantaranya trenggiling yang ditemukan dengan kondisi sudah membeku, tanduk rusa, sampai kerang kepala kambing. Seringkali, tingginya jumlah lalu lintas perdagangan ilegal satwa liar yang disita, tidak lanjut ke meja hijau dan para pelaku bisa bebas begitu saja. Menurut petugas dari Bea Cukai, “hewan-hewan yang akan diekspor melalui Tanjung Priok itu dalam keadaan mati, dan biasanya akan diangkut via *cargo*, karena akan cepat sampainya. Masalah ini merupakan masalah yang susah susah gampang, masalahnya terkadang terjadi *miss communication* antara kebijakan dari KLHK dengan kebijakan dari Perdagangan”.

Data PROFAUNA (dalam Perkumpulan SKALA, 2016) menyebutkan ada 15 kasus dan 200 pengaduan yang berasal dari masyarakat terkait dengan

perburuan satwa liar. Namun sayangnya, hanya sebanyak empat kasus saja yang telah diproses hukum dengan belum adanya vonis hukuman yang diterima oleh para pelaku. PROFAUNA juga mencatat bahwa terdapat sedikitnya 6 vonis yang diberikan kepada para pelaku dengan hanya menerima hukuman penjara selama 6 bulan hingga 2 tahun, demikian pula dengan denda yang harus dibayar hanya sebanyak Rp. 500 ribu sampai Rp. 50 juta saja. Seperti misalnya kasus yang ada di Langsa, Aceh pada November 2015, dimana pelaku terbukti melakukan perdagangan tiga orangutan, dua elang bondol, satu burung kuau raja, dan satu awetan macan dahan. Pelaku tersebut mendapatkan sanksi berupa vonis penjara selama 3 tahun serta denda sebesar Rp. 500 juta rupiah.

Tindakan perdagangan satwa liar ini memiliki resiko yang rendah sedangkan keuntungan yang didapat sangat besar bagi pelaku. Pelaku bisa mendapatkan keuntungan hingga ratusan juta rupiah namun sanksi pidana hanya maksimal kurungan penjara selama 5 tahun. Seperti yang dikatakan oleh Kasubdit Pencegahan dan Pengamanan Hutan (TSL), Direktorat Penegakkan Hukum, KLHK terkait dengan masalah perdagangan satwa liar secara ilegal ini.

“Masalah ini ya susah susah gampang ya, karena kan namanya orang melanggar dengan kondisi yang misalnya keterbatasan devisa ya, dan untungnya besar kan, profitnya tinggi, juga resikonya rendah. Kenapa rendah? Karena ancaman hukuman hanya 5 tahun kurungan penjara, sehingga perkara ini orang jadi berani, dan terkadang orang hanya menganggap ‘satwa saja’, padahal kan sebenarnya misalnya kalau menangkap satu badak saja di Jawa, akan hilang biodiversity kita, dan kalau hilang nanti bisa menjadi bencana untuk kita, karena itu tidak bisa kembali”, menurutnya.

Kasubdit Pencegahan dan Pengamanan Hutan (TSL), Direktorat Penegakkan Hukum, KLHK menyampaikan bahwa masalah terkait perdagangan

satwa liar ini merupakan masalah yang cukup sulit karena pelaku yang melakukan aktivitas perdagangan satwa liar secara ilegal ini sudah mengetahui keuntungan atau profit yang tinggi, namun resiko yang didapatkan dapat dikatakan rendah. Ia juga menambahkan bahwa apa yang diburu dan diperjualbelikan secara ilegal tersebut adalah hanya seekor hewan saja, namun apabila dilihat dilebih dalam lagi, hewan yang diburu dan dijualbelikan tersebut akan hilang dari biodiversity, dimana akan berdampak pada timbulnya bencana atau rusaknya ekosistem yang ada di alam.

Menurut salah satu pelaku usaha perdagangan satwa liar yang diwawancarai oleh penulis, bahwa saat ini ada banyak pelaku yang melakukan aktivitas perdagangan satwa liar secara *online*. Ia menyatakan bahwa ada banyak teman darinya yang melakukan penjualan dan pembelian satwa liar di media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, *Twitter*, dan lain-lain dengan menggunakan akun palsu atau akun 'kloningan' (banyak akun).

"Pasar *online* sekarang lebih besar, karena dulu orang hanya jualan di kaskus. Sekarang ada *Instagram*, *Twitter*, *Facebook*, dan lain-lain. *Kaskus* sangat dijaga ketat oleh admin. Ketika ada satwa yang masuk dalam PP No. 7/Tahun 1999, dan dikick, tapi *Facebook*, walaupun peraturan itu ada, admin tidak memantau terus. Nah, jadi kadang-kadang perdagangan lewat *Facebook* cenderung 'blak-blakan'. Meskipun yang ia pakai adalah *Facebook* 'kloningan', ia akan punya banyak FB, itu makin marak," imbuhnya.

Perdagangan di *Facebook* misalnya, menjadi salah satu cara yang mudah untuk mempromosikan bahkan menjual puluhan sampai ratusan satwa liar yang ada di berbagai daerah di Indonesia. *Facebook* menjadi sarana favorit dari para pedagang satwa liar ini untuk memperdagangkan dan mempromosikan satwa-sawtwa tersebut. Selain karena akomodatif, media sosial ini dapat digunakan oleh

berbagai kalangan hingga masyarakat di daerah. Jika diblokir pun pedagang masih dapat membuat akun baru. Pelaku usaha menambahkan bahwa memang perdagangan via *Facebook* ini marak terjadi, namun terkadang setiap tahun harus ada 'tumbal' yang didapat khususnya bagi para mafia tersebut, "misalnya ada transaksi kakaktua masuk dari Papua ke Jakarta, nah ini akan ada 100 ekor yang tertangkap lalu diangkat ke media, biar rame, padahal ternyata 500 ekor lolos" jelasnya saat diwawancara.

Pihak dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat dijumpai, November 2017, menyatakan bahwa setiap hari ada sedikitnya sekitar 6 akun di *Facebook* yang dinilai telah melakukan aktivitas perdagangan satwa liar. Dikatakan bahwa ada sekitar 20-30 akun di *facebook* dalam kurun waktu seminggu atau 6 akun perhari yang kedapatan melakukan aktivitas perdagangan satwa liar secara ilegal.

"Kalau kita pantau di *Facebook* saja rata-rata ada teman yang khusus mantau, dalam seminggu dapatlah sekitar 20-30 akun yang kedapatan memperjual belikan satwa liar. Sehari bahkan bisa temukan 6 akun yang baru yang melakukan aktivitas perdagangan ilegal satwa liar. Itu baru di *Facebook* saja ya", tambahnya.

Banyaknya oknum yang melakukan pelanggaran ini dilakukan tidak hanya oleh satu atau dua orang saja. Salah satu pelaku usaha perdagangan satwa yang diwawancarai mengatakan bahwa terdapat beberapa kelompok pelaku yang berperan dalam perdagangan satwa ini yaitu pemburu, pengepul, dan pedagang yang menjual satwa tersebut di pasar konvensional maupun *online*. Sama seperti pendapat diatas, Waryono (2001) mengemukakan pendapat yang sama bahwa memang terdapat tiga kelompok pelanggaran yakni kelompok pemanfaatan di

daerah hulu atau pemburu, kelompok perantara atau pengepul, serta kelompok pemanfaatan hilir atau pedagang.

Aktivitas perdagangan satwa liar ini merupakan tindakan yang dianggap sebagai kejahatan minor. Penyitaan barang bukti masih tidak mendukung upaya preventif dan represif terhadap upaya pemberantasan kejahatan perdagangan satwa liar secara ilegal (Perkumpulan SKALA, 2016). Ditambah lagi apabila dilihat dari segi komitmen dari para petugas. Seperti yang diungkapkan oleh pihak dari LSM WCS.

“Komitmen itu kan berdasarkan prioritas, apa yang jadi isu perdagangan tumbuhan dan satwa liar (TSL), nampaknya masih menjadi prioritas kedua dari KLHK setelah kehakaran hutan, jadi kemudian komitmennya ga seperti komitmen kebakaran hutan atau hasil hutan, mereka cenderung cepat”

Berdasarkan kutipan tersebut, dapat kita lihat bahwa upaya pemberantasan kejahatan perdagangan satwa liar belum menjadi sorotan utama bagi pemerintah. Hal ini berkaitan dengan prioritas yang diambil oleh pihak LSM WCS, dimana pihak LSM lebih mengutamakan pada kasus kebakaran hutan dibandingkan dengan kasus perdagangan satwa liar yang juga marak terjadi di Indonesia.

Selain itu, rute perdagangan satwa liar di Indonesia pun dapat dikatakan lebih mudah dibandingkan dengan kejahatan lain untuk diselundupkan melewati batas-batas provinsi, pulau-pulau di Indonesia, bahkan hingga ke luar negeri. Penyelundupan yang dilakukan yaitu dengan menggunakan angkutan-angkutan yang tidak khusus hanya mengangkut satwa liar saja, seperti misalnya mobil ambulance, mobil truk pengangkut sayur, pengangkut ayam atau pengangkut burung berkicau yang ternyata juga mengangkut satwa-satwa yang dilindungi.

Pelaku usaha yang diwawancarai penulis (Januari, 2018) menyampaikan bagaimana proses pengangkutan satwa-satwa liar yang sudah diburu, hingga bisa sampai masuk di pasar-pasar konvensional seperti di Barito, Pasar Pramuka, dan Jatinegara, atau bahkan pasar *online*.

Pelaku usaha itu menyebutkan bahwa satwa-satwa yang dilindungi tersebut dibawa oleh truk dari luar pulau, disembunyikan di dalam atau di tempat-tempat yang tidak bisa dilihat dari luar, sedangkan misalnya burung-burung kicau ada di bagian tepi atau sisi yang dari luar dapat terlihat dengan mudah oleh petugas.

“Burung-burung kicau di luar, burung dilindungi ada di dalam, orang utan juga di dalam. Satwa turun di pasar-pasar jam 2 pagi, pakai truk, ‘di otak-atik’. Burung-burung kicau masuk biasa, nah, burung-burung elang bahkan kasuari ada di Jatinegara. Saat masuk pasar, ‘menyebar’ ke taman. Yang sudah pesan duluan (pesanan), langsung dantar meluncur ke rumah-rumah ‘loreng’. Transaksi yang pernah saya lihat juga ada anak aparat yang membeli orang-utan, anaknya pejabat AU di Halim, dia melakukan transaksi orang utan dan penyu sisik”, jelasnya.

Satwa-satwa liar yang ingin diperdagangkan, sebelumnya ditampung sementara di seluruh pelabuhan di Indonesia yang lokasinya cukup strategis untuk perdagangan satwa liar seperti di kota Medan, Palembang, Lampung, Jakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Bali, dan Banjarmasin. Biasanya, satwa-satwa tersebut setelah diburu, ditampung ke beberapa kota tertentu, lalu disalurkan ke beberapa pasar burung atau pedagang-pedagang yang menjualnya secara *online*. Seperti yang disampaikan salah satu pelaku usaha yang dijumpai penulis (Januari, 2018), ia menyampaikan bahwa ada banyak masyarakat di Indonesia yang tergabung dalam suatu komunitas pecinta satwa (*hobbyist*) yang mencari satwa-satwa liar tersebut hanya untuk dipelihara. Sedangkan pihak dari Penegakkan Hukum

KLHK (November, 2017) sendiri menyebutkan bahwa banyak pedagang yang menjual satwa dilindungi dari Indonesia ke luar negeri selain sebagai hewan peliharaan, juga untuk obat, ornamen-ornamen, atau dikonsumsi bagian tubuhnya (untuk makanan).

Pihak dari LSM WCS mengemukakan bahwa diketahui ada sekitar 78 persen pemesan satwa liar yang dilindungi dan terancam punah yaitu dilakukan secara online oleh para komunitas hobi. Jenis yang diperdagangkan pun sangat beragam, seperti gading gajah, kepala rusa, tanduk rusa, kulit harimau yang digunakan untuk koleksi atau hiasan. Biasanya juga mereka, para kolektor yang memesan adalah berasal dari orang-orang yang cerdas yang cukup berpendidikan. Mereka bahkan memiliki grup atau perkumpulan di dunia maya (*chatting*) untuk dapat berkomunikasi satu sama lain. Jumlahnya memang sebenarnya kecil-kecil, namun mereka menyebar. Mereka adalah orang-orang pada umumnya 'melek' dengan dunia internet dan media sosial, namun masih memiliki pengetahuan yang minim terkait informasi satwa yang dilindungi tersebut. Mayoritas dari anggota kelompok kolektor satwa liar ini yaitu dari kalangan anak muda antara lain pelajar dan mahasiswa.

Selain dari hasil wawancara yang dilakukan penulis, hasil wawancara dan investigasi yang dilakukan tim www.tempo.com juga menunjukkan hal yang mencengangkan, yakni bahwa pihak dari KLHK seperti tim penyidik serta kepolisian mengaku sering menemui jalan buntu saat menelusuri hasil sitaan satwa dilindungi. Dalam tulisan tersebut, dijelaskan oleh Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati bahwa banyak satwa yang disita yaitu berasal dari pasar

gelap atau dari barter ilegal para pemilik izin. Pemilik seolah menghindar saat ditanya oleh petugas terkait dengan asal-usul satwanya tersebut. Beberapa pejabat tinggi di Indonesia yang memiliki dan memelihara satwa liar yang dilindungi mengaku mereka telah mengantongi surat izin seperti izin untuk melakukan penangkaran, namun sayangnya saat ditelusuri oleh tim www.tempo.com ternyata beberapa pejabat tinggi tersebut tidak memiliki surat izin penangkaran. Seorang penyidik menceritakan bahwa satwa-satwa dilindungi milik pejabat ada yang diambil dari berbagai pusat penyelamatan satwa (PPS) milik pemerintah dan swasta. Satwa-satwa tersebut dipindahkan ke para pejabat tersebut secara ilegal karena alasan kesulitan tempat dan besarnya biaya perawatan.

HARGA SATWA PASARAN YANG DILINDUNGI	
Cenderawasih	Rp 10-40 juta
Merak Hijau	Rp 200 ribu-2,5 juta
Elang bondol/laut	Rp 1-1,5 juta
Kakak tua jambul kuning	Rp 1,5 juta
Kakak tua Raja	Rp 5-15 juta
Rangkong	Rp 5 juta
Kasuari	Rp 40-50 juta

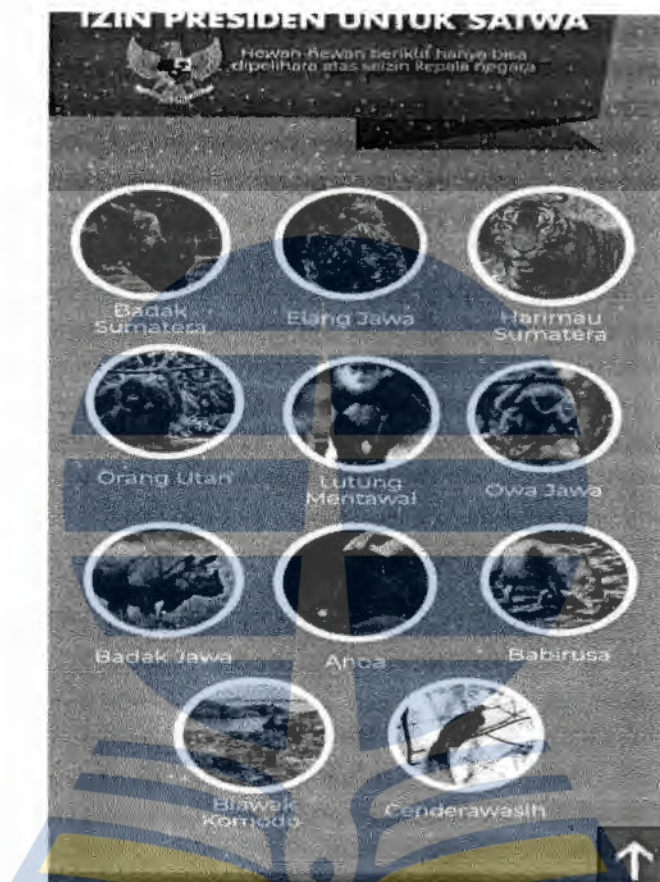
Harga perkiraan di pasar gelap, tergantung kondisi hewan

Tabel 4.4.

Harga Pasaran Satwa yang Dilindungi
Sumber: Tempo (2018)

Mendapatkan izin untuk melakukan penangkaran ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Ada banyak prosedur yang rumit yang harus dilalui. Penangkar harus memiliki tenaga ahli dan memiliki berbagai fasilitas penangkaran yang tidak sedikit dan mahal, seperti kandang yang harus sesuai dengan habitat asli satwa tersebut, fasilitas kesehatan satwa, perlindungan dari predator dan spesies lain, serta kontrol makanan yang baik. Sulit dan rumitnya prosedur tersebut menyebabkan orang memilih untuk menempuh jalan yang

instan, seperti misalnya menyewa jasa dan meminta bantuan 'orang dalam' dengan bayaran berkisar Rp. 7-10 juta per izin (www.tempo.com). Orang tersebut menjamin bahwa dokumen tersebut asli dengan terdapat kop surat dan stempel di dokumen, serta tanda tangan palsu dari pejabat.



Gambar 4.3
Izin Presiden Untuk Satwa
Sumber: Tempo (2018)

Pihak BKSDA saat diwawancarai oleh penulis (Januari, 2018) juga berpendapat sama dengan apa yang dijelaskan oleh Tim Investigasi Tempo, pada majalah Tempo. Pihak BKSDA merasa memang proses atau syarat untuk dapat melakukan penangkaran memang tidak mudah dan butuh biaya yang tidak sedikit, untuk itu banyak orang yang ingin memelihara satwa liar yang dilindungi, tidak memiliki surat atau dokumen izin yang legal. Ia juga menambahkan bahwa beberapa kali pernah mendapatkan laporan dari warga yang mengetahui adanya

rumah yang memelihara satwa liar, dan pemelihara itu tidak sedikit yang merupakan orang penting di Jakarta, bahkan pejabat tinggi di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, dikutip dari tulisan yang ada di Tempo terdapat beberapa jenis satwa yang benar-benar ketat dan sulit untuk dapat dipelihara, izinnnya hanya bisa dikeluarkan oleh presiden karena alasan kelangkaannya. Beberapa jenis satwa liar yang dilindungi tersebut yaitu antara lain harimau Sumatera, orang utan, dan cenderawasih. Beberapa aturan memelihara satwa yang dilindungi yaitu:

- a) Satwa boleh dipelihara dengan tujuan penangkaran atau konservasi, dilarang untuk kesenangan
- b) Mengajukan izin ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Direktur Jenderal Konservasi, atau Presiden
- c) Memiliki tempat penangkaran yang luas, aman, dan nyaman
- d) Memiliki dan mempekerjakan tenaga ahli dalam bidang medis dan pemeliharaan
- e) Wajib menjaga kemurnian jenis
- f) Wajib menandai hewan, untuk unggas misalnya dengan cincin

1.1.2. Sasaran Kebijakan

Sasaran yang diinginkan menurut pihak dari KLHK saat diwawancara oleh penulis, yaitu selain untuk meningkatkan devisa negara, namun juga tetap menjaga populasi yang ada di alam. “Mengurangi dan menjaga satwa agar tidak punah, dan dalam pandangan hukum, pelanggaran berkurang, jumlah mereka

(populasi satwa) di alam paling tidak tetap terjaga dan bertahan”, jelasnya kepada penulis. Tidak beda dengan pendapat yang dikemukakan oleh pihak dari KLHK, pihak dari Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) juga berpendapat. “Sasarannya agar Jakarta bersih dari perdagangan ilegal satwa liar, dari hulunya juga seperti di daerah-daerah di Indonesia harus dapat dicegah atau dihentikan, lalu para aparat kepolisian dan TNI juga tidak ikut membawa”, ungkapnya.

Berbeda dengan pihak KLHK selaku pembentuk kebijakan dan BKSDA sebagai pelaksana kebijakan, Pihak Bea Cukai dan Manajer dari *Wildlife Conservation* WCS mengungkapkan keinginannya terhadap sikap dari para pembentuk kebijakan agar memiliki sasaran yang tepat dalam jangka pendek maupun jangka panjang, “dapat segera merevisi UU No. 5 Tahun 1990 yang usianya sudah lebih dari 25 tahun ini,” jelasnya saat diwawancara penulis, November 2017.

1.2. Karakteristik Kebijakan

1.2.1. Kejelasan kebijakan

Saat ini, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 dianggap sudah tidak memadai lagi untuk pelaksanaan spesies. Hal ini dikarenakan dari usia UU tersebut yang kini sudah lebih dari 25 tahun. Salah satu kritik dan harapan agar UU tersebut harus segera direvisi yaitu datang dari *Wildlife Conservation Manager* WCS. Berdasarkan keterangannya saat diwawancarai oleh penulis, Januari 2018, UU tersebut sudah harus segera direvisi karena kondisi satwa yang sudah tidak *update* atau daftar spesies sudah lama, serta kondisi populasi satwa yang sudah tidak layak untuk diperdagangkan.

Hal yang sama juga diutarakan oleh salah satu anggota Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID), Dwi Adhiasto, pada seminar dengan tema “Perdagangan Ilegal Satwa Dilindungi Ada di Sekitar Kita”, dikutip dari laman berita harian www.greeners.co (2018). Dalam seminar tersebut, Dwi Adhiasto menyampaikan bahwa saat ini UU No. 5 Tahun 1990 harus segera direvisi. Ditambah lagi turunan seperti PP RI Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru karena satwa yang dilindungi sudah tidak sama, ada jenis satwa yang semakin lama semakin bertambah jumlahnya untuk segera dilindungi, dan ada pula yang saat ini sudah aman (tidak dilindungi lagi).

Serupa dengan pendapat dari *Wildlife Conservation Manager*, WCS, Samedi dalam buku *Perkumpulan SKALA* (2016) juga berpendapat bahwa memang UU No. 5 Tahun 1990 ini menjadi dasar hukum yang kuat terhadap konservasi hidupan liar, namun sayangnya selain usia UU tersebut yang sudah tidak memadai lagi untuk perlindungan spesies, kelemahan lain yaitu status hukum spesies hanya dikategorikan menjadi dua, yaitu dilindungi atau tidak dilindungi. Samedi mengungkapkan bahwa UU itu sudah cukup membuat efek jera bagi pelaku yang melakukan kejahatan terhadap satwa yang dilindungi, yaitu 5 tahun kurungan penjara dan denda Rp 100 juta, namun belum ada ketentuan hukuman yang jelas bagi pelaku yang melakukan kejahatan satwa yang tidak dilindungi. Sehingga ada banyak satwa liar yang awalnya tidak dilindungi, saat ini menjadi langka dan bahkan masuk ke dalam kategori kritis. Banyak spesies yang sudah harus mendapat perlindungan akibat belum ada ketentuan dari UU tersebut.

Masalah lain yaitu adanya tumpang tindih antara kewenangan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Kementerian lain kewenangan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). USAID (2015) menjelaskan bahwa kewenangan tersebut tumpang tindih dalam hal kepulauan dan daerah pesisir sehubungan dengan pemberian hak tanah dan izin jika lahan berada dalam Area Hutan, serta sehubungan dengan pengelolaan area konservasi yang mencakup tanah/ pulau dan laut. Menurut Sulaiman dalam Perkumpulan SKALA (2016) juga berpendapat sama, bahwa lahan yang terdiri dari Area Hutan dan Area Penggunaan Lain menjadi kewenangan KLHK, termasuk dalam memberikan izin pengelolaan area hutan dan perubahan fungsi hutan. Sedangkan daerah pesisir, pulau-pulau kecil, dan laut menjadi kewenangan KKP.

Tumpang tindih juga terjadi pada dua hal, yaitu kawasan kepulauan dan daerah pesisir terkait dengan hak tanah dan izin jika berada di dalam area konservasi serta pengelolaan area konservasi yang mencakup tanah atau pulau dan laut, seperti Taman Nasional (Perkumpulan SKALA, 2016). Salah satu dampak dari adanya kebijakan yang tumpang tindih tersebut menyebabkan dampak pada kewenangan urusan perlindungan jenis satwa liar tertentu dan wilayah hidupnya. Saat ini terdapat proses yang sedang berjalan untuk menentukan bagaimana cara untuk mengalihkan kewenangan pengelolaan kawasan lindung yang mencakup wilayah laut yang besar seperti taman laut nasional, dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (USAID, Maret 2015).

Terkait dengan hal tersebut, beberapa informan yang telah diwawancarai oleh penulis pun ikut menanggapi. Seperti yang diutarakan oleh pihak dari Gakkum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyebutkan memang saat ini pemerintah sedang sama-sama mencoba mencari bagaimana agar Kementerian Kelautan dan Perikanan juga bisa menjadi otoritas. Seperti yang dijelaskan bahwa saat ini kebijakan yang mengatur salah satu spesies misalnya kura-kura, ternyata ada di dalam peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan namun juga tertera di dalam peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Seperti halnya kura-kura yang semua masuk (ada di kebijakan KLHK serta di KKP). Kenapa begitu? Karena kita masuk dalam otoritas CITES nya, otomatis kita perlu berkoordinasi terus dengan mereka (KKP). Perlu diatur, ditugaskan bagaimana membagi itu, karena kita juga tidak mungkin mengurus semua. Tapi yang namanya wewenang CITES kan kita perlu ikuti, ikuti aturan yang sudah ada”, jelasnya kepada penulis (November, 2017).

Adapun pihak dari LSM WCS menjelaskan terkait dengan kebijakan yang tumpang tindih. Ia sedikit menceritakan awal mula mengapa bisa ada peraturan atau kebijakan yang tumpang tindih.

“Iya memang sebenarnya dulu pada tahun 1990 mungkin jelas KKP belum ada pada waktu itu, jadi jelas undang-undangnya yaitu UU No.5/Tahun 1990. Ketika KKP ada baru dibentuk, baru kemudian terjadi bisa dibilang tumpang tindih, tapi memang *concern* KKP mungkin belum ke arah konservasi. Jadi undang-undang terkait perikanannya memang lebih berat ke *Fisheries* (nelayan). Nah, semakin kesini, perkembangan kebijakan internasional juga kan berubah, semakin banyak spesies-spesies *marine* (kelautan) yang kemudian masuk ke dalam Appendix I (dilindungi), Appendix II (yang membutuhkan pengaturan perdagangan). Disitu bisa dibilang membuat kebingungan dari sisi pengelola, karena saat ini memang yang terdaftar sebagai manajemen otoritas untuk spesies itu kan baru Kementerian Kehutanan, sementara KKP belum terdaftar sebagai otoritas. Jadi semua aturan pengelolaan spesies yang terkait CITES itu memang ada di KLHK. Agak membingungkan karena ada spesies-spesies

PPID KLHK (2018) menyebutkan selain aplikasi pengaduan yang dapat berupa aplikasi pada *smartphone*, juga saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), 1 Februari 2018, membangun *Call Center* di 74 Balai Besar Taman Nasional dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) di seluruh Indonesia. Berdasarkan keterangan dari pihak Humas KLHK dalam laman website hasil dari Siaran Pers (http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/1035), KLHK menyampaikan masyarakat dapat melakukan pelaporan secara langsung melalui via telepon atau sms ke nomor 082299351705 berupa pengaduan dalam bentuk gangguan di kawasan konservasi, seperti ilegal logging, perambahan, kejahatan terhadap satwa liar, dan lain-lain.

Masyarakat juga dapat menghubungi layanan Quick Respons melalui website: www.ksdae.menlhk.go.id, email: datakonservasi@gmail.com, Facebook: Direktorat Jenderal KSDAE, Instagram: [@biodiversity_of_indonesia](https://www.instagram.com/biodiversity_of_indonesia) dan Twitter: [@ditjenksdae](https://twitter.com/ditjenksdae) ataupun datang langsung ke Kantor Ditjen KSDAE Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 8, Jl. Gatot Subroto, Jakarta. Upaya lain yang dilakukan Ditjen KSDAE adalah bekerjasama dengan POLRI, Tim CyberCrime POLRI, LSM, dan aktifis lingkungan, untuk mengawal proses hukum terhadap perburuan satwa liar, perdagangan satwa, dan penyiksaan satwa liar yang dilindungi. Juga melalui peningkatan kerjasama dengan semua pintu keluar, seperti Angkasa Pura, Bea Cukai, Karantina Hewan, pelabuhan, kantor imigrasi di perbatasan serta perusahaan ekspedisi barang untuk, melakukan pengecekan dan penindakan bagi pembawa barang-barang yang terbukti berisi satwa liar (PPID KLHK, 2018).

2. Faktor Penghambat Kebijakan Perdagangan Satwa Liar

Menurut Sunggono (1994), faktor penghambat dalam suatu pelaksanaan kebijakan yaitu karena isi kebijakan yang kurang jelas dan kurang rinci; informasi yang disampaikan atau didapat kurang jelas; dukungan publik kurang bahkan tidak ada; serta pembagian potensi berupa wewenang, tugas dan tanggung jawab yang tidak sesuai. Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan oleh masing-masing informan yang telah diwawacarai penulis, terdapat beberapa pendapat yang beragam terkait dengan faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam melaksanakan implementasi kebijakan perdagangan satwa liar.

Pendapat tersebut diantaranya dikemukakan oleh pihak dari KLHK baik dari CITES maupun Gakkum, LSM WCS, serta dari pelaku usaha perdagangan satwa liar. Pihak CITES Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjelaskan faktor penghambat dari sisi pemerintah dan dari sisi pelaku usaha, dimana dari sisi pemerintah yakni masih kurangnya sumber daya manusia serta sistem pelayanan yang masih manual, sedangkan dari sisi pelaku usaha menurut pihak CITES, KLHK, menjelaskan, “info yang didapat masih kurang, pelaku usaha ada yang nakal, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia masih kurang.”

Tidak jauh beda dengan pendapat pihak CITES, Kasubdit Pencegahan dan Pengamanan Hutan, Direktorat Gakkum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan selain faktor kurangnya sumber daya manusia, juga saat ini sudah sangat marak terjadi perdagangan satwa liar yang dilakukan secara *online*, serta sulitnya menangkap langsung pelaku perdagangan satwa tersebut. Hal ini karena pihak dari KLHK masih memerlukan sumber daya manusia yang

paham teknologi, sehingga kecanggihan yang dimiliki SDM dari pemerintahan, dapat mengalahkan kecanggihan dari para pelaku kejahatan perdagangan satwa liar.

“Faktor penghambatnya yaitu sudah marak perdagangan di online seperti di Facebook, Instagram, Twitter, dll, itu sangat sulit bagi kami karena kami kalah dengan kecanggihan mereka, terkendala di kapasitas jumlah SDM, baik Polhut ataupun jumlah PPNS, jadi tidak bisa tertangani semua. Faktor kedua, mereka beli pakai jasa kurir, kami susah untuk langsung menangkap pelaku perdagangan satwa tersebut, tidak boleh langsung seperti OTT (operasi tangkap tangan) gitu,” tambahnya.

Terkait dengan kebijakan, Manajer dari *Wildlife Policy*, WCS menjelaskan bahwa ada tantangan yang harus dihadapi pemerintah yaitu UU No. 5 Tahun 1990 yang masih belum direvisi, dimana hal tersebut dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan perdagangan satwa liar, seperti yang disampaikannya, aturan yang ada saat ini terkait spesies terakhir diperbaharui pada tahun 1999, dengan kata lain, kondisi spesies yang ada seperti jumlah maupun jenis spesies yang ada pada tahun 1999 sudah sangat berbeda dengan saat ini.

“Saat ini merupakan tantangan bagi pemerintah dan para pelaksana kebijakan, baik BKSDA, Bea Cukai dan para yang bergerak di bidang ini. Aturannya terakhir update pada tahun 1999, jadi saat ini belum ada update terkait spesies lagi. Seharusnya hal itu memang sudah tidak layak lagi untuk diperdagangkan, karena kondisi satwa sudah tidak update atau karena daftar spesies sudah lama. Kondisi populasi satwa yang sudah tidak layak untuk diperdagangkan. Di satu sisi misalnya operasi menemukan Harimau India atau gading Gajah Afrika, mungkin tidak bisa diproses hukum, tidak bisa dipidana karena memang tidak diatur dalam kebijakan.”

Lain halnya dengan beberapa pendapat yang dikemukakan oleh beberapa informan sebelumnya yang mengungkapkan ada faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan perdagangan satwa, pihak BKSDA justru berpendapat lain. Kepala Seksi Wilayah I ini justru berpendapat bahwa ia tidak menemukan kendala

atau masalah yang menghambat pelaksanaan kebijakan. Seperti yang ia sampaikan,

“Tidak ada hambatan dan kendala. Terkait dengan SDM sudah cukup, lalu dana insentif untuk Polhut itu sudah cukup, terkait fasilitas juga sudah cukup. Tapi yang namanya manusia kan ya tidak ada cukupnya ya,” ungkapnya.

Salah satu pelaku usaha yang diwawancarai penulis pada Januari, 2018 lalu mengungkapkan hal justru seolah tidak sepakat dengan pendapat dari BKSDA yang berpendapat bahwa mereka tidak menemukan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan perdagangan satwa liar. Pelaku usaha tersebut menyangkal dan justru menyebutkan bahwa ada banyak hambatan yang dihadapi pemerintah termasuk di pemerintahan Jakarta, seperti yang ia sampaikan,

“Pihak BKSDA banyak yang masih belum tahu nama latin atau jenis suatu spesies, serta tidak paham habitatnya dimana. Ketika ada pedagang satwa yang tertangkap, pihak BKSDA kerap memanggil tim ahli dari LIPI. Selain itu BKSDA juga banyak kurang tahu bahwa suatu spesies tersebut dilindungi atau tidak dilindungi. Misalnya, ada teman saya yang bekerja di penangkaran ular. Penangkarannya palsu karena semua ular disitu merupakan hasil tangkapan liar dari alam, tapi laporan ke kehutanan dan BKSDA ini adalah ternakan. BKSDA setiap beberapa bulan datang kunjungan, dan BKSDA bisa ditipu. BKSDA kurang mengerti mengenai ular (ular tiga meter butuh tiga tahun lebih, tapi BKSDA percaya bahwa ular itu baru berusia tiga bulan sudah panjang tiga meter) sehingga siap untuk dikirim ke luar negeri, BKSDA percaya aja dan cuma ceklis aja. Bahkan saat teman saya membuat rekayasa telur dan difoto lalu dikirim ke BKSDA, mereka percaya. Tapi akhirnya ketahuan sama LIPI saat diperiksa. LIPI yang tahu, tapi BKSDA tidak tahu. Hal-hal tersebut adalah yang bisa menghambat berjalannya kebijakan khususnya di DKI Jakarta”.

Ia juga menambahkan bahwa saat teman darinya berada di kantor BKSDA Jakarta karena kedatangan sedang membawa beberapa spesies reptil dari Papua dan Maluku, ia diceritakan apa yang dialaminya saat berada di kantor BKSDA tersebut.

“Ketika ada penangkapan salah satu teman saya di FB (*Facebook*), dia bawa beberapa spesies reptil dari Papua dan Maluku, ada beberapa spesies yang dilindungi. Namun, pelaku sendiri yang menceritakan kepada saya kalau dia dibawa masuk ke BKSDA Jakarta. Dia ‘ngobrol’ dengan para anggota BKSDA, mereka sendiri tidak tahu satwa itu jenis apa. Yang mereka tahu adalah ‘Papua’ itu dilindungi, padahal artinya kan tidak semua satwa dari Papua dilindungi. Bahkan teman saya bilang, dia ada bohong terkait dengan nama latin satu spesies yang sebenarnya dilindungi, namun ia bilang kepada petugas bahwa satwa tersebut ‘aman’ atau tidak dilindungi. Pokoknya yang jadi patokan BKSDA saat itu adalah spesies *Morelia firibis* (Sanca hijau papua), hanya itu yang terlihat, walaupun yang dibawa teman saya ada sekitar 300 ekor, dan hampir semua dilindungi, tapi fokus BKSDA adalah Sanca hijau papua, karena BKSDA sendiri tidak paham ternyata nama spesies, tidak paham ini habitatnya dimana,” jelasnya kepada penulis.

Bagi masyarakat yang mengetahui dan melihat ada aktivitas perdagangan satwa liar, maka bisa langsung datang ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam di masing-masing provinsi nya, atau bisa juga menghubungi langsung kepada pihak Penegak Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, misalnya ada masyarakat Jakarta, dapat langsung datang ke kantor Gakkum yang berada di daerah Salemba, Jakarta Pusat. Adapun cara lain yang dapat dilakukan oleh masyarakat yaitu dengan melakukan pengaduan penegak hukum KLHK, melalui aplikasi yang saat ini telah ada. Aplikasi tersebut tersedia di *Play Store* untuk Android dan *App Store* untuk iOS.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, dalam laman Antara News (www.antaranews.com) menjelaskan bahwa pemerintah telah berusaha menggunakan segala cara untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan berat seperti kebakaran hutan, pembalakan liar, pencemaran, dan perdagangan satwa liar. Ia mengaku bahwa masyarakat saat ini sudah banyak yang tahu terkait dengan isu-isu kejahatan yang terkait tumbuhan dan satwa liar, namun sayangnya mereka (masyarakat) masih belum tahu bagaimana cara untuk menyelesaikannya

atau menyampaikannya kepada pemerintah. Ia menginginkan bahwa pemerintah mulai saat ini dapat bekerja sama, berharap dengan adanya aplikasi ini, masyarakat dapat ikut berpartisipasi dan terlibat dalam membantu pemerintah dan mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah lingkungan dan kehutanan.

Adapun dalam tulisan yang dipaparkan oleh *Mongabay Indonesia* (www.mongabay.co.id), bahwa saat ini masyarakat dapat membantu pemerintah dengan dapat memberikan pengaduan via *call center* atau bahkan membantu melaporkan pelaku yang terbukti mempromosikan bahkan melakukan aktivitas perdagangan satwa liar melalui *Facebook*. Melalui *call center*, masyarakat dapat menghubungi pemerintah dan melaporkan hal tersebut di nomor 082299351705 (Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Wiratno kepada *Mongabay Indonesia*). Masyarakat pun saat ini dapat membantu pemerintah dalam menghentikan tindak kejahatan perdagangan satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang dan sudah terancam punah melalui media sosial, termasuk *Facebook*.

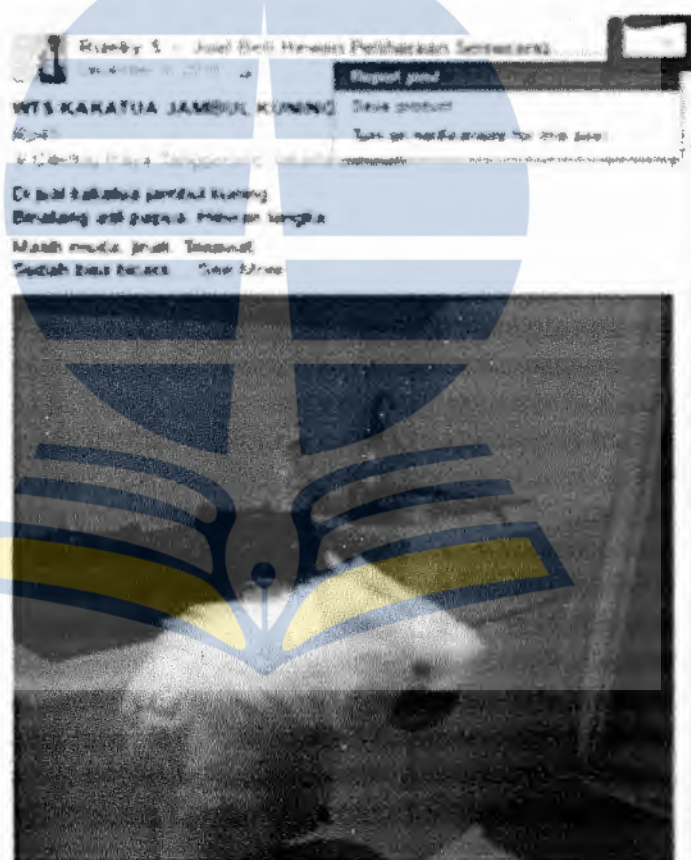
“Tren perdagangan liar dilindungi semakin canggih. Selain tetap menjual satwa di beberapa pasar burung, para pelaku kini memanfaatkan media sosial. Adanya komunitas-komunitas yang menganggap diri mereka pecinta satwa liar dengan memelihara satwa liar dilindungi turut menyemarakkan terjadinya perdagangan,” ujar Irma Hermawati, *Legal Advisor Wildlife Crime Unit* kepada *Mongabay Indonesia* (2017).

Kutipan yang diutarakan oleh Irma Hermawati, *Legal Advisor Wildlife Crime Unit* kepada *Mongabay Indonesia*, pada tahun 2017 mengungkapkan adanya tren yang dilakukan oleh pelaku melalui pemanfaatan media sosial, pelaku ini sering menganggap diri mereka sebagai komunitas pecinta satwa liar dengan memamerkan tindakan mereka dalam memelihara satwa di liar di lingkungan

rumah mereka. Hal ini diperkuat dengan munculnya laman pada website *Mongabay Indonesia* tersebut dijelaskan bagaimana cara-cara atau tahapan pelaporan terhadap tindak kejahatan perdagangan satwa liar yang ada pada foto akun pribadi atau grup *Facebook* tersebut.

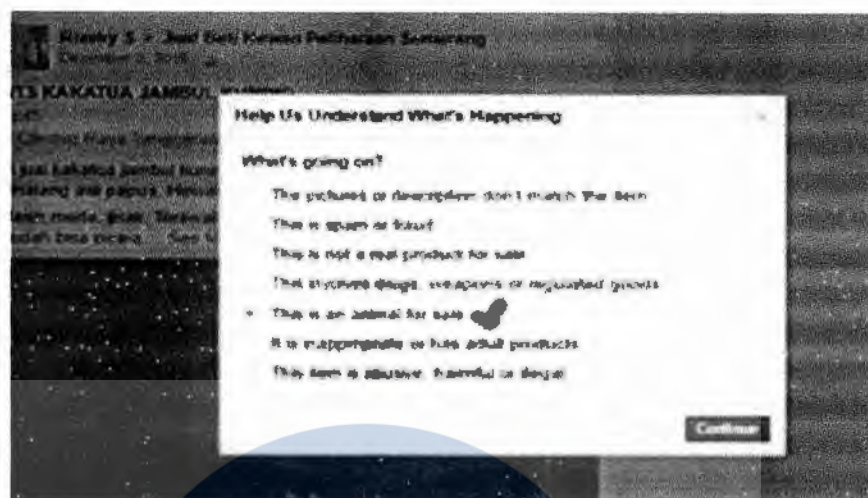
Berikut adalah tahapan yang dapat dilakukan apabila melihat grup atau akun pribadi yang terbukti melakukan pelanggaran, yaitu:

1. Klik “tanda panah ke bawah” pilih opsi “Report Post”



Gambar 4.4
Tahapan 1 Pelaporan terhadap Tindak Kejahatan Perdagangan
Satwa Liar yang Ada Pada Foto Akun Pribadi atau Grup *Facebook*
Sumber: Mongabay Indonesia (2017)

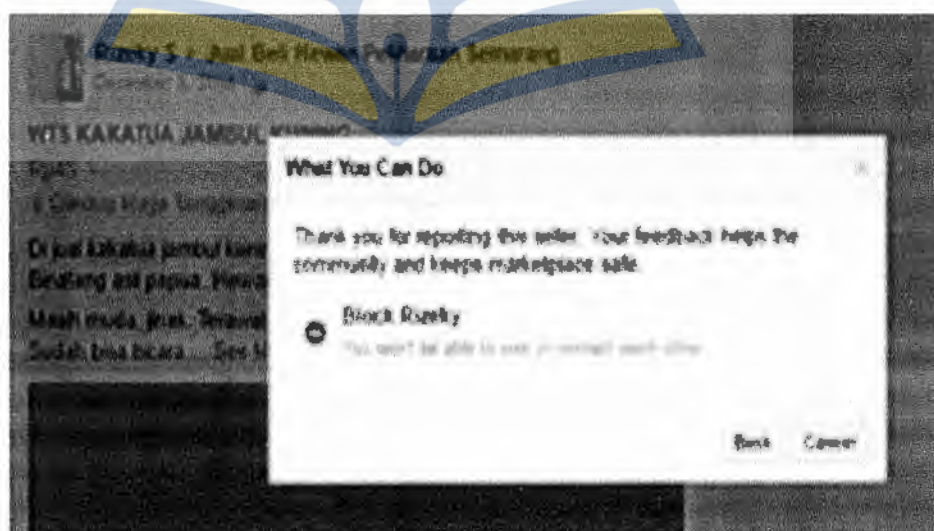
2. Setelah itu akan muncul opsi alasan pelaporan yang dibuat, pilih opsi *"This is an animal for sale"*



Gambar 4.5

Tahapan 2 Pelaporan terhadap Tindak Kejahatan Perdagangan Satwa Liar yang Ada Pada Foto Akun Pribadi atau Grup Facebook
Sumber: Mongabay Indonesia (2017)

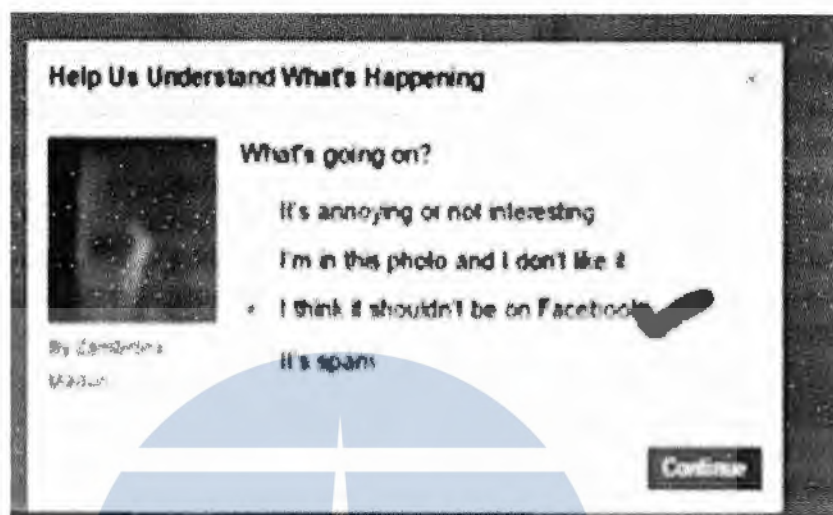
3. Setelah itu akan ada muncul pemberitahuan atau notifikasi, dimana hal ini berarti pelaporan yang dilakukan telah berhasil dilakukan. Selain itu terdapat opsi untuk memblokir akun dari penjual atau pedagang satwa liar tersebut. Pemblokiran dengan cara klik *"Block ----"*



Gambar 4.6

Tahapan 3 Pelaporan terhadap Tindak Kejahatan Perdagangan Satwa Liar yang Ada Pada Foto Akun Pribadi atau Grup Facebook
Sumber: Mongabay Indonesia (2017)

4. Pilih opsi atau pilihan “*I think it shouldn't be on Facebook*” pada alasan pelapor.



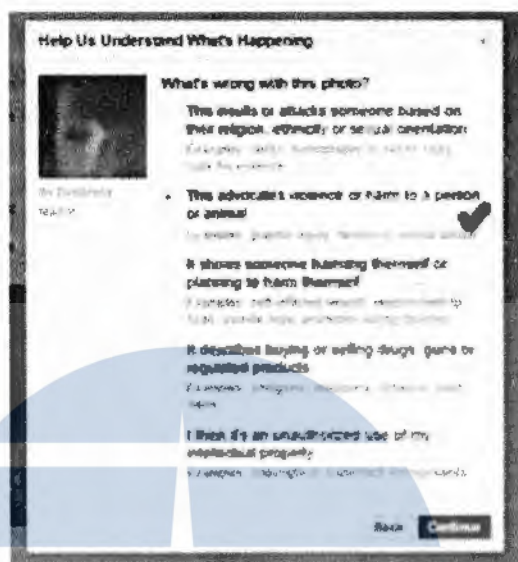
Gambar 4.7
Tahapan 4 Pelaporan terhadap Tindak Kejahatan Perdagangan
Satwa Liar yang Ada Pada Foto Akun Pribadi atau Grup
Facebook
Sumber: Mongabay Indonesia (2017)

5. Selanjutnya, pilih opsi “*Something else*”, lalu klik “*Continue*”



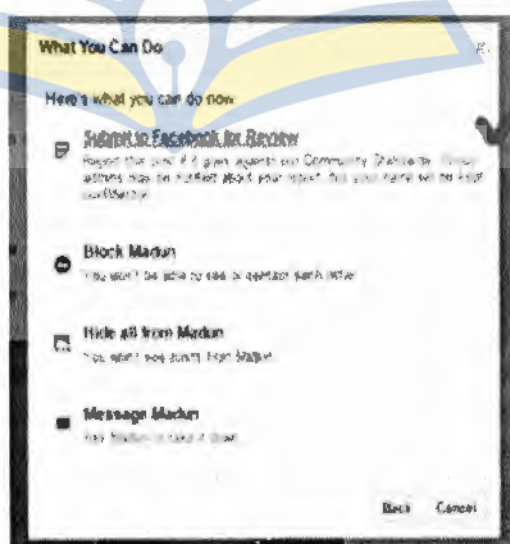
Gambar 4.8
Tahapan 5 Pelaporan terhadap Tindak Kejahatan Perdagangan
Satwa Liar yang Ada Pada Foto Akun Pribadi atau Grup Facebook
Sumber: Mongabay Indonesia (2017)

6. Lalu, pilih opsi *"This advocates violence or harm to a person or animal"*, dan klik *"Continue"*.



Gambar 4.9
Tahapan 6 Pelaporan terhadap Tindak Kejahatan Perdagangan
Satwa Liar yang Ada Pada Foto Akun Pribadi atau Grup Facebook
Sumber: Mongabay Indonesia (2017)

7. Terakhir yaitu memilih opsi atau pilihan *"Submit to Facebook for Review"*.



Gambar 4.10
Tahapan 7 Pelaporan terhadap Tindak Kejahatan Perdagangan
Satwa Liar yang Ada Pada Foto Akun Pribadi atau Grup Facebook
Sumber: Mongabay Indonesia (2017)

3. Faktor Pendukung Kebijakan Perdagangan Satwa Liar

Menurut Edward III dan George (1980) dalam Teori Implementasi Kebijakan, faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan diantaranya komunikasi, sumberdaya, watak atau sikap, dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil yang didapat oleh penulis bahwa para informan mengemukakan beberapa hal yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Edward III dan George (1980). Hal-hal yang mendukung implementasi kebijakan menurut pendapat pihak KLHK, BKSDA, Bea Cukai, LSM WCS, serta dari pelaku usaha yaitu sumberdaya manusia, teknologi, komunikasi dan sikap antar pelaksana yang sudah baik. Hampir semua pihak yang diwawancarai oleh penulis mengatakan hal yang sama. Teknologi yang sudah baik saat ini serta kerjasama yang baik antar semua pihak khususnya melibatkan pihak kepolisian dan TNI merupakan hal yang dianggap sebagai faktor pendukung kebijakan perdagangan satwa liar.

Pendapat terkait hal ini disampaikan oleh pihak CITES, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu, saat ini *software* atau perangkat regulasi yang ada sudah dapat dikatakan baik, serta koordinasi antar pelaksana kebijakan pula sudah baik seperti Bea Cukai, Karantina, pihak Kepolisian, LIPI, serta BKSDA. Pihak BKSDA DKI Jakarta serta pihak dari Gakkum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh pihak CITES. Pihak Gakkum, KLHK, menambahkan bahwa saat ini KLHK sebagai pembentuk kebijakan sudah dapat bekerja sama dengan pihak Kepolisian dan TNI untuk ikut serta membantu menangkap dan menindak para pelaku kejahatan perdagangan satwa liar.

Selain itu, pihak yang sependapat dengan CITES dan Gakkum KLHK yaitu dari Bea Cukai. Pihak Bea Cukai merasa salah satu faktor pendukung kebijakan perdagangan satwa liar yaitu dengan pengawasan dalam hal ekspor impor barang, salah satu caranya yaitu teknologi yang ada saat ini sudah baik dalam proses pengawasan tersebut. Seperti yang dijelaskan pihak Bea Cukai, “teknologi yang sudah baik, sistemnya sudah tersistem, sehingga bisa lebih mudah untuk mengawasinya”.

Pihak pelaku usaha menyampaikan bahwa saat ini yang mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan perdagangan satwa liar yaitu karena KLHK dan BKSDA sudah ada gerakan gabungan yang dibantu oleh pihak-pihak yang berwenang seperti dari Kepolisian serta TNI. Lalu manajer LSM *Wildlife Conservation Society* pun menyatakan hal sama pula terkait dengan hal faktor pendukung implementasi kebijakan perdagangan satwa liar. Pihak dari LSM WCS berpendapat,

“Saat ini KLHK sudah punya aplikasi pengaduan atau pelaporan yang bisa diakses oleh masyarakat luas jika misalnya ada mendapati warga yang memelihara satwa liar. Lalu hubungan pemerintah yaitu pembentuk dan pelaksana kebijakan dengan kami dan LSM lain sangat terbuka.”

Pendapat dari pihak LSM WCS semakin memperkuat argumen bahwa pengendalian dari aktivitas perdagangan satwa liar kini dapat dikendalikan juga oleh masyarakat luas dengan memanfaatkan aplikasi pengaduan atau pelaporan kepada pihak LSM WCS, sehingga pihak masyarakat pun dapat ikut terlibat langsung dalam menyelesaikan kasus ini. KLHK saat ini sedang disibukkan dengan melaksanakan sosialisasi dan penyadartahuan kepada masyarakat terhadap aplikasi *open source* WildScan dan aplikasi pengaduan pada *smart phone* dan

media sosial. Pihak Gakkum, KLHK, menyampaikan bahwa saat ini dilakukan penguatan terhadap kegiatan intelijen guna mengejar 'kecanggihan' masyarakat dan mendapatkan informasi intelijen yang lengkap, akurat, dan mutakhir. Hal ini juga dapat menjawab tantangan yang datang untuk KLHK agar terus mengoptimalkan pemanfaatan IT untuk pengelolaan *data base* perdagangan ilegal satwa liar (Perkumpulan SKALA, 2016).

Selain terdapat gerakan gabungan yang membantu KLHK dalam kelancaran pelaksanaan kebijakan, KLHK juga memiliki tim khusus untuk melakukan penegakkan hukum. Penegakkan hukum dapat dilakukan tidak hanya oleh pihak kepolisian, tetapi polisi hutan khusus (polhut) yang ditempatkan di Balai Taman Nasional atau BKSDA, Dishut, maupun Balai Gakkum di tingkat provinsi maupun penyidik pegawai negeri sipil (PPNS Kehutanan). SPORC (Satuan Polhut Reaksi Cepat) merupakan kesatuan khusus yang dibentuk dalam lingkup kepolisian kehutanan yang terhubung dalam satuan brigade (Perkumpulan SKALA, 2016). Fungsi dan tugas dalam pengawasan hutan melalui kegiatan preventif, represif, dan yustisif. Masyarakat menurut Perkumpulan SKALA (2016), dapat ikut serta membantu polhut dalam melaksanakan tugas sebagai mitra, yang tergabung dalam program MMP (Masyarakat Mitra Polhut) dengan atas dasar kesadaran membantu polhut untuk melindungi satwa liar dan hutan, melakukan patroli di dalam kawasan hutan, dan membantu kampanye dan edukasi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

- 1) Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat penulis sampaikan yaitu implementasi kebijakan perdagangan satwa liar di DKI Jakarta masih bersifat sektoral dan belum dapat menjamin penuh satwa liar di alam sudah terlindungi; Sanksi terhadap para pelaku pun belum bisa dikatakan berat, dimana pelaku yang terjerat kasus perdagangan satwa liar ini kurang mendapat efek jera; Kebijakan yang ada saat ini masih tumpang tindih antara kementerian LHK dan KKP, dimana tanggung jawab yang ada tidak jelas untuk mengatur kelautan dan daratan menimbulkan mandat yang saling tumpang tindih; Belum ada perlindungan hukum terhadap satwa yang tidak dilindungi.
- 2) Faktor penghambat yang ada dalam pelaksanaan kebijakan perdagangan satwa liar yaitu Undang-undang No. 5 tahun 1990 yang menjadi landasan bagi para pelaksana kebijakan, sudah berusia lebih dari 25 tahun, sehingga ada banyak satwa-satwa liar yang belum *terupdate*, sehingga terkadang membuat petugas kebingungan; hambatan lain yaitu status hukum spesies hanya dikategorikan menjadi dua, yaitu dilindungi atau tidak dilindungi; masih banyak aparat pelaksana kebijakan khususnya di Jakarta yang masih belum mengetahui terkait satwa-satwa liar mana yang masuk daftar dilindungi, serta satwa liar yang saat ini sudah tidak lagi dilindungi;

tingkat komitmen petugas yang masih perlu ditingkatkan lagi; jumlah SDM yang masih belum cukup dari segi kualitas dan kuantitas; serta sosialisasi yang dilakukan oleh pembentuk maupun pelaksana kebijakan dirasa masih kurang menyentuh semua lapisan masyarakat.

- 3) Faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan perdagangan satwa liar saat ini KLHK sebagai pembentuk kebijakan sudah bekerjasama atau melibatkan pihak kepolisian, TNI, dan masyarakat dalam menjalankan tugas; KLHK sudah ada tim khusus untuk melakukan patroli yang berbasis *online* dan sudah memiliki aplikasi pengaduan yang bisa diakses oleh semua kalangan masyarakat; serta komunikasi dan koordinasi yang terjadi antara para pembentuk dan pelaksana kebijakan sudah cukup baik.

B. SARAN

1. Pihak pembentuk kebijakan perlu melakukan penyadartahuan kepada para pelaksana kebijakan jenis-jenis satwa mana yang masuk kategori kritis, terancam **maupun** rentan.
2. Meningkatkan komitmen dan keterampilan petugas dalam melaksanakan pengawasan khususnya di daerah perbatasan, pelabuhan dan bandara.
3. Pihak BKSDA melakukan pendekatan kepada komunitas pecinta satwa khususnya yang ada di DKI Jakarta, dan memberikan penyadartahuan kepada pemilik satwa liar terkait informasi satwa, maupun terkait kebijakan pemerintah, sehingga diharapkan BKSDA maupun komunitas dapat bekerjasama mencegah adanya aktivitas perdagangan satwa liar.

4. Pemerintah selaku pembentuk dan pelaksana kebijakan melakukan sosialisasi ke seluruh kalangan masyarakat, agar masyarakat lebih tahu dan peduli terhadap pelestarian satwa liar yang ada di alam, sehingga dapat membantu pemerintah dalam memerangi perdagangan satwa liar secara ilegal.



tertentu yang diatur oleh KKP. Kita ga bisa bilang gap sih, hanya saja ada seperti kekosongan atau *overlap* disitu yang mungkin harus segera ditindaklanjuti, nah itu yang sedang diusahakan oleh pemerintah bagaimana membuat KKP juga bisa menjadi otoritas pengelola,” jelasnya kepada penulis (November, 2017).

Berbeda dengan pendapat dari pihak KLHK dan LSM WCS, pihak dari Bea dan Cukai (Unit Analyzing Point) menjelaskan saat ini terdapat kebijakan yang tumpang tindih antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan kebijakan yang diatur oleh Kementerian Perdagangan. Dimana kebijakan tersebut yang mengatur perdagangan satwa liar.

“Yang perlu dikritisi juga dari perumus kebijakan, karena kami kan jelas patokannya yaitu HS Code dan klarifikasi. Memang di kebijakan Kehutanannya sendiri masih umum, karena disitu ada yang namanya 443, disitu masih bicara ‘semua hewan’, tidak disebutkan secara detail bagian itu bagian apa, nama latinnya apa, HSCode nya sekian. Termasuk turunan-turunannya di PP No.7/Tahun 1999 masih belum jelas dan dengan Permen Kemendag No. 50 pun belum sinkron, masih ada ‘miskom’ (*miss communication*), jadi kami di lapangan masih bingung. Seperti misalnya ada yang mau ekspor tanduk rusa, menurut Kemendag tidak boleh, tapi menurut KLHK boleh, dengan poin-poin tertentu. Ada semacam *briefing* bersama dengan Perdagangan, KLHK, dan dengan Bea Cukai, jadi ada perubahan apa saja terkait interpretasi tadi, ya masih belum ada titik temu. Misalnya kasus sama yang tanduk rusa, kalau HS Code yang disampaikan Perdagangan ada 2 HS Code yang mengatur. Ada yang masih tanduk rusa yang dikerjakan dan tanduk rusa yang tidak dikerjakan; serta tanduk rusa yang dilarang. Tapi ternyata yang dilarang ini pun masih bisa diekspor, masih ada pengecualian, sepanjang itu mendapatkan seperti rekomendasi dari mereka, boleh. Nah kami bingung, ini aturannya tidak tegas.” Jelasnya saat diwawancarai penulis (Desember, 2017).

Menanggapi hal yang disampaikan oleh pihak Bea Cukai, Kepala Seksi Wilayah I, BKSDA pun ikut berpendapat. Ia menyampaikan bahwa kebijakan saat ini nampaknya sudah jelas dan rinci, bahkan poin-poin yang tertera di undang-undang pun sudah jelas.

“Jadi gini, yang disampaikan oleh pemerintah itu bukan terkait dilarang atau tidak dilarang, yang pasti dilarang atau tidaknya itu kan merupakan

urusannya KLHK. Namun terkait dengan yang disampaikan pihak Bea Cukai, mungkin terkait ukurannya dari spesies tersebut yang akan diekspor. Kalau tanduk rusa itu memang dilindungi, hanya tanduk rusa yang ada di Papua lah yang tidak dilindungi, karena mereka menggunakan tanduk rusa untuk berburu. Mungkin terkait diolah atau tidak, dipotong-potong dengan ukuran berapa. Artinya, kalau bicara legal atau tidak legalnya itu urusan KLHK, karena kenapa? Memang bagian dari satwa yang dilindungi itu pasti masuk ke dalam kategori dilindungi juga. Tapi kalau di Papua memang boleh,” ucap pihak BKSDA tersebut kepada penulis.

Dilihat dari kutipan di atas, terdapat perbedaan cara pandang antara pihak KLHK, LSM WCS dan pihak BKSDA, dimana pihak KLHK menyatakan bahwa KLHK saat ini merupakan pemegang otoritas karena pada saat itu, KKP belum terbentuk, sehingga saat ini perlu diatur, ditugaskan bagaimana membagi itu, karena pihak KLHK tidak mungkin mengurus semua. Pihak LSM WCS menyebutkan hal yang serupa dan menambahkan bahwa saat ini yang menjadi pengelola spesies yang terkait CITES adalah KLHK, namun agak membingungkan karena ada spesies-spesies tertentu pun ada yang diatur oleh KKP.

Sedangkan pihak BKSDA menanggapi apa yang disampaikan oleh Bea Cukai yaitu terdapatnya kesalahpahaman atau *misscom* terkait kode spesies atau jenis spesies apakah spesies tersebut boleh atau dilarang untuk diperjualbelikan. Bea Cukai menganggap bahwa aturan-aturan yang ada saat ini yang diatur oleh KLHK masih belum jelas dan rinci. Namun, terkait hal tersebut, BKSDA menyampaikan bahwa peraturan saat ini sudah jelas, ada ketentuan-ketentuan tertentu (dari spesies) yang diatur oleh KLHK yang perlu dilihat kembali secara rinci apakah boleh atau tidak untuk diperdagangkan atau bahkan mungkin hal rinci lain terkait ukuran dari spesies tersebut.

1.2.2. Besarnya Alokasi Sumber Daya Finansial dan Fasilitas

Menurut USAID (April, 2015), menjelaskan bahwa Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (KLHK) memberikan alokasi dana pada tahun 2015 kepada para pelaksana kebijakan untuk kegiatan penegakkan hukum sebesar IDR 212 juta atau USD 16,4 juta. Dana tersebut dibagikan kepada kantor pusat di Jakarta (Direktorat PPH), BKSDA daerah-daerah setempat, serta balai-balai taman nasional di seluruh Indonesia. Kegiatan anggaran tersebut diantaranya untuk kegiatan preventif (patroli, sosialisasi, peningkatan kesadaran), dan kegiatan represif (operasi pengendalian distribusi satwa liar, operasi gabungan); proses legal (investigasi, pengumpulan data intelijen, pengajuan kasus); kegiatan kampanye; penguatan kapasitas sumber daya manusia (Polhut, PPNS, dan Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan); infrastruktur; pengembangan kerja sama (misalnya nota kesepahaman); serta perbaikan dan peninjauan peraturan. Anggaran untuk mengawasi perdagangan ilegal satwa liar dialokasikan kepada Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati (KKH).

1.2.3. Keterpautan Antara Instansi Pelaksana Kebijakan

Keterpautan antara instansi pelaksana kebijakan seperti misalnya BKSDA, Bea Cukai, Pusat Karantina Hewan, dan LIPI, saat ini dirasa sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari pendapat yang dikatakan pihak dari BKSDA terkait bagaimana komunikasi dan koordimasi antara instansi tersebut dalam melaksanakan kebijakan terkait perdagangan satwa liar. “Sosialisasi dengan para pelaksan sudah baik. Kementerian LHK selama ini sudah mengajak teman-teman dari kepolisian, Bea Cukai, Karantina, termasuk perdagangannya untuk diklat

terkait CITES misalnya untuk sosialisasikan list-list atau nama spesies-spesies mana yang masuk kategori terancam punah dan yang mana yang belum. Koordinasi dengan para pelaksana seperti bea cukai, pihak kepolisian, karantina sudah baik, dan itu sangat positif.”

1.2.4. Kejelasan Konsistensi Aturan yang Ada pada Badan Pelaksana

Seringkali penyelundupan-penyelundupan yang dilakukan ini tidak diketahui atau luput dari pengawasan petugas yang berwenang yang ada di perbatasan, di pulau kecil, atau di dermaga (Perkumpulan SKALA, 2016). Banyak petugas yang tidak jeli, tidak tahu, atau bahkan masih bingung terkait spesies apa saja yang masuk daftar dilindungi serta mekanisme seperti apa yang harus dilakukan jika mendapati satwa liar yang dilindungi tersebut. Menurut Perkumpulan SKALA (2016), masih banyak petugas dari pelabuhan maupun di bandara yang kerap kurang jeli dalam melakukan pemeriksaan, baik itu dokumen maupun barang (paket).

Petugas dari Unit Analyzing Point di Bea Cukai Tanjung Priok (Desember, 2017), menjelaskan bahwa mereka terkadang masih mengalami kebingungan dengan kebijakan yang ada. Karena menurut mereka, kebijakan yang ada saat ini masih belum rinci, belum jelas, dan masih tumpang tindih dengan kebijakan lain. Misalnya saat mereka menemukan ada eksportir yang hendak mengekspor tanduk rusa, para petugas kebingungan karena menurut kebijakan dari Kementerian Perdagangan, tanduk rusa dilarang untuk diekspor, sedangkan menurut kebijakan dari Kementerian LHK, tanduk rusa boleh diekspor namun dengan catatan-catatan tertentu.

1.2.5. Tingkat Komitmen dan Keterampilan Aparat

Maraknya aktivitas perdagangan ilegal satwa liar yang ada di Indonesia, ditenggarai oleh adanya permintaan yang tinggi dari para konsumen yang ingin memelihara, mengonsumsi sebagai makanan atau obat, atau bahkan menjadikan bagian tubuh dari satwa liar tersebut sebagai ornamen (Kasubdit Pencegahan dan Pengamanan Hutan, Gakkum, KLHK, November 2017). Namun ternyata, permintaan yang tinggi juga bukan salah satu faktor utama terjadinya aktivitas perdagangan ilegal terhadap satwa liar.

Berdasarkan wawancara khusus yang dilakukan oleh penulis, ada beberapa informan yang mengaku bahwa memang yang juga menjadi penyebab lolosnya perdagangan ilegal satwa liar yaitu tingkat komitmen dari petugas pelaksana kebijakan yang dapat dikatakan masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari pendapat yang dikatakan oleh salah satu pelaku usaha perdagangan ilegal satwa liar (Januari, 2018), bahwa terkadang para petugas (misalnya dari BKSDA) yang kerap kali memberi tahu kepada pedagang di pasar konvensional seperti Pasar Pramuka, Barito, dan Pasar Jatinegara, terkait jadwal patroli atau sidak, dimana dampaknya yaitu para pedagang yang sudah tahu jadwal tersebut, akan langsung menyimpan atau menyembunyikan satwa liar yang mereka jual.

“Komitmen petugas hanya bagus saat awal-awal pergantian menteri, ada fase dimana mereka rajin untuk sidak atau patroli. Pasar-pasar burung di Jakarta misalnya (Barito, Jatinegara, dan Pramuka) semua bersih dari satwa liar yang dilindungi,” jelasnya.

Selain itu, ia juga menambahkan bahwa ia pernah mengetahui bahwa salah satu Polhut di daerah Gunung Pancar, diantara Cianjur dan Sukabumi yang justru sedang menjaga satu kandang yang berisi burung elang yang cukup besar.

“Di daerah Gunung Pancar, diantara Cianjur dan Sukabumi, saya lihat ada kandang yang berisikan burung elang jawa yang dilindungi oleh tiga undang-undang. Disitu ada Polhut yang menjaga. Saya tanya, “punya siapa dan?”, lalu beliau jawab kalau itu punya salah satu pejabat tinggi di Indonesia. Di belakang juga masih ada beberapa burung merak dan siamang. Pejabat ‘loreng’ juga. Jadi tiap pagi hari siamang nya teriak-teriak, itu sangat jelas. Kandangnya tidak tahu, karena saya tidak berani masuk, pagarnya tinggi. Sempat ada burung merak yang kabur ke rumah warga kampung, ditembak oleh anak buahnya saat kabur, karena akan mengganggu,” tambahnya.

Berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh pelaku usaha, pihak BKSDA (Januari, 2018) justru menyangkal bahwa mereka melakukan pelanggaran, namun ia mengatakan bahwa mungkin petugas yang melakukan pelanggaran tersebut yakni dari luar Wilayah I (tempat informan bertugas). Iya mengatakan, “Di Wilayah I (tempat informan bertugas) *clean* (tidak ada yang terlibat dalam aktivitas perdagangan satwa liar). Kalaupun ada mungkin di wilayah lain.”

Selain keterangan yang disampaikan oleh pelaku usaha yang menyebutkan komitmen petugas yang tidak kuat dan memberitahukan informasi sidak kepada pedagang, pihak dari *Wildlife Conservation Society*, menyampaikan komitmen petugas terhadap isu TSL yang memang bukan jadi prioritas utama dari KLHK, “Komitmen itu kan berdasarkan prioritas, apa yang jadi isu TSL (tumbuhan dan satwa liar) perdagangan masih menjadi isu prioritas kedua dari KLHK setelah kebakaran dan hasil hutan, jadi komitmennya tidak seperti komitmen terkait kebakaran hutan, dimana mereka pasti akan lebih cepat untuk menindaklanjuti.

Gakkum KLHK menyebutkan (November, 2017) bahwa meskipun ada beberapa petugas yang terlibat dalam perdagangan satwa liar, namun tetap saja mereka mendapatkan sanksi.

“Bisnis perdagangan satwa liar ini memang merupakan bisnis besar, tapi untuk mereka (para pelaksana ataupun petugas) bukan merupakan satu hal yang menggiurkan. Apalagi yang melakukan adalah petugas yang menjadi pelaku-pelaku kecil. Jadi karena situasi begitu, komitmen mereka jadi relatif lebih tinggi. Kadang-kadang adalah faktor uang atau dana operasi yang kurang. Ada petugas yang terlibat dalam aktivitas perdagangan satwa, namun tidak banyak. Seperti di Jakarta sendiri juga ada. Namun, petugas tersebut tidak lepas dari hukuman, dia mendapatkan pelanggaran,” Jelas pihak dari Gakkum tersebut.

Pendapat dari Gakkum KLHK menunjukkan bahwa pelaku yang juga diantaranya ada petugas dari pemerintahan yang menjual atau memperdagangkan satwa liar secara ilegal, tidaklah mendapat keuntungan yang besar atau menggiurkan. Ia menambahkan memang ada beberapa petugas yang terlibat dalam masalah ini yang menjadi pelaku-pelaku kecil, namun jumlah petugas yang terlibat tersebut tidaklah banyak.

1.2.6. Seberapa Luas Akses Masyarakat atau Kelompok Luar untuk Berpartisipasi

Keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan upaya pencegahan terjadinya aktivitas perdagangan ilegal satwa liar saat ini sudah dapat dikatakan cukup baik. Mereka sudah aktif untuk membantu pemerintah dan petugas berwenang dalam upaya penegakkan hukum. Tentu saja peran pelaksana dan pembuat kebijakan terkait penyadartahuan terkait hal ini masih sangat diperlukan, karena mengingat tidak semua masyarakat yang bisa tahu spesies mana saja yang boleh atau yang tidak boleh untuk diperdagangkan, serta satwa mana yang masuk

dalam kategori punah atau dilindungi. Selain itu juga masyarakat umum masih banyak yang belum paham pentingnya peran ekologi satwa liar bagi kehidupan bersama, apa itu PISL, CITES, dan seperti apa kerangka hukum yang ada (Perkumpulan SKALA, 2016).

Wildlife Policy Manager dari WCS menyebutkan bahwa masyarakat dapat ikut berpartisipasi, namun ada batasan-batasan tertentu yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. “Jelas ada batasannya yaitu masyarakat tidak bisa ikut serta dalam proses penegakkan hukumnya. Masyarakat hanya bisa ikut serta membantu pemerintah (pembentuk dan pelaksana kebijakan) dalam hal melakukan dan memberikan laporan kepada kami (WCS) dengan memberikan laporan, yang nantinya akan kami sampaikan kepada pihak Gakkum, atau juga bisa mereka langsung ke Gakkum. Apalagi sekarang ada aplikasi pengaduan yang bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat,” tambahnya.

Pihak dari Gakkum, KLHK, menyampaikan bahwa mereka selaku pembuat kebijakan sudah sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya melestarikan satwa liar di alam serta terkait dengan kebijakan perdagangan satwa liar. “Sudah sering melakukan sosialisasi. Namun terkadang sifatnya masih parsial politik. Oleh karena itu kita punya proyek saat ini untuk bagaimana memerangi perdagangan satwa liar, sekaligus perdagangan satwa liar yang tidak berkelanjutan. Untuk itu kami melakukan strategi komunikasi untuk menjadi dasar inisiatif-inisiatif komunikasi dan supaya bisa masuk ke generasi masa sekarang,” terangnya. Sependapat dengan pihak KLHK, Kasie Wilayah I, BKSDA DKI Jakarta juga membenarkan apa yang dikatakan pihak Gakkum,

KLHK tersebut. Ia mengaku, pihak KLHK sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat misalnya ke sekolah-sekolah, maupun ke berbagai instansi terkait seperti pihak kepolisian, TNI, Bea Cukai dan Karantina, serta LSM.

Pihak BKSDA menyebutkan bahwa KLHK selaku pembentuk kebijakan memberikan ruang kepada masyarakat agar dapat terlibat untuk melakukan partisipasi publik dan meningkatkan kewenangan publik. Bagi pemerintah Indonesia sendiri, terkait hukum dan kebijakan menjadi perhatian serius dalam upaya menghentikan perburuan dan perdagangan ilegal satwa liar. Selain itu, pemerintah juga telah memiliki beberapa strategi seperti memperkuat jejaring dengan berbagai kalangan seperti masyarakat, LSM, akademisi, dan lainnya agar lebih kritis dan proaktif mendukung penanganan PISL (Perkumpulan SKALA, 2016). Kerjasama yang dibentuk KLHK ini dalam pemanfaatan *data base* dari berbagai lembaga, maupun berbagai kajian ilmiah dalam pemberantasan PISL. Kerjasama dan kemitraan juga dibangun KLHK bersama pihak kepolisian, kejaksaan, dan kementerian/lembaga terkait.

Dikutip dari artikel di laman website *National Geographic* (2016), diketahui bahwa peran masyarakat yang diatur di Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam membantu pemerintah menjalankan kebijakan ini masih dapat dikatakan rendah. Pada pasal 27 ayat 1 dikatakan bahwa

“Peran serta rakyat dalam konservasi diarahkan dan digerakkan oleh pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna”.

Kemudian dalam ayat 2 dijelaskan lebih lanjut,

“dalam mengembangkan peran serta rakyat tersebut, pemerintah menumbuhkan dan meningkatkan sadar konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di kalangan rakyat melalui pendidikan dan penyuluhan.”

Pada pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) menunjukkan bahwa peran serta masyarakat dalam hal membantu pemerintah menjalankan kebijakan masih harus digerakkan, diarahkan, diberi penyuluhan dan pendidikan agar sadar akan konservasi. *National Geographic* menjelaskan bahwa peran serta masyarakat ini tidak menjadi solusi di lapangan misalnya terhadap upaya pemberantasan kejahatan terhadap satwa liar, karena permasalahannya yaitu tidak menempatkan masyarakat yang tinggal di dalam kawasan konservasi langsung sebagai pelaku atau mitra atau berpartisipasi langsung sebagai pelaku dan mitra dalam upaya konservasi itu sendiri.

1.3. Karakteristik Lingkungan

1.3.1. Dukungan Publik terhadap Sebuah Kebijakan

Berbeda dengan pendapat yang disampaikan oleh KLHK dan BKSDA bahwa pemerintah (pembuat maupun pelaksana kebijakan) sudah sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat, lain halnya dengan pendapat yang disampaikan oleh pelaku usaha sekaligus *hobbyist* yang diwawancarai penulis (Januari, 2018). Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, ia menyetujui dengan salah satu poin yang dikatakan oleh Sulaiman dalam Perkumpulan SKALA (2016). Ia mengaku pihak pemerintah dari KLHK maupun BKSDA sendiri belum melakukan sosialisasi yang benar-benar menyentuh berbagai kalangan masyarakat, selama ini yang dilakukan adalah sosialisasi atau

seminar hanya kepada pihak-pihak yang ada di lingkup konservasi dan lingkungan hidup saja.

“Komunikasi antara misalnya BKSDA dengan komunitas saat ini sangat kurang baik. Misalnya saja apabila komunitas mengadakan acara, sering sekali pihak BKSDA tidak datang memenuhi undangan tersebut. Padahal komunitas ingin sekali adanya saran atau masukan terkait dengan satwa liar. Komunitas merasa BKSDA seperti intel, sangat sulit untuk ditemui. Komunitas ingin ada acara gabungan seperti seminar terkait satwa liar antara BKSDA, KLHK, LSM, eksportir, pemburu, dan pedagang.” Ucapan salah satu pelaku usaha yang juga menjadi anggota dari komunitas pecinta satwa liar di Jakarta.

1.3.2. Teknologi

Perdagangan satwa liar secara ilegal saat ini merupakan tindakan kriminalan yang terorganisir secara canggih dengan teknologi dan kemampuan sumber daya manusia yang canggih pula. Untuk itu, perlu adanya tindakan perlawanan yang tak kalah canggih pula yang harus dilakukan pemerintah selaku pembentuk kebijakan dan para pelaksana seperti Bea Cukai, BKSDA, LSM dan instansi terkait lainnya. Tentunya hal ini perlu dilakukan untuk mengimbangi kecanggihan yang dilakukan oleh para pelaku tersebut.

Berawal dari obat tradisional lalu semakin hari semakin laris diperdagangkan, bukan hanya diperuntukkan untuk makanan atau obat tradisional saja, melainkan dibeli untuk ornamen, hiasan, bahkan hanya untuk dipelihara karena ingin dipandang *keren* dan *prestis* tidak lantas para pembeli mencari di berbagai penjualan satwa liar, seperti di pasar-pasar konvensional, maupun di *online*. Menjadikan satwa peliharaan terkeren tersebut menyebabkan maraknya perdagangan ilegal dan menjadi salah satu produk terbesar dalam pasar gelap di dunia.

Menurut berita yang ditulis oleh Darnila dan Bale (2016) dalam laman *National Geographic* (<http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/01/teknologi-yang-akan-melawan-kejahatan-satwa-liar#>) produk satwa liar kerap kali disembunyikan di dalam hukum, serta dokumentasi perdagangan. Namun untuk menemukan para pelaku tersebut diperlukan usaha yang keras. Terdapat terlalu banyak dokumen dan terlalu sedikit waktu untuk mengusut proses pengirimannya. Dari pihak Bea Cukai sendiri mengaku memang mereka pernah beberapa kali mendapati beberapa pelaku yang kedapatan akan mengekspor produk satwa liar yang dilindungi. Pihak Bea Cukai menyebut para pelaku umumnya mengaku menyelundupkan satwa tersebut karena alasan ketidaktahuan terkait jenis satwa yang dilindungi, ada pula pelaku yang mengaku bahwa mereka tidak ingin berhadapan dengan repotnya birokrasi yang ada.

Dari pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga menyebutkan saat ini telah ada teknologi berupa aplikasi pengaduan yang dapat diakses dan dijangkau oleh seluruh masyarakat. Aplikasi tersebut dapat langsung diunduh oleh masyarakat dari *Play Store* untuk Android dan App Store untuk iOS. Aplikasi dari pihak Penegakkan Hukum (Gakkum) ini juga menyediakan informasi terkait perlindungan hutan, hukum kehutanan dan lingkungan serta berita-berita seputar penindakan kejahatan lingkungan dan kehutanan. Pihak Gakkum dari KLHK berharap masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi ini untuk membantu pemerintah dan mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah lingkungan dan kehutanan.

Lampiran 2. Rekap Hasil Wawancara

1. A. Informan Kunci Pembentuk Kebijakan (CITES, KLHK)

a. Karakteristik Masalah:

1. Menurut Bapak, apakah yang menyebabkan adanya aktivitas perdagangan satwa liar di Indonesia khususnya di DKI Jakarta sehingga perlu dibentuk kebijakan terkait perdagangan satwa liar
Adanya aktivitas perdagangan karena adanya faktor ekonomi. Tapi sayangnya, banyak pelaku yang melakukan perdagangan ilegal karena mungkin tidak mau "repot" mengikuti perizinan birokrasi. Tapi saat ini, banyak juga para pelaku usaha yang melakukan ekspor ke dalam maupun luar negeri yang mengikuti aturan. Kekayaan TSL kita melimpah, ada kuota yang ditentukan oleh KLHK berdasarkan rekomendasi LIPI.
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pembentukan kebijakan? Apakah masalah tersebut termasuk masalah yang sulit untuk dipecahkan?
Faktor penghambat dari sisi pemerintah: Sumber daya manusia masih kurang, sistem pelayanan masih manual, belum online (sedang dibangun); Faktor penghambat dari sisi pelaku usaha (*client*): info yang didapat masih kurang, pelaku usaha ada yang nakal, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia masih kurang.
Faktor pendukung: *Software* atau perangkat regulasi bisa dikatakan sudah bagus; koordinasi antar pelaksana sudah baik seperti beacukai, karantina, pihak polisi, LIPI, BKSDA.
3. Apa sasaran dari dibentuknya kebijakan ini?
Sasarannya perdagangan tumbuhan satwa liar (TSL) antar negara; meningkatkan devisa negara, tapi tetap dalam koridor ekonomi dapat secara *kontinue*, tetapi TSL atau populasi di alam bisa terjaga.

b. Karakteristik Kebijakan

1. Apakah kebijakan perdagangan satwa liar khususnya di Provinsi DKI Jakarta saat ini sudah jelas dan tidak tumpang tindih?
Sudah jelas
2. Apa saja yang menjadi peraturan-peraturan pembentuk dan pelaksana untuk mendukung terlaksananya kebijakan ini?
Undang-undangnya dari pusat, UU No. 5/tahun 1990 yang sekarang lagi direvisi. Turunannya ada PP No. 7/tahun 1999 tentang pengawetan, dan PP No. 8/tahun 1999 tentang pemanfaatan perdagangan.
3. Darimana sumber dana untuk pembentukan kebijakan perdagangan satwa liar?
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

4. Fasilitas apa saja yang disediakan pemerintah dalam pembentukan kebijakan perdagangan satwa liar?
SDM
5. Siapa saja yang dilibatkan dan yang berperan dalam pembentukan kebijakan perdagangan satwa liar?
Bea Cukai, Karantina, pihak kepolisian, LIPI, BKSDA.
6. Bagaimana koordinasi dan komunikasi dari aparat-aparat yang terlibat dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan?
Koordinasi dan komunikasi dengan pelaksana lain sudah baik, kami juga (dari Sub Bagian kami) juga melakukan sosialisasi terkait regulasi, kuota, list-list, lokasi TSL kepada para pelaksana kebijakan.
7. Bagaimana komitmen dari aparat pembentuk dan pelaksana kebijakan?
Komitmen para petugas sudah cukup baik, internal maupun eksternalnya.
8. Apa harapan Bapak terhadap implementasi kebijakan ini?
Untuk perdagangan TSL berjalan seimbang, target devisa terpenuhi, tapi populasi TSL tetap terjaga.

c. Lingkungan

1. Apakah ada masyarakat (perorangan) atau kelompok-kelompok masyarakat yang mengkritik atau mengintervensi keputusan yang dibuat oleh badan pembentuk kebijakan?
Ada misalnya dari pelaku usaha (yang legal), seperti misalnya perdagangan koral, dimana ada masyarakat di daerah tersebut yang mengeluh dengan adanya pengambilan koral, mereka menganggap merusak populasi koral, padahal pengambilan tersebut legal dan ada dokumen-dokumennya.
2. Apa yang pemerintah lakukan apabila mendapati masyarakat yang melakukan aktivitas perdagangan satwa liar?
Jika melihat ada masyarakat yang melakukan aktivitas perdagangan satwa liar secara ilegal, maka akan ditindak dengan dibawa kepada petugas yang berwenang, misalnya kepada polisi hutan dan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil).
3. Apakah KLHK juga pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan kebijakan perdagangan satwa liar?
Pernah
4. Apakah bapak pernah mendapati aparat pembentuk melakukan aktivitas perdagangan satwa liar khususnya di DKI Jakarta?
Belum, itu urusannya di Sub Direktorat Penegakkan Hukum (GAKKUM KLHK).

B. Informan Kunci Pembentuk Kebijakan (GAKKUM, KLHK)

a. Karakteristik Masalah:

1. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pembentukan kebijakan? Apakah masalah tersebut termasuk masalah yang sulit untuk dipecahkan?

Ya, masalah ini kan merupakan masalah yang sulit. Kendalanya sebenarnya banyak, karena orang-orang yang melakukan perdagangan satwa liar ini lebih pintar, dimana sekarang banyak yang melakukan aktivitas perdagangan satwa tersebut dari online misalnya *Facebook*, *Instagram*. Belum lagi, petugas kami yang ada di lapangan.

Faktor pendukungnya yakni pihak kepolisian juga ikut serta membantu menangkap dan menindak para pelaku tersebut.

2. Bagaimana laju perkembangan aktivitas perdagangan satwa liar saat ini? Apakah meningkat? Atau malah menurun?

Laju perkembangan sih sepertinya meningkat, karena kita terkendala di kapasitas jumlah SDM, baik Polhut ataupun jumlah PPNS, jadi tidak bisa tertangani semua. Kalau kita pantau di *Facebook* saja, rata-rata ada teman yang khusus mantau dalam seminggu, dapat dilihat bahwa ada sekitar 20-30 akun yang memperjualbelikan satwa.

b. Karakteristik Kebijakan

1. Apa saja yang menjadi peraturan-peraturan pembentuk dan pelaksana untuk mendukung terlaksananya kebijakan ini?

Undang-undangnya dari pusat, UU No. 5/tahun 1990 yang sekarang lagi direvisi. Turunannya ada PP No. 7/tahun 1999 tentang pengawetan, dan PP No. 8/tahun 1999 tentang pemanfaatan perdagangan.

2. Siapa saja yang dilibatkan dan yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan perdagangan satwa liar?

Pihak kepolisian, Menkopolri

c. Lingkungan

1. Apa yang pemerintah lakukan apabila mendapati masyarakat yang melakukan aktivitas perdagangan satwa liar?

Tetap dibawa ke penyidik

C. Informan Kunci Pembentuk Kebijakan (GAKKUM, KLHK)

a. Karakteristik Masalah:

1. Apakah yang menyebabkan adanya aktivitas perdagangan satwa liar di Indonesia khususnya di DKI Jakarta sehingga perlu dibentuk kebijakan terkait perdagangan satwa liar

Karena *demandnya* terhadap pembelian satwa masih tinggi, diekspor dijadikan untuk ornamen-ornamen, obat, makanan, dipelihara, dll.

2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pembentukan kebijakan? Apakah masalah tersebut termasuk masalah yang sulit untuk dipecahkan?

Ya, masalah ini merupakan masalah yang 'susah-susah gampang', karena pelanggaran ini orang menganggap bahwa ini sangat menguntungkan, profitnya tinggi, resiko rendah karena ancaman hukuman maksimal hanya 5 tahun, sehingga orang berani dan mereka menganggap hanya 'hewan' saja, padahal persoalan ini merupakan persoalan yang serius.

Faktor penghambat atau kendala dalam melaksanakan kebijakan ini yakni saat ini kan sudah marak perdagangan di online, itu sangat sulit bagi kami karena kami kalah dengan kecanggihan mereka. Faktor kedua, mereka beli pakai jasa kurir, kami susah untuk langsung menangkap pelaku perdagangan satwa tersebut.

3. Apa sasaran dari dibentuknya kebijakan ini?

Mengurangi atau menjaga satwa tidak punah, dan dalam pandangan hukum, pelanggaran berkurang. Itu berarti jenis-jenis di hutan masih tersedia atau paling tidak jumlahnya tetap bertahan. Namun tetap saja tidak tahu kompleksitasnya seperti habitatnya rusak, atau kalau satwa liar masuk ke pemukiman warga, satwanya akan dibunuh, atau pembukaan lahan misal untuk sawit. 'Mereka' (satwa liar) akan terus digusur.

4. Bagaimana laju perkembangan aktivitas perdagangan satwa liar saat ini? Apakah meningkat? Atau malah menurun?

Ya *demandnya* (permintaannya) masih tinggi, terutama untuk dipelihara, untuk ornamen-ornamen, obat-obatan. Negara kita yang lebih banyak diambil satwanya dibanding satwa luar yang ke negara kita. Sekarang meningkatnya secara online. Dari yang kami temukan, ada kira-kira 6 akun yang baru perharinya, yang dimana didapati adanya aktivitas atau konten-konten yang yang memperdagangkan satwa liar, itu baru di *Facebook* saja.

b. Karakteristik Kebijakan

1. Apakah kebijakan perdagangan satwa liar khususnya di Provinsi DKI Jakarta saat ini sudah jelas dan tidak tumpang tindih?

Kebijakan yang misalnya terkait kura-kura yang ada juga kebijakannya di KKP itu sebenarnya bukan tumpang tindih. Kebijakannya bisa dilihat di Gakkum, memang kebijakan terkait kura-kura ada di kami. Kenapa? Karena semuanya sudah ditentukan oleh CITES. Tapi tetap, kami juga harus koordinasi dengan KKP. Tidak mungkin kami mengurus semua. Kami hanya ikut wewenang yang sudah ada yang diatur oleh CITES.

2. Apa saja yang menjadi peraturan-peraturan pembentuk dan pelaksana untuk mendukung terlaksananya kebijakan ini?

Payungnya UU No.5/Thn 1990, tapi di Jakarta sendiri ada BKSDA yang menangani satwa legal dan ilegal, sedangkan yang lebih khusus menangani pelanggaran-pelanggaran terkait perdagangan satwa yang dilindungi, itu adalah Satelit Surabaya yang bekerja sama dengan

pemerintah DKI Jakarta untuk menangani maraknya perdagangan satwa liar, bekerjasama juga dengan polisi.

Terkait daftar atau list-list spesies yang mana saja yang masuk ke dalam kategori terancam punah ada di PP No. 7 tahun 1999, ada di lampiran sekitar 200 spesies. Tapi saat ini Peraturan Pemerintah tersebut sedang direvisi karena ada beberapa satwa yang saat ini terancam dan yang belum dilindungi, misalnya Jambul Putih (Spesies Burung) tidak ada dalam daftar CITES, namun perlu dilindungi karena sudah mulai terancam.

3. Darimana sumber dana untuk pembentukan kebijakan perdagangan satwa liar?

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

4. Fasilitas apa saja yang disediakan pemerintah dalam pembentukan kebijakan perdagangan satwa liar?

Saat ini sebenarnya sudah cukup aman, maksudnya saat ini sudah ada unit pelaksanaan elit (*Cyber Control Unit*), jadi tugasnya mengontrol secara *cyber*, dari sisi perdagangan *conventional* seperti di pasar-pasar, kami banyak menyebar informasi-informasi atau banyak sidak. Kami juga sudah ada tim pengaduan khusus aplikasi.

5. Siapa saja yang dilibatkan dan yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan perdagangan satwa liar?

Unit Pelaksanaan Elit (*Cyber Control Unit*), BKSDA, Kepolisian, KKP.

6. Bagaimana koordinasi dan komunikasi dari aparat-aparat yang terlibat dalam pembentukandan pelaksanaan kebijakan?

Sudah baik, misalnya kami sama LSM juga punya hubungan yang baik dan 'cair'. Komunikasi dengan para pelaksana yang lain juga sudah baik, misalnya terkait list-list spesies yang mana yang terancam punah dan yang belum.

7. Bagaimana komitmen dari aparat pembentuk dan pelaksana kebijakan?

Sebenarnya komitmen mereka sudah cukup bagus ya. Bisnis perdagangan satwa liar ini memang merupakan bisnis besar, tapi untuk mereka (para pelaksana/petugas) bukan merupakan satu hal yang menggiurkan. Apalagi yang melakukan adalah pelaku-pelaku kecil. Jadi karena situasi begitu, komitmen mereka jadi relatif lebih tinggi. Kadang-kadang adalah faktor uang atau dana operasi yang kurang.

Ada petugas yang terlibat dalam aktivitas perdagangan satwa, namun tidak banyak. Seperti di Jakarta sendiri juga ada. Namun, petugas tersebut tidak lepas dari hukuman, dia mendapatkan pelanggaran.

8. Apa harapan Bapak terhadap implementasi kebijakan ini?

Harapannya pelanggaran menurun, karena salah satu penyebabnya adalah keinginan orang atau tujuan orang untuk memelihara, memakan dagingnya, mengambil bagian tubuhnya misalnya untuk dijadikan

ornamen, obat, dan lain-lain. Untuk itu saya punya *tagline*: Mencintai bukan berarti memiliki. Kami juga selaku penegak hukum bisa ikut 'kekinian' untuk melakukan tindakan.

c. Lingkungan

1. Apakah ada masyarakat (perorangan) atau kelompok-kelompok masyarakat yang mengkritik atau mengintervensi keputusan yang dibuat oleh badan pembentuk kebijakan?

Kita sama kelompok-kelompok masyarakat justru memiliki hubungan sudah baik, misalnya dengan LSM juga kalau ada info warga yang misalnya memelihara satwa liar, kita tindak lanjuti. Masyarakat dilibatkan untuk meningkatkan partisipasi publik.

2. Apakah KLHK juga pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan kebijakan perdagangan satwa liar?

Banyak, sudah sering melakukan sosialisasi. Namun terkadang sifatnya masih parsial politis. Oleh karena itu kita punya proyek saat ini untuk bagaimana memerangi perdagangan satwa liar, sekaligus perdagangan satwa liar yang tidak berkelanjutan. Untuk itu kami melakukan strategi komunikasi untuk menjadi dasar inisiatif-inisiatif komunikasi dan supaya bisa masuk ke generasi masa sekarang.

2. Informan Kunci Pelaksana Kebijakan (BKSDA DKI Jakarta)

a. Karakteristik Masalah:

1. Apakah yang menyebabkan adanya aktivitas perdagangan satwa liar di Indonesia khususnya di DKI Jakarta sehingga perlu dibentuk kebijakan terkait perdagangan satwa liar?

Latar belakangnya dari SK Menhut 447 terkait dengan perdagangan satwa, tentang pengaturan tata usaha pengambilan dan penangkapan tumbuhan dan satwa liar (TSL). Satwa yang dilindungi boleh untuk diperdagangkan, asal dari hasil penangkaran, seperti halnya Arwana yang merupakan spesies yang dilindungi, namun diperbolehkan untuk diekspor asalakan dari hasil penangkaran.

2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan? Apakah masalah tersebut termasuk masalah yang sulit untuk dipecahkan?

Tidak ada hambatan dan kendala. Terkait dengan SDM sudah cukup, lalu dana insentif untuk Polhut itu sudah cukup, terkait fasilitas juga sudah cukup. "yang namanya manusia kan tidak adaukupnya ya."

b. Karakteristik Kebijakan

1. Apakah kebijakan perdagangan satwa liar khususnya di Provinsi DKI Jakarta saat ini sudah jelas dan tidak tumpang tindih?

Kebijakan yang ada sudah cukup jelas dan rinci, namun masih harus direvisi karena ada beberapa hal yang masih belum tercantum misalnya terkait sanksi, tidak tertera minimal kurungan penjara minimal berapa tahun. Jika memang tercantum minimal (misalnya) 5 tahun, tidak

mungkin pelaku akan dihukum dan dipenjarakan kurang dari minimal 5 tahun.

Terkait dengan misalnya pihak Bea Cukai yang masih kebingungan terhadap kebijakan ekspor 'tanduk rusa' (misalnya), yang dimana dari kementerian perdagangan menyebutkan bahwa ekspor 'tanduk rusa' merupakan aktivitas yang ilegal artinya dilarang, namun dari KLHK menyebutkan boleh diperdagangkan atau diekspor asal dengan poin-poin tertentu. BKSDA menyebutkan bahwa apa yang disampaikan pemerintah bukan terkait dilarang atau tidak dilarangnya, namun bisa juga terkait poin-poin tersebut misalnya ukurannya, atau tanduk rusa yang sudah diolah, dll. Artinya jika berbicara legal atau ilegalnya itu sebetulnya menjadi *domainnya* KLHK, karena bagian tubuh satwa yang dilindungi itu menjadi apa yang dilindungi juga. Seperti contoh juga tanduk rusa yang ada di Papua yang legal karena pemerintah melihat bahwa masyarakat Papua memerlukan tanduk rusa untuk digunakan sebagai alat untuk berburu.

2. Apa saja yang menjadi peraturan-peraturan pelaksana untuk mendukung terlaksananya kebijakan ini?

BKSDA mempunyai UU No. 5/Thn 1990, PP No. 8 Thn 1999 yang mengatur pemanfaatan TSL serta PP No. 7 Thn 1999 yang mengatur tentang pengawetan TSL sebagai dasar untuk melaksanakan regulasi yang ada.

3. Darimana sumber dana untuk pembentukan kebijakan perdagangan satwa liar?

APBN. Dulu ada sponsor dari *Gibon Foundation*, sekarang tidak lagi.

4. Apakah fasilitas yang disediakan pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan perdagangan satwa liar sudah cukup memadai?

Fasilitas yang disediakan pemerintah sudah cukup baik

5. Siapa saja yang dilibatkan dan yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan perdagangan satwa liar?

Polhut, PPNS, Karantina, Bea Cukai, LSM

6. Bagaimana koordinasi dan komunikasi dari aparat-aparat yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan?

Sosialisasi dengan para pelaksana sudah baik. Kementerian LHK selama ini sudah mengajak teman-teman dari kepolisian, Bea Cukai, Karantina, termasuk perdagangannya untuk diklat terkait CITES misalnya untuk sosialisasikan list-list atau nama spesies-spesies mana yang masuk kategori terancam punah dan yang mana yang belum.

Koordinasi dengan para pelaksana seperti bea cukai, phak kepolisian, karantina sudah baik, dan itu sangat positif.

7. Bagaimana komitmen dari aparat pelaksana kebijakan?

Di Wilayah I (tempat informan bertugas) *clean* (tidak ada yang terlibat dalam aktivitas perdagangan satwa liar). Walaupun ada mungkin di wilayah lain.

8. Apa harapan Bapak terhadap implementasi kebijakan ini?
Jakarta bersih dari perdagangan ilegal satwa liar, dari hulunya juga seperti di daerah-daerah di Indonesia harus dapat dicegah atau dihentikan, lalu para aparat kepolisian dan TNI juga tidak ikut membawa.

c. Lingkungan

1. Apakah ada kelompok-kelompok masyarakat yang mengkritik atau mengintervensi keputusan yang dibuat oleh badan pelaksana kebijakan?
Ada, tapi itu adalah hal wajar, misalnya ada LSM yang sebenarnya adalah mitra kerja kami, mereka ingin misalnya langsung mengambil satwa liar yang dipelihara oleh warga, sedangkan kami tidak punya otoritas langsung mengambil apalagi jika situasinya pemilik rumah sedang tidak ada, kami hanya bisa kirimkan surat kepada warga tersebut, lalu apabila sudah 3 hari warga tersebut belum datang, barulah bisa untuk ambil. Seringkali LSM ingin kami cepat bertindak, apalagi mereka tidak tahu bahwa kami misalnya sedang bekerja di lapang, LSM tidak punya otoritas dan kapasitas untuk menyampaikan laporan kepada mereka.
2. Apa yang pemerintah lakukan apabila mendapati masyarakat yang melakukan aktivitas perdagangan satwa liar?
Serahkan saja, jika itu memang satwa yang dilindungi. Kecuali jika mereka benar melakukan penangkaran.
3. Apakah aparat pelaksana kebijakan juga pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan kebijakan perdagangan satwa liar?
Sering melakukan sosialisasi misalnya ke sekolah-sekolah.

3. Informan Kunci Pelaksana Kebijakan (Bea Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia)

a. Karakteristik Masalah:

1. Sebagai pelaksana kebijakan, apakah Bapak dapat menjelaskan apa peran Bea Cukai (khusus Unit Analyzing Point) dalam melaksanakan kebijakan perdagangan satwa liar di DKI Jakarta?
Bea cukai itu pengawas barang, yang berperan sebagai *border*. Sebenarnya yang merumuskan kebijakannya sendiri adalah instansi-instansi terkait seperti Kementerian LHK dan BKSDA, namun ada juga aturan yang kami *adopt* dari Kementerian Perdagangan. Artinya bagaimana kita diborder ini melaksanakan titipan kebijakannya tersebut, kita dapat titipan lalu kita laksanakan (H).
Ya pada dasarnya kan kita melaksanakan titipan (S).

2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan yang dilakukan pada unit Analyzing Point, khususnya terkait perdagangan satwa liar?

Kendalanya ada di sisi eksportir, kadang ada perbedaan dari klasifikasi, misalnya suatu barang yang masuk ke kode HS (HS Code). Satwa liar sendiri sudah diatur kode HS nya. Ada contoh kasus yang lain dari satwa liar, seperti eksportir yang memaksa merasa sudah tahu kode HS nya namun padahal kode HS tersebut salah. Pemahaman yang berbeda dari para eksportir terkadang yang menyulitkan proses.

Faktor pendukungnya, teknologi yang sudah baik, sudah tersistem, sehingga bisa lebih mudah untuk mengawasinya (H).

3. Bagaimana laju perkembangan perdagangan satwa liar via Tanjung Priok?

Dari data statistik tahun 2012, yang kami lihat bahwa kasus perdagangan satwa liar via pelabuhan Tanjung Priok cenderung menurun. Pernah sempat ada kasus, seperti trenggiling dan Kerang Kepala Kambing. Pada tahun 2016-2017 laju perkembangannya cenderung menurun (H).

b. Karakteristik Kebijakan

1. Apakah kebijakan perdagangan satwa liar khususnya di Provinsi DKI Jakarta saat ini sudah jelas dan tidak tumpang tindih?

Hal yang perlu dikritisi juga dari pembuat kebijakan yakni memang kebijakan atau aturan terkait perdagangan satwa liar ini masih membingungkan, kurang jelas. “Memang di kebijakan kehutannya sendiri masih umum, karena disana ada yang namanya 443, masih berbicara semua hewan, bagian-bagian, tidak jelas disebutkan lebih rinci bagaian apa yang dimaksud, nama latinnya apa, serta kode HS nya, termasuk turunan-turunannya di PP No. 7/tahun 1999 yang masih belum jelas serta belum sinkronnya UU No. 50/1990 dengan Peraturan Menteri Kemendag (H), contoh kasus terkait tanduk rusa. Kementerian Perdagangan menyampaikan bahwa ada 2 kode HS yang mengatur, tanduk rusa yang masih dikerjakan dan yang tidak dikerjakan untuk misalnya kepentingan seni, serta tanduk rusa yang dilarang. “Tapi ternyata yang dilarangpun masih ada pengecualian, selama itu mendapatkan seperti rekomendasi dari mereka, boleh! Nah, kami bingung, karena kami pikir ini aturannya tidak tegas” (H).

2. Darimana sumber dana untuk pembentukan kebijakan perdagangan satwa liar?
APBN.
3. Bagaimana fasilitas yang disediakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut?

Fasilitas yang disediakan pemerintah sudah cukup baik. Misalnya saja terkait pengangkutan satwa liar dari penangkarnya sudah difasilitasi

eksportir. Itu di bawah pengawasan BKSDA dari masing-masing Provinsi (H).

4. Siapa saja yang dilibatkan dan yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan perdagangan satwa liar?

Karena barang-barang yang diekspor ini melalui jalur hijau, pihak dari Bea Cukai kurang dilibatkan dalam pemeriksaan fisik, kecuali jika ada hal yang mencurigakan atau ketidaksesuaian barang seperti jenis dan jumlahnya.

Terkait dengan satwa liar sendiri biasanya sudah diatur oleh BKSDA, sudah ada dibawah pengawasan BKSDA dan Karantina, "jadi kami hanya terima beres istilahnya" (H). Pada dasarnya, barang-barang yang ke kontener itu tidak bisa masuk kalau belum dapat nomor pendaftaran, dokumen sudah lengkap (S).

5. Bagaimana koordinasi dan komunikasi dari aparat-aparat yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan?

Ada sosialisasi semacam *briefing* bersama dengan Kementerian Perdagangan, KLHK, dan Bea Cukai, jadi ada perubahan apa saja terkait interpretasi misalnya contoh kasus tanduk rusa, namun tetap saja masih belum ada titik temu (H).

Koordinasi sudah cukup baik, jika petugas Bea Cukai mengalami kebingungan di lapangan khususnya saat menghadapi pengiriman atau ekspor satwa liar, langsung hubungi pihak BKSDA atau KLHK melalui *Whatsapp* atau telepon (S).

BKSDA pernah sosialisasi melalui *workshop* masalah satwa liar bersama eksportir, Bea Cukai, serta pihak Kepolisian (H).

6. Apa harapan Bapak terhadap implementasi kebijakan ini?
Kebijakannya jelas dan sinkron dengan kebijakan dari kementerian lain (H).

c. Lingkungan

1. Apakah aparat pelaksana kebijakan juga pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan kebijakan perdagangan satwa liar?
Sering melakukan sosialisasi terkait masalah Bea Cukai nya sajamilah ke sekolah-sekolah. Namun terkait perdagangan satwa, belum pernah (S).

4. Informan Kunci (LSM WCS)

a. Karakteristik Masalah:

1. WCS merupakan salah satu organisasi yang aktif dalam memantau atau mengikuti laju atau perdagangan satwa liar di Indonesia, menurut Mbak Sofi, apakah yang menyebabkan adanya aktivitas perdagangan satwa liar di Indonesia khususnya di DKI Jakarta sehingga perlu dibentuk kebijakan terkait perdagangan satwa liar?
Kalau untuk TSL (Tumbuhan dan Satwa Liar) jelas ada *demand* atau permintaan, kejahatan itu pasti ada *demandnya*. Kenapa terjadi ilegal ya

pasti ada *gap*, bisa ada dimana-mana, *gap* dari kebijakannya ataupun dari implementasi kebijakannya.

2. Bagaimana perkembangan atau laju atau tingkat perdagangan satwa liar saat ini di DKI Jakarta?

Isunya makin lama makin meningkat, namun terkait dengan perdagangan satwa liar nya sendiri, tidak bisa dikatakan meningkat atau menurun, karena belum ada riset khusus yang benar-benar melihat secara resmi.

3. Apa saja faktor penghambat kebijakan perdagangan satwa liar di DKI Jakarta?

Saat ini merupakan tantangan bagi pemerintah dan para pelaksana kebijakan, baik BKSDA, Bea Cukai dan para yang bergerak di bidang ini. Aturannya terakhir update pada tahun 1999, jadi saat ini belum ada update terkait spesies lagi. Seharusnya hal itu memang sudah tidak layak lagi untuk diperdagangkan, karena kondisi satwa sudah tidak update atau karena daftar spesies sudah lama. Kondisi populasi satwa yang sudah tidak layak untuk diperdagangkan. Di satu sisi misalnya operasi menemukan Harimau India atau gading Gajah Afrika, mungkin tidak bisa diproses bukom, tidak bisa dipidana karena memang tidak diatur dalam kebijakan.

4. Apa saja faktor pendukung kebijakan perdagangan satwa liar di DKI Jakarta?

Saat ini KLHK sudah punya aplikasi pengaduan atau pelaporan yang bisa diakses oleh masyarakat luas jika misalnya ada mendapati warga yang memelihara satwa liar. Lalu hubungan pemerintah yaitu pembentuk kebijakan dan LSM sangat terbuka.

b. Karakteristik Kebijakan

1. Apakah kebijakan perdagangan satwa liar di DKI Jakarta sudah jelas dan tidak tumpang tindih?

Tumpang tindih ini seperti misalnya kebijakan kura-kura juga terdapat di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Awal mulanya adalah karena Kementerian Kehutanan (yang saat ini KLHK) merupakan otoritas pengelola CITES, sedangkan KKP belum menjadi otoritas pengelola. Karena dulu KKP hanya mengeluarkan kebijakan yang fokus kepada nelayan, sedangkan yang terkait dengan konservasi (di laut juga) diatur oleh KLHK. Namun saat ini, kebijakan tersebut sedang direvisi karena tidak semua spesies misalnya spesies yang ada di laut bisa ditangani oleh KLHK, jadi saat ini KKP juga mulai merevisi kebijakan yang hampir semua terkait nelayan, sekarang sudah ada kebijakan yang terkait konservasi kelautan dan perikanan, namun tetap masih lebih banyak kebijakan terkait nelayan. Itulah yang sedang dilakukan oleh pemerintah bagaimana membuat KKP juga bisa menjadi otoritas pengelola.

2. Bagaimana pendapat Mbak Sofi terkait dengan adanya kebijakan perdagangan satwa liar di Indonesia khususnya di DKI Jakarta?

Aturannya hanya satu yaitu UU No. 5/90, mengatur semuanya, berlaku nasional termasuk Jakarta. Dari segi legislasi sebenarnya sudah dipandang cukup untuk perlindungan konservasi spesies, tapi dari level implementasi kalau dilihat lagi baik-baik ada gap karena UU No.5/90 dan PP no.7/99 cover spesies Indonesia, jadi jika dibaca baik-baik, hanya terdapat larangan mengeluarkan, ketika ada spesies masuk tidak ada ketentuannya di UU No. 5/90. Misalnya ada Harimau India masuknya lewat jalur gelap dan tiba-tiba ada di pasar Pramuka (misalnya), pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak tercantum di PP 7/thn 99. Kelemahannya adalah UU itu hanya mengatur dilindungi dan tidak dilindungi, yang dilindungi ada di PP 7/99 (di lampiran) yang mana semua spesies hanya spesies asli dari Indonesia, sehingga dianggap terdapat gap. Kelemahan lain juga belum spesifik, kategorisasi perlindungannya itu masih dilindungi dan tidak dilindungi, ketentuan dilindungi dan tidak dilindungi diatur spesifik lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Disana dapat diketahui bahwa spesies yang dilindungi dan tidak dilindungi terdapat di lampiran. Itu berarti yang diukur hanya dalam lampiran, tidak disebutkan jenis-jenis itu merupakan Appendix I atau Appendix II, atau Appendix III. Jadi disitulah gap nya untuk regulasi.

3. Apa peran WCS dalam implementasi kebijakan perdagangan satwa liar di DKI Jakarta?

Peran WCS saat ini yaitu kami ikut dalam tim untuk merevisi UU No. 5/90, kami masuk dalam tim untuk membuat draftnya. Untuk PP No.7/99 kami ikut diskusi memberikan penilaian terkait jenis hewan mana yang seharusnya masuk atau keluar. Untuk PP No. 8/99 kami melakukan dukungan penilaian mekanisme kuota, namun tetap keputusan akhir ada di pihak pembuat kebijakan.

4. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar (LSM/masyarakat) untuk dapat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan perdagangan satwa liar di DKI Jakarta?

Peran serta masyarakat ini jelas penting memberikan masukan serta mendorong perubahan kebijakan. Batasan masyarakat tidak bisa ikut serta yakni dalam penegakkan hukum.

5. Apa harapan terkait dengan implementasi kebijakan perdagangan satwa liar di DKI Jakarta?

Dari sisi kebijakan, jangka pendeknya yakni percepat revisi UU No. 5/90 bersama DPR. Jangka panjangnya isu perdagangan satwa liar ini menjadi hal yang sangat penting dan menjadi prioritas utama.

c. Lingkungan

1. Apakah aparat pelaksana kebijakan tahu hewan mana yang masuk ke dalam kategori kritis atau punah atau terancam?

Mungkin tidak tahu semua. Satwa yang dilindungi kan banyak, memang yang jadi fokus dan jadi perhatian besar adalah misalnya gajah, badak, orang utan, harimau, trenggiling, mereka tahu karena memang sudah ada beritanya di media (misalnya). Tapi kalau seperti kukang atau apa yang belum terlalu umum, ya mereka mungkin tidak semua tahu sampai BKSDA memberi tahu. Jadi penyadartahuan di semua level, penting. Dan penyadartahuan itu dilakukan oleh BKSDA ke semua level, karena UU nya kan ada di bawah KLHK.

2. Bagaimana komitmen dan keterampilan aparat pelaksana kebijakan perdagangan satwa di DKI Jakarta?

Komitmen itu kan berdasarkan prioritas, apa yang jadi isu TSL perdagangan masih menjadi isu prioritas kedua dari KLHK setelah kebakaran dan hasil hutan, jadi komitmennya tidak seperti komitmen terkait kebakaran hutan, dimana mereka pasti akan lebih cepat untuk menindaklanjuti.

3. Apakah ada kelompok masyarakat yang mengkritik atau mengintervensi keputusan badan pelaksana terkait kebijakan perdagangan satwa di DKI Jakarta?

Ada, tapi karena mungkin kebijakan itu diprotes apabila menyentuh cara mereka hidup atau tradisi mereka.

5. Informan Kunci (Pelaku Usaha)

a. Karakteristik Masalah:

1. Apakah yang menyebabkan adanya aktivitas perdagangan satwa liar di Indonesia khususnya di DKI Jakarta sehingga perlu dibentuk kebijakan terkait perdagangan satwa liar?

Masih banyaknya permintaan dari hobbyist atau komunitas pecinta satwa yang ingin memiliki atau memelihara satwa liar.

2. Bagaimana perkembangan atau laju atau tingkat perdagangan satwa liar saat ini di DKI Jakarta?

Perdagangan di sisi konvensional (pasar) dan online sepertinya sama saja. Mungkin memang di online semakin marak saat ini. Misalnya waktu itu penjual hanya bisa menjual satwa liar di internet melalui *Kaskus* saja, namun saat ini bisa menjual di *Facebook* juga. Apalagi jualan di *Kaskus* sekarang agak lebih ketat, jika ketahuan jualan satwa yang dilindungi oleh PP No.7/99, maka otomatis *dikick* oleh admin. Sedangkan di *Facebook*, adminnya kurang memantau. Jadi penjual bisa lebih bebas menjual satwa dan satu orang penjual bisa membuat akun 'kloningan' (banyak akun).

3. Apa saja faktor penghambat kebijakan perdagangan satwa liar di DKI Jakarta?

Pihak BKSDA banyak yang masih belum tahu nama latin atau jenis suatu spesies, serta tidak paham habitatnya dimana. Ketika ada pedangan satwa yang tertangkap, pihak BKSDA kerap memanggil tim

ahli dari LIPI. Selain itu BKSDA juga banyak kurang tahu bahwa suatu spesies tersebut dilindungi atau tidak dilindungi.

4. Apa saja faktor pendukung kebijakan perdagangan satwa liar di DKI Jakarta?
Saat ini KLHK dan BKSDA ada gerakan gabungan dibantu dengan pihak kepolisian dan TNI.

b. Karakteristik Kebijakan

1. Apakah Bapak tahu mengenai kebijakan perdagangan satwa liar di Indonesia?

Sebenarnya tahu. Bahkan tahu mengenai harga jual beli satwa, saya juga tahu bahwa harga yang diserahkan oleh beberapa oknum-oknum kepada KLHK adalah harga palsu. Terkait harga bisa tahu juga karena diatur oleh PP no.12 tahun 2014.

2. Bagaimana pendapat Bapak terkait dengan kebijakan perdagangan satwa liar? Apakah kebijakan perdagangan satwa liar di DKI Jakarta sudah jelas dan tidak tumpang tindih?

Kebijakan yang ada saat ini yaitu UU No.5/thn 1990 dan Peraturan Pemerintah No. 7/thn 1999 sedang direvisi. Sebenarnya LIPI sudah dari tahun 2000 memberikan daftar spesies yang terupdate, namun sampai saat ini belum dirubah oleh KLHK selaku pembentuk kebijakan. Satwa-satwa yang ada dalam lampiran PP No.7 tahun 1999 tersebut sudah tidak bisa dijadikan patokan lagi, karena banyak satwa yang pada tahun 1999 dilindungi, saat ini sebenarnya populasinya bertambah dan sudah tidak dilindungi lagi.

Selain itu, harga jual yang diatur pemerintah dinilai merugikan pemerintah dan menguntungkan eksportir. Patokan harga satwa diatur di Perdagangan juga. Kerap kali pemerintah ditipu oleh eksportir karena eksportir menyerahkan list harga palsu ke pemerintah. Misalnya, biawak hijau Papua yang masuk PP no. 7 tahun 1999, dan dilindungi, harga dari pemerintah adalah Rp. 12.000, namun eksportir hanya menyerahkan sekitar 4% dari Rp. 12.000 atau sekitar Rp. 4.800 kepada pemerintah. Keuntungan eksportir besar sekali, jika dihitung mungkin diatas 5 triliun/tahun.

3. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar (LSM/komunitas/masyarakat) untuk dapat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan perdagangan satwa liar di DKI Jakarta?

Komunikasi antara BKSDA dengan komunitas saat ini sangat kurang baik. Misalnya saja apabila komunitas mengadakan acara, sering sekali pihak BKSDA tidak datang memenuhi undangan tersebut. Padahal komunitas ingin sekali adanya saran atau masukan terkait dengan satwa liar. Komunitas merasa BKSDA seperti intel, sangat sulit untuk ditemui. Komunitas ingin ada acara gabungan seperti seminar terkait satwa liar antara BKSDA, KLHK, LSM, eksportir, pemburu, dan pedagang.

4. Apa harapan terkait dengan implementasi kebijakan perdagangan satwa liar di DKI Jakarta?

Harapannya adalah terpotongnya jalur perdagangan satwa liar, dimana jalur perdagangan tersebut ada tiga jalur antara lain dari pemburu; pengepul; dan *hobbies*. Solusinya adalah BKSDA sendiri yang datang dan langsung pendekatan ke *hobbies*. Karena ketika permintaan *hobbies* berkurang karena tahu satwa tersebut dilarang dan tahu mengenai kebijakan pemerintah terkait satwa liar, maka pemburu dan pengepul juga dapat berhenti.

c. Lingkungan

1. Apakah aparat pelaksana kebijakan tahu hewan mana yang masuk ke dalam kategori kritis atau punah atau terancam?

Banyak petugas BKSDA yang tidak tahu spesies atau nama latin atau bahkan habitat dari suatu spesies itu dimana..

2. Bagaimana komitmen dan keterampilan aparat pelaksana kebijakan perdagangan satwa di DKI Jakarta?

Komitmen petugas hanya bagus saat awal-awal pergantian menteri, ada fase dimana mereka rajin untuk sidak atau patroli. Pasar-pasar burung di Jakarta misalnya (Barito, Jatinegara, dan Pramuka) semua bersih dari satwa liar yang dilindungi.

3. Apakah pernah ada petugas yang kedapatan melakukan aktivitas perdagangan satwa liar?

Ya ada. Misalnya jika akan sidak atau patroli, mereka kadang-kadang bilang ke pedagang-pedagang bahwa akan ada sidak dan menyuruh untuk menyembunyikan satwa-satwa yang akan dilindungi tersebut. Dari perbuatan tersebut, petugas dapat uang sebesar Rp. 300.000 dari satu pedagang, dan pedagang banyak totalnya dari 3 pasar di Jakarta, mungkin ada sekitar 50 perdagangan dari Barito, Jatinegara, dan Pramuka. Mungkin mereka melakukan itu karena gaji yang diterima sedikit, sehingga cari tambahan lain.

4. Apakah pemerintah pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat?

Setahu saya kalau di Jabodetabek tidak ada. Tidak tahu kalau di daerah ada juga ada tidak. Seperti contoh, saya pernah bertemu dengan pemelihara kukang, saat saya tanya sudah berapa lamaelihara kukang? Dia jawab sekitar 10 tahun, lalu saya tanya, apakah tahu bahwa kukang dilindungi? Lalu ia menjawab tidak tahu. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah misalnya BKSDA kurang sosialisasi dengan warga.

5. Apakah pemerintah pernah melakukan kunjungan atau kontrol ke warga yang melakukan aktivitas penangkaran?

Tidak pernah. Walaupun warga (perorangan atau komunitas) sudah melakukan penangkaran sesuai dengan ketentuan AD/RT, ada notaris, bahkan tercatat di kementerian, BKSDA diundang namun tidak mau.

6. Apakah ada kelompok masyarakat yang mengkritik atau mengintervensi keputusan badan pelaksana terkait kebijakan perdagangan satwa di DKI Jakarta?

Mungkin terkait patokan harga saja yang harus dirubah oleh pemerintah, jangan sampai pemerintah dirugikan oleh eksportir.



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. 2015. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pusat Tingkat Provinsi DKI Jakarta, 2013, Diambil 7 Februari 2018, dari situs [World Wide Web: https://jakarta.bps.go.id/statictable/2015/04/20/79/jumlah-pegawai-negeri-sipil-pusat-tingkat-provinsi-dki-jakarta-2013.html](https://jakarta.bps.go.id/statictable/2015/04/20/79/jumlah-pegawai-negeri-sipil-pusat-tingkat-provinsi-dki-jakarta-2013.html)
- Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. 2015. Luas Daerah administrasi Menurut Kabupaten/Kota Administrasi, 2009-2013. Diambil 7 Februari 2018, dari situs [World Wide Web: https://jakarta.bps.go.id/statictable/2015/04/20/58/luas-daerah-administrasi-menurut-kabupaten-kota-administrasi-2009-2013.html](https://jakarta.bps.go.id/statictable/2015/04/20/58/luas-daerah-administrasi-menurut-kabupaten-kota-administrasi-2009-2013.html)
- Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. 2017. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta, 2015. Diambil 7 Februari 2018, dari situs [World Wide Web: https://jakarta.bps.go.id/statictable/2017/01/30/137/jumlah-penduduk-dan-rasio-jenis-kelamin-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta-2015.html](https://jakarta.bps.go.id/statictable/2017/01/30/137/jumlah-penduduk-dan-rasio-jenis-kelamin-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta-2015.html)
- Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. 2017. Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun, 2010-2015. Diambil 21 Maret 2018, dari situs [World Wide Web: https://jakarta.bps.go.id/statictable/2017/01/30/136/jumlah-penduduk-dan-laju-pertumbuhan-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta-2010-2014-dan-2015.html](https://jakarta.bps.go.id/statictable/2017/01/30/136/jumlah-penduduk-dan-laju-pertumbuhan-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta-2010-2014-dan-2015.html)
- Baedhowi. (2004). Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan: Studi Kasus di Kabupaten Kendal dan Kota Surakarta, Jakarta: Disertasi Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia.
- Creswell, J.W. (2010). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darnila, N. (2016). Revisi Undang-Undang Konservasi untuk Membuka Peran Masyarakat. Diambil 23 Maret 2018, dari situs [World Wide Web: http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/01/revisi-undang-undang-konservasi-untuk-membuka-peran-masyarakat](http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/01/revisi-undang-undang-konservasi-untuk-membuka-peran-masyarakat)
- Darnila, N., dan Bale R. (2016). Teknologi yang Akan Melawan Kejahatan Satwa Liar. Diambil 8 April 2018, dari situs [World Wide Web: http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/01/teknologi-yang-akan-melawan-kejahatan-satwa-liar#](http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/01/teknologi-yang-akan-melawan-kejahatan-satwa-liar#)
- Dian, A. (6 Maret 2018). Perdagangan Satwa Ilegal Ada di Sekitar Kita, Begini Kondisinya. Diambil 7 Februari 2018, dari situs [World Wide Web: https://www.tribunnews.com/2018/03/06/perdagangan-satwa-ilegal-ada-di-sekitar-kita-begini-kondisinya](#)

<http://www.mongabay.co.id/2018/03/06/perdagangan-satwa-ilegal-ada-di-sekitar-kita-begini-kondisinya/>

Edward III, dan George, C. (1980). *Implementating Public Policy* Washington DC: Congressional Quarterly Press.

Kabar Jakarta. (2015, 16 Oktober). Scorpion: Perdagangan Satwa Liar di Jakarta Tidak Terkendali. Diambil 17 Oktober 2017, dari situs World Wide Web: <http://kabarjakarta.com/scorpion-perdagangan-satwa-liar-di-jakarta-tidak-terkendali/>

Khoiri, S., ProFauna: Fakta tentang Satwa Liar Indonesia. Diambil 11 Maret 2017, dari situs World Wide Web: <http://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.VukorRZcSko>

Mardiastuti, A. (2011). *Pengkajian dan Pembuatan Peta Kerawanan Ilegal Trade*. Jakarta: Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan Republik Indonesia.

Mazmanian, D. H., dan Paul, A. S. (1983). *Implementation and Public Policy*, New York: HarperCollins.

Meodia, A. (2015). KLHK Luncurkan Aplikasi Pengaduan Gakkum. Diambil 15 Maret 2018, dari situs World Wide Web: <https://www.antaranews.com/berita/536099/klhk-luncurkan-aplikasi-pengaduan-gakkum>

Meter, Donald Van, dan Carl Van Horn. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework dalam Administration and Society* 6, 1975, London: Sage.

Nurani, D. 2009. *Analisis Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri di Kota Jakarta Selatan*. Depok: Disertasi Universitas Indonesia. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Perkumpulan SKALA.(2016). *Potret Perdagangan Ilegal Satwa Liar di Indonesia*. Jakarta: Perkumpulan SKALA.

Purnaningsih, D. (2018). Perdagangan Ilegal Satwa Liar di Indonesia Masih Marak. Diambil 15 Maret 2018 dari situs World Wide Web: <http://www.greeners.co/berita/perdagangan-ilegal-satwa-liar-indonesia-masih-marak/>

PPID KLHK. (2018). Klhk Bangun Call Center Pengaduan Permasalahan Konservasi. Diambil 8 April 2018 dari situs World Wide Web: http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/1035

- Prayoga, W. A. K. (2015). Analisis Terhadap Perlindungan Kasus Orangutan Kalimantan (Pongo Pygmaeus) Sebagai Obyek Eksploitasi Yang Dijadikan Alat Pemuas Nafsu Seks Disebuah Tempat Prostitusi Di Kalimantan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.
- ProFauna. (2008, 17 September). Press Release ProFauna : ProFauna Demands For The Illegal Wildlife Trade In Sumatera To Stop. Diambil 21 Juli 2017, dari situs World Wide Web: http://www.profauna.org/content/en/pressrelease/2008/last_killing.html
- Quade, E.S. (1984). Analysis For Public Decisions New York: Elsevier Science Publishers.
- Rajagukguk, E. V. (2016). Efektivitas Peraturan Perdagangan Satwa Liar di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 31(2), 216-228.
- Rini, D. E. C. (2008). Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Satwa Langka di Pasar Burung Pramuka. *Doctoral dissertation*. Program Pascasarjana. Universitas Indonesia
- Ripley, Rendal, B., dan Grace, A.F. (1986). Policy Implementation and Bureaucracy, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis.
- Sasongko, Y. D., Rofikah, dan Wiwoho, J. (2015). Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Satwa Liar Dilindungi Non-Endemik di Indonesia. *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, vol. III, No. 2/2015. 118.
- Saleh Choirul, Pelaksanaan CITES di Indonesia, Diambil 8 Februari 2018, dari Situs World Wide Web <http://www.wwf.or.id/?4201/pelaksanaan-CITES-di-Indonesia>
- Sinaga, H. N. A. (2008). Perdagangan Jenis Kura-kura Darta dan Kura-kura Air Tawar di Jakarta. Bogor: Tesis Sekolah Pascasarjana IPB.
- Sudiharti, Y. (2004). *Implementasi kewenangan pelayanan perijinan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi di Dinas Pertanian dan Kehutanan propinsi DKI Jakarta*(Doctoral dissertation, FISIP-UI).
- Soehartono, T., dan Mardiasuti, A. (2002). Cites implementation in Indonesia. Nagao Natural Environment Foundation. Jakarta.
- Sundarso, Astuti, R. S., Sulandari, S. (2014). Teori Administrasi. Universitas Terbuka.
- Sunggono, B. (1994). Hukum dan Kebijaksanaan Publik. Jakarta: Sinar Grafika.

- Suwitri, S., Purnaweni, H., Kismartini. (2016). Analisis Kebijakan Publik. Universitas Terbuka.
- Suyatri, C. (2015). Politik Lingkungan: Penanganan Perdagangan Satwa dengan Identifikasi Pasal-Pasal Perundangan CITES. *Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan*, Vol.11(1).
- Tim Investigasi Majalah Tempo. Satwa Liar Ilegal di Vila Pejabat. Diambil 23 Maret 2018, dari situs World Wide Web: <https://investigasi.tempo.co/191/satwa-liar-ilegal-di-vila-pejabat>
- Tim Prima Pena. (2007). Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Gita Media Press. Jakarta
- Tirtaningtyas, F. N. (2017). Perdagangan Satwa Liar Dilindungi Tetap Marak, Bagaimana Mengatasinya?. Diambil 15 Maret 2018, dari situs World Wide Web: <http://www.mongabay.co.id/2017/09/11/perdagangan-satwa-liar-dilindungi-tetap-marak-bagaimana-mengatasinya/>
- TRAFFIC. (2015). Puluhan Ribu Burung Dijual Secara Ilegal di Jakarta. Diambil 15 Maret 2018, dari situs World Wide Web: <http://www.traffic.org/news-indonesian/2015/9/25/puluhan-ribu-burung-dijual-secara-ilegal-di-jakarta.html>
- Undang-Undang No.5 Tahun 1990, Tentang: Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Diambil 8 Februari 2018, dari situs Word Wide Web: http://blhd.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/2015/03/UU_No_5_Tahun_1990-tentang-konservasi-sumber-daya-alam-hayati.pdf
- USAID. (2015, 6 Maret). Perdagangan Satwa Liar, Kejahatan terhadap Satwa Liar dan Perlindungan Spesies di Indonesia: Konteks Kebijakan dan Hukum Changes for Justice Project, Laporan Publikasi USAID untuk Chemonics Inc. oleh Indonesian Program, Wildlife Conservation Society. Hal 14. Diambil 25 Februari 2017, dari situs World Wide Web: http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00KH51.pdf
- United States Agency for International Development (USAID). (2015, 9 April). Proyek Perubahan untuk Keadilan (*Changes For Justice*), Kejahatan terhadap Satwa Liar di Indonesia: Penilaian Cepat terhadap Pengetahuan, Tren, dan Prioritas Aksi Saat Ini. Hal 25. Diambil 25 Februari 2017, dari situs World Wide Web: http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00KH53.pdf
- Wahab, S.A. (2005). Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Waryono, T. (2001). Aspek Pengendalian Perdagangan Ilegal Satwa Liar yang Dilindungi di Provinsi DKI Jakarta. Kumpulan Makalah Periode 1987-

2008. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Jakarta.

Winarno, B. (2002). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Press.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 50/M-Dag/Per/2013.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

DAFTAR PERTANYAAN SEBAGAI PEDOMAN WAWANCARA

1. Pedoman wawancara dengan Informan Kunci Pembentuk Kebijakan (KLHK)

DATA INFORMAN:

- 3.1. Nama :
- 3.2. Jenis Kelamin :
- 3.3. Jabatan :
- 3.4. Instansi :

a. Karakteristik Masalah:

- 3.4.1. Sebagai pembentuk kebijakan, apakah Bapak/Ibu dapat menjelaskan latar belakang dibentuknya kebijakan perdagangan satwa liar, khususnya di Provinsi DKI Jakarta?
- 3.4.2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pembentukan kebijakan? Apakah masalah tersebut termasuk masalah yang sulit untuk dipecahkan?
- 3.4.3. Siapa saja sasaran atau target dari kebijakan ini? Apakah target tersebut homogen atau heterogen?
- 3.4.4. Berapa besar proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi DKI Jakarta?
- 3.4.5. Apa yang diperlukan untuk merubah perilaku pedagang?

b. Karakteristik Kebijakan

- 1) Apakah kebijakan perdagangan satwa liar khususnya di Provinsi DKI Jakarta saat ini sudah jelas dan tidak tumpang tindih?
- 2) Apa saja yang menjadi peraturan-peraturan pembentuk dan pelaksana untuk mendukung terlaksananya kebijakan ini?
- 3) Apakah kebijakan ini telah memiliki dukungan teoritis?
- 4) Darimana sumber dana untuk pembentukan kebijakan perdagangan satwa liar?
- 5) Fasilitas apa saja yang disediakan pemerintah dalam pembentukan kebijakan perdagangan satwa liar?
- 6) Siapa saja yang dilibatkan dan yang berperan dalam pembentukan kebijakan perdagangan satwa liar?
- 7) Bagaimana koordinasi dan komunikasi dari aparat-aparat yang terlibat dalam pembentukandan pelaksanaan kebijakan?
- 8) Apakah ada ketidakjelasan aturan yang ada pada badan pembentukan kebijakan ini?

- 9) Bagaimana komitmen dari aparat pembentuk dan pelaksana kebijakan?
- 10) Apa harapan Bapak/Ibu terhadap implementasi kebijakan ini?

c. Lingkungan

- 1) Apakah ada kelompok-kelompok masyarakat yang mengkritik atau mengintervensi keputusan yang dibuat oleh badan pembentuk kebijakan?
- 2) Apa tanggapan masyarakat terhadap adanya kebijakan ini?
- 3) Apa yang pemerintah lakukan apabila mendapati masyarakat yang melakukan aktivitas perdagangan satwa liar?
- 4) Apakah KLHK juga pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan kebijakan perdagangan satwa liar?
- 5) Apakah bapak/ibu pernah mendapati aparat pembentuk melakukan aktivitas perdagangan satwa liar khususnya di DKI Jakarta?

2. Pedoman wawancara dengan Informan Kunci Pelaksana Kebijakan (BKSDA DKI Jakarta; dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia)

DATA INFORMAN:

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Jabatan :
- d. Instansi :

3.4.5.1.1. Karakteristik Masalah:

1. Sebagai pelaksana kebijakan, apakah Bapak/Ibu dapat menjelaskan latar belakang dibentuknya kebijakan perdagangan satwa liar, khususnya di Provinsi DKI Jakarta?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan? Apakah masalah tersebut termasuk masalah yang sulit untuk dipecahkan?
3. Siapa saja sasaran atau target dari kebijakan ini? Apakah target tersebut homogen atau heterogen?
4. Berapa besar proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi DKI Jakarta?
5. Apa yang diperlukan untuk merubah perilaku pedagang?

3.4.5.1.2. Karakteristik Kebijakan

1. Apakah kebijakan perdagangan satwa liar khususnya di Provinsi DKI Jakarta saat ini sudah jelas dan tidak tumpang tindih?
2. Apa saja yang menjadi peraturan-peraturan pelaksana untuk mendukung terlaksananya kebijakan ini?
3. Apakah kebijakan ini telah memiliki dukungan teoritis?
4. Darimana sumber dana untuk pembentukan kebijakan perdagangan satwa liar?

5. Fasilitas apa saja yang disediakan pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan perdagangan satwa liar?
6. Siapa saja yang dilibatkan dan yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan perdagangan satwa liar?
7. Bagaimana koordinasi dan komunikasi dari aparat-aparat yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan?
8. Apakah ada ketidakjelasan aturan yang ada pada badan pelaksana kebijakan ini?
9. Bagaimana komitmen dari aparat pelaksana kebijakan?
10. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap implementasi kebijakan ini?

3.4.5.1.3. Lingkungan

1. Apakah ada kelompok-kelompok masyarakat yang mengkritik atau mengintervensi keputusan yang dibuat oleh badan pelaksana kebijakan?
2. Apa tanggapan masyarakat terhadap adanya kebijakan ini?
3. Apa yang pemerintah lakukan apabila mendapati masyarakat yang melakukan aktivitas perdagangan satwa liar?
4. Apakah aparat pelaksana kebijakan juga pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan kebijakan perdagangan satwa liar?
5. Apakah bapak/ibu pernah mendapati aparat pembentuk melakukan aktivitas perdagangan satwa liar khususnya di DKI Jakarta?

3. Pedoman wawancara dengan Informan Kunci (WCS/WCU)

DATA INFORMAN:

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Jabatan :
- d. Instansi :

a. Karakteristik Masalah:

1. WCS merupakan salah satu organisasi yang aktif dalam memantau atau mengikuti laju atau perdagangan satwa liar di Indonesia, menurut Ibu/Bapak, apakah yang menyebabkan adanya aktivitas perdagangan satwa liar di Indonesia khususnya di DKI Jakarta?
2. Bagaimana perkembangan atau laju atau tingkat perdagangan satwa liar saat ini di DKI Jakarta?

b. Karakteristik Kebijakan

- 1) Apakah kebijakan perdagangan satwa liar di DKI Jakarta sudah jelas dan tidak tumpang tindih?
- 2) Bagaimana pendapat Ibu/Bapak terkait dengan adanya kebijakan perdagangan satwa liar di Indonesia khususnya di DKI Jakarta?
- 3) Apa saja faktor penghambat dan pendukung kebijakan perdagangan satwa liar di DKI Jakarta?
- 4) Apa peran WCS dalam implementasi kebijakan perdagangan satwa liar di DKI Jakarta?

- 5) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar (LSM/masyarakat) untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan perdagangan satwa liar di DKI Jakarta?
- 6) Apa harapan Ibu/Bapak terkait dengan implementasi kebijakan perdagangan satwa liar di DKI Jakarta?

c. Lingkungan

1. Bagaimana kinerja aparat pelaksana kebijakan perdagangan satwa liar di DKI Jakarta?
2. Bagaimana komitmen dan keterampilan aparat pelaksana kebijakan perdagangan satwa di DKI Jakarta?
3. Apakah ada kelompok masyarakat yang mengkritik atau mengintervensi keputusan badan pelaksana terkait kebijakan perdagangan satwa di DKI Jakarta?

4. Pedoman wawancara dengan Informan Kunci (Bea Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia)

DATA INFORMAN:

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Jabatan :
- d. Instansi :

a. Karakteristik Masalah:

- 1) Sebagai pelaksana kebijakan, apakah Bapak dapat menjelaskan apa peran Bea Cukai (khusus Unit Analyzing Point) dalam melaksanakan kebijakan perdagangan satwa liar di DKI Jakarta?
- 2) Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan yang dilakukan pada unit Analyzing Point, khususnya terkait perdagangan satwa liar?
- 3) Bagaimana laju perkembangan perdagangan satwa liar via Tanjung Priok?

b. Karakteristik Kebijakan

- 1) Apakah kebijakan perdagangan satwa liar khususnya di Provinsi DKI Jakarta saat ini sudah jelas dan tidak tumpang tindih?
- 2) Darimana sumber dana untuk pembentukan kebijakan perdagangan satwa liar?
- 3) Bagaimana fasilitas yang disediakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut?

- 4) Siapa saja yang dilibatkan dan yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan perdagangan satwa liar?
- 5) Bagaimana koordinasi dan komunikasi dari aparat-aparat yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan?
- 6) Apa harapan Bapak terhadap implementasi kebijakan ini?

c. Lingkungan

- 1) Apakah aparat pelaksana kebijakan juga pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan kebijakan perdagangan satwa liar?

5. Pedoman wawancara dengan Informan Kunci (Pelaku Usaha)

DATA INFORMAN:

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Jabatan :
- d. Instansi :

a. Karakteristik Masalah:

- 1) Apakah yang menyebabkan adanya aktivitas perdagangan satwa liar di Indonesia khususnya di DKI Jakarta sehingga perlu dibentuk kebijakan terkait perdagangan satwa liar?
- 2) Bagaimana perkembangan atau laju atau tingkat perdagangan satwa liar saat ini di DKI Jakarta?
- 3) Apa saja faktor penghambat kebijakan perdagangan satwa liar di DKI Jakarta?
- 4) Apa saja faktor pendukung kebijakan perdagangan satwa liar di DKI Jakarta?

b. Karakteristik Kebijakan

1. Apakah Bapak tahu mengenai kebijakan perdagangan satwa liar di Indonesia?
2. Bagaimana pendapat Bapak terkait dengan kebijakan perdagangan satwa liar? Apakah kebijakan perdagangan satwa liar di DKI Jakarta sudah jelas dan tidak tumpang tindih?

3. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar (LSM/komunitas/masyarakat) untuk dapat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan perdagangan satwa liar di DKI Jakarta?
4. Apa harapan terkait dengan implementasi kebijakan perdagangan satwa liar di DKI Jakarta?

c. Lingkungan

- 1) Apakah aparat pelaksana kebijakan satwa liar yang masuk ke dalam kategori kritis atau punah atau terancam?
- 2) Bagaimana komitmen dan keterampilan aparat pelaksana kebijakan perdagangan satwa di DKI Jakarta?
- 3) Apakah pernah ada petugas yang melakukan aktivitas perdagangan satwa liar?
- 4) Apakah pemerintah pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat?
- 5) Apakah pemerintah pernah melakukan kunjungan atau kontrol ke warga yang melakukan aktivitas penangkaran?
- 6) Apakah ada kelompok masyarakat yang mengkritik atau mengintervensi keputusan badan pelaksana terkait kebijakan perdagangan satwa di DKI Jakarta?